

**STRATEGI MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN
DAN KEMANDIRIAN DESA
BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN
DENGAN METODE ANALISIS SWOT
DI DESA WAIMI KABUPATEN ALOR**

Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Manajemen



Disusun oleh

UMBUL YABU TARANGGANA

NIM. 20402400370

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2025**

TESIS

**STRATEGI MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN
DAN KEMANDIRIAN DESA
BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN
DENGAN METODE ANALISIS SWOT
DI DESA WAIMI KABUPATEN ALOR**



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Tesis Program Magister Manajemen

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

جامعة سلطان آوجونج الإسلامية

Semarang, 16 Agustus 2025

Pembimbing,

Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM
NIK. 210491025

STRATEGI MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN
DAN KEMANDIRIAN DESA
BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN
DENGAN METODE ANALISIS SWOT
DI DESA WAIMI KABUPATEN ALOR

Disusun oleh :
Umbu Yabu Taranggana
NIM. 20402400370

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 24 Agustus 2025

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing,



Dr. E. Drs. H. Marno Nugroho, MM
NIK. 210491025

Pengaji 1,



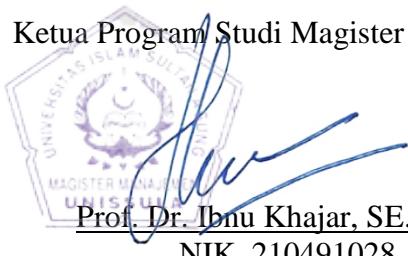
Prof. Dr. Hj. Mutamimah, S.E., M.Si.
NIK. 210491026

Pengaji II,

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE. M.Si.
NIK. 210491028

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen
Tanggal 24 Agustus 2025

Ketua Program Studi Magister Manajemen



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE. M. Si.
NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umbu Yabu Taranggana

NIM : 20402400370

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Strategi Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Berbasis Indeks Desa Membangun Dengan Metode Analisis SWOT Di Desa Waimi Kabupaten Alor” adalah hasil karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika maupun tradisi tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 24 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Umbu Yabu Taranggana

Nim. 20402400370

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi Desa dalam peningkatan status kemajuan Desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Waimi Kabupaten Alor, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja IDM demi peningkatan status kemajuan Desa di Desa Waimi. Dengan menggunakan pendekatan teori manajemen stratejik dan metode analisis SWOT, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek yang memengaruhi capaian kinerja IDM, dan bagaimana merumuska perencanaan pembangunan Desa, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan tingkat Desa berbasis IDM sehingga terjadi peningkatan status kemajuan Desa Waimi. Pendekatan metodologi penelitian kualitatif dipakai denga teknik observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, dan analisis data sekunder. Informan dalam penelitian ini ada beberapa unsur, yang pertama dari unsur internal Desa yaitu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Unsur eksternal Desa adalah, Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten, dan Pendamping Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis diagram SWOT posisi Desa Waimi berada disegmen *grow and build*, apabila berdasarkan matrik kuadran SWOT Rumah Sakit Islam Sultan Agung berada pada posisi kuadran IV dengan strategi defensif. Berdasarkan analisis matriks SWOT ada 12 (dua belas) strategi langsung yang dapat diterapkan oleh Desa Waimi yang langsung berpengaruh terhadap skor IDM, dan ada 4 (empat) strategi pendukung, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja IDM Desa Waimi.

Kata kunci: Pembangunan Desa, IDM, Manajemen Stategik, *Analisis SWOT*



Abstract

This study aims to identify the challenges and potentials of the village in improving its development status based on the Village Development Index (Indeks Desa Membangun/IDM) in Waimi Village, Alor Regency, as well as to formulate appropriate strategies to enhance IDM performance for advancing the development status of Waimi Village. By applying the strategic management theory approach and SWOT analysis method, this research seeks to conduct a comprehensive evaluation of the factors influencing IDM performance achievements, and how to formulate village development planning, implementation, and evaluation based on IDM, in order to elevate the progress status of Waimi Village. The study employs a qualitative research methodology using field observation techniques, interviews with stakeholders, and secondary data analysis. Informants in this research consist of two main groups: the internal elements of the village (Village Head, Village Apparatus, Village Consultative Body, and Community Institutions) and external elements (Subdistrict Government, District PMD Office, and Village Facilitators). The results of the study indicate that, based on the SWOT diagram analysis, Waimi Village is positioned in the “grow and build” segment. However, according to the SWOT quadrant matrix, Sultan Agung Islamic Hospital is located in quadrant IV with a defensive strategy. Based on the SWOT matrix analysis, there are 12 (twelve) direct strategies that can be applied by Waimi Village, which directly affect the IDM score, and 4 (four) supporting strategies that indirectly influence the IDM performance of Waimi Village.

UNISSULA

Keywords: Village Development, IDM, Strategic Management, SWOT Analysis

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan pembangunan Desa di Indonesia, dan khususnya dimana penelitian ini dilakukan.

Selama proses penulisan tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana sudah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses pembuatan tesis ini;
2. Orang Tua, keluarga, istri Marlince P Sir, serta anak Kirana dan Viana tercinta yang sudah menginspirasi dan memotivasi penulis disetiap kondisi yang ada;
3. Bapak Dr. E. Drs. H. Marno Nugroho, MM selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar membimbing, mengarahkan, mengampu dan memberikan motivasi, saran-saran kepada penulis sehingga tesis ini dapat tersusun;
4. Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan saran kepada saya atas penyelesaian penelitian ini;

5. Prof. Dr. Hj. Mutamimah, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan dan saran terbaiknya untuk perbaikan tesis ini;
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran dan pandangan baru selama masa perkuliahan berlangsung;
7. Pemerintah Kabupaten Alor, dan terkhusus segenap unsur Pemerintahan, Kelembagaan, masyarakat Desa Waimi yang memberikan banyak bantuan dan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Serta para pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan penelitian ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kekeliruan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan penelitian ini. Peneliti berharap semoga tesis ini menjadi suatu karya yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan pembangunan Desa.

Semarang, 24 Agustus 2025
Penulis



Umbu Yabu Taranggana
NIM. 20402400370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Batasan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Manajemen Stratejik.....	17
2.1.1. Pengertian Manajemen Stratejik	17
2.1.2. Prinsip dan Aspek-Aspek Manajemen Stratejik.....	20
2.2. Analisis SWOT	22
2.2.1. Pengertian Analisis SWOT	22
2.2.2. Faktor-Faktor Dalam Analisis SWOT.....	25
2.3. Langkah-langkah Anallisis SWOT.....	28
2.3.1. Identifikasi dan Pengelompokan Faktor Internal dan eksternal.....	28
2.3.2. Analisis IFAS dan EFAS.....	29
2.3.3. Analisis Diagram SWOT.....	32
2.3.4. Analisis Matriks SWOT.....	34
2.4. Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa.....	37
2.4.1. Elemen-Elemen dalam Tata Kelola Pembangunan Desa.....	38
2.4.2. Tahapan Pembangunan Desa.....	44
2.5. Indeks Desa Membangun (IDM).....	48

2.5.1.	Indeks, Dimensi, Indikator, dan Metode Perhitungan IDM.....	49
2.5.2.	Klasifikasi Status Desa.....	53
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	55
2.7.	Kerangka Pikir.....	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		58
3.1.	Jenis Penelitian.....	58
3.2.	Sampel Penelitian.....	59
3.3.	Informan Peneliti.....	59
3.4.	Teknik Penentuan Informan.....	60
3.5.	Sumber dan Jenis Data.....	60
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	61
3.7.	Teknik Analisis Data.....	62
3.7.1.	Analisis Sebelum Dilapangan.....	63
3.7.2.	Analisis Data Kualitatif.....	64
3.7.3.	Analisis Data Dilapangan.....	65
BAB IV PROFIL DESA WAIMI		68
4.1.	Gambaran Umum Desa	68
4.1.1.	Letak Geografis	68
4.1.2.	Demografis	68
4.2.	Organisasi Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	71
4.2.1.	Pemerintah Desa.....	71
4.2.2.	Badan Permusyawaratan Desa	72
4.2.3.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	73
4.3.	Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Waimi	78
4.3.1.	Pemutahiran IDM Desa Waimi 2024	78
4.3.2.	Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi Tahun 2024	85
BAB V STRATEGI PENINGKATAN IDM DESA WAIMI.....		87
5.1.	Identifikasi Capaian Kinerja IDM Yang Masih Rendah	87
5.2.	Analisis Indikator IDM Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Pembangunan Desa.	91
5.2.1.	Analisis Indikator Urusan Lokal Desa.	91
5.2.2.	Analisis Indikator Urusan Supra Desa.	94
5.3.	Analisis SWOT.....	96
5.3.1.	Analisis Lingkungan Internal	97

5.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal	99
5.4. Analisis IFAS dan EFAS.....	102
5.4.1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan.....	102
5.4.2. Analisis Peluang dan Ancaman.....	104
5.4.3. Analisis Diagram SWOT.....	110
5.4.4. Analisis Matriks SWOT	112
5.5. Formulasi Strategi	115
5.5.1. Strategi Menuju Status Desa Berkembang.....	117
5.5.2. Strategi Menuju Status Desa Maju.....	121
5.5.3. Strategi Menuju Status Desa mandiri.....	125
5.6. Implementasi Strategi.....	133
5.6.1. Perencanaan Pembangunan Desa	134
5.6.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	140
5.6.3. Evaluasi Pembangunan Desa.....	144
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	147
6.1. Kesimpulan.....	148
6.1.1. Strategi Menuju Desa Berkembang.....	148
6.1.2. Strategi Menuju Desa Maju.....	149
6.1.3. Strategi Menuju Desa Mandiri	149
6.1.4. Strategi Pendukung.....	150
6.2. Saran	151
6.3. Keterbatasan Penelitian	152
6.4. Agenda Penelitian Yang Akan Datang.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	2
Tabel 1. 2 Kinerja IDM Tingkat Nasional T.A 2020-2024.....	6
Tabel 1. 3 Kinerja IDM Kecamatan Lembur T.A 2020-2024.....	8
Tabel 1. 4 Kinerja IDM Kecamatan Lembur Berdasar Nama Desa T.A 2020-T.A 2024.....	9
Tabel 1. 5 Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBN T.A 2022-2024.....	9
Tabel 2.1 Penyajian Data Identifikasi dan Pengelompokan Faktor Internal dan Eksternal.....	29
Tabel 2.2 Penyajian Data IFAS dan EFAS	31
Tabel 2.3 Matriks SWOT	36
Tabel 2.4 Indeks, Dimensi, dan Indikator IDM	51
Tabel 2.5 Daftar Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1 Matriks SWOT	66
Tabel 4.1 Penduduk Waimi Tahun 2024.....	69
Tabel 4.2 Penduduk Waimi Menurut Pekerjaan Tahun 2024	69
Tabel 4.3 Lembaga Perekonomian di Desa.....	70
Tabel 4.1 Penduduk Waimi Tahun 2024.....	69

Tabel 4.7 Data Pemutahiran IDM Desa Waimi Tahun 2024	79
Tabel 4.8 Perhitungan Skor IDM Desa Waimi Tahun 2024	85
Tabel 5.1 Daftar Capaian Kinerja IDM Yang Masih Rendah	87
Tabel 5.2 Indikator-Indikator Urusan Lokal Desa	92
Tabel 5.3 Indikator-Indikator Urusan Supra Desa	95
Tabel 5.4 Analisis IFAS Terhadap Kinerja IDM Desa Waimi	107
Tabel 5.5 Analisis EFAS Kinerja IDM Desa Waimi	107
Tabel 5.6 Matriks SWOT	113
Tabel 5.7 Stategi Program/Kegiatan Dalam Mendukung Percepatan Capaian Kinerja IDM Desa Waimi	136



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Manajemen Strategik.....	21
Gambar 2.2 Diagram Analisis SWOT	34
Gambar 2.3 Rumus IDM.....	49
Gambar 2.4 Rumus Skoring Indikator IDM	50
Gambar 2.5 Rumus Skoring Indikator IDM	50
Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian	57
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Waimi	71
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi BPD Waimi.....	72
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi LKD-RT/RW	74
Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Posyandu.....	78
Gambar 5.1 Diagram Analisis SWOT Terhadap Kinerja 29 Indikator IDM Desa Waimi	110
Gambar 5.2 Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Berkembang	118
Gambar 5.3 Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Maju.....	122
Gambar 5.4 Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Maju.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. *Quotes* ini seakan mewakili semua aspek kehidupan yang terus bertumbuh seiring perkembangan jaman. Begitu juga dalam aspek tata kelola pembangunan Desa di Indonesia. Sistem tata kelola pembangunan Desa terus beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, adaptasi akan perubahan itu kemudian diwujudkan dengan perubahan kebijakan dan peraturan yang akan menjadi pengatur dan pedoman bagi organisasi pemerintahan Desa dalam menjalankan aktifitas pelayanan publik.

Akhir tahun 2014 silam merupakan era baru bagi Desa-Desa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menjadi awal baru bagi Desa-desa, pengakuan dan memperkuat kewenangan Desa. Desa-desa diberikan ruang yang cukup untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan pembangunan, khususnya pelayanan pembangunan yang efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan oleh Desa di aras lokal berskala Desa. Untuk melaksanakan itu (kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), tidak sedikit anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan (Kementerian Keuangan, 2023), dapat dilihat bahwa tren kenaikan dana desa setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
Tahun 2015 – Tahun 2024

No	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa (Triliun Rp)	Jumlah Desa Penerima	Rata-Rata Alokasi Per Desa (Juta Rp/Desa)
1	2015	20,7	74.093	280,3
2	2016	46,98	74.754	643,6
3	2017	60	74.954	800,4
4	2018	60	74.958	800,4
5	2019	70	74.953	939,9
6	2020	71,1	74.954	949,78
7	2021	72	74.961	960,5
8	2022	68	74.960	907,13
9	2023	70	74.954	933,9
10	2024	71		

Sumber : Data Kementerian Desa diolah

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan Desa untuk membiayai program dan kegiatan seturut dengan kewenangan yang ada. Kesempatan sekaligus tantangan bagi Desa-desa, sebab baru kali ini dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia, lewat UU Desa, Desa-desa dipercaya dan diberikan anggaran yang besar guna mengatur dan mengurus pelayanan publik di tingkat Desa.

Apalagi dengan penekanan pada metode pelaksanaan secara swakelola dengan mengedepankan partisipasi masyarakat Desa dalam

setiap tahapan pembangunan Desa (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Jika tidak hati-hati dalam pelaksanaannya, bukan tidak mungkin Desa-desa gagal mengemban cita-cita UU Desa dan sebaliknya sangat berpotensi terjerembab dalam persoalan-persoalan bahkan harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

UU Desa tidak hanya memberikan kewenangan tanpa arah, melainkan Desa-desa di tuntut untuk dapat mencapai target-target kinerja pelayanan publik aras lokal berskala Desa yang sudah ditentukan sesuai rumuskan arah kebijakan pembangunan Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (pasal 78 UU Desa). Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa bukanlah hal yang mudah. Dalam konteks UU Desa, peta jalan menuju kesana disebutkan, seperti tertuang dalam landasan UU Desa bahwa yang menjadi dasar terbitnya UU Desa adalah dengan maksud melindungi dan memberdayakan Desa-desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (konsideran UU Desa).

Kemajuan dan kemandirian Desa merupakan jalan atau landasan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, upaya-upaya serius untuk memastikan bahwa Desa-desa terus bergerak menuju kearah kemajuan dan kemandirian perlu dikawal dan dipastikan keberlanjutannya. Status kemajuan Desa menjadi konsep yang penting untuk dirumuskan secara baik, di ukur dan terus dievaluasi secara berkala. Karena status kemajuan Desa merupakan jalan menuju kesejahteraan masyarakat Desa.

Sistematika dan ladasan berpikir ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan instrument resmi yang dipakai untuk mengukur status kemajuan Desa. Jadi, upaya-upaya untuk menjadikan Desa-desa maju dan mandiri adalah peta jalan pembangunan Desa yang harus terus ditapaki, diukur dan dievaluasi secara berkala demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.

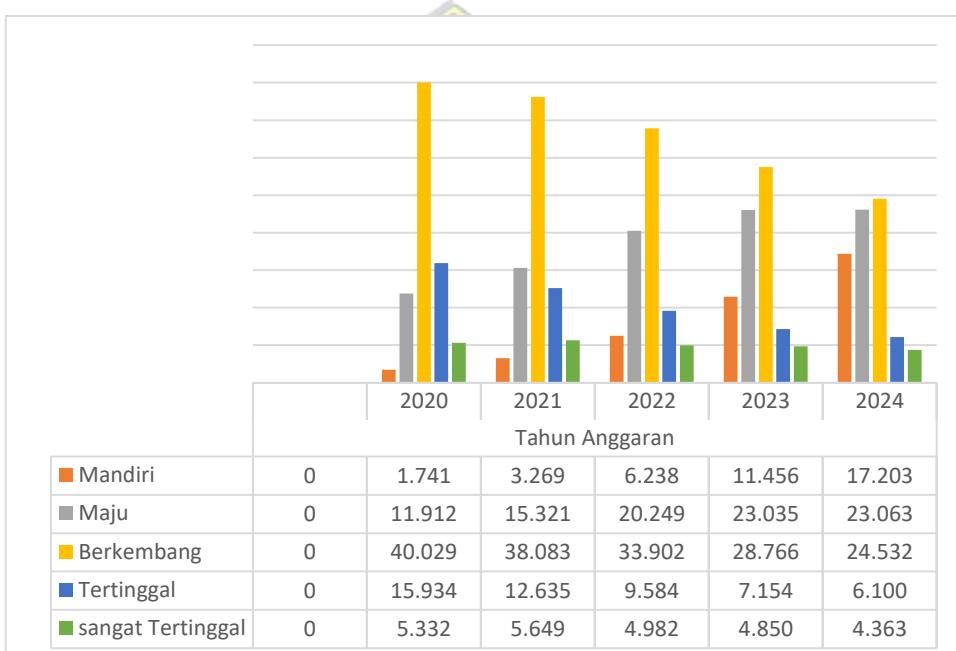
Pelaksanaan pendataan IDM merupakan tahapan wajib yang dilakukan sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Dalam Permendes 2 Tahun 2016 tentang IDM disebutkan bahwa tujuan penyusunan IDM yaitu (pasal 2), selain untuk mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa, tujuan IDM juga untuk menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Status kemajuan Desa berdarkan IDM akan memetakan Desa-desa kedalam lima (5) Kategori Desa, mulai dari yang paling rendah; Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; Desa Mandiri. Desa Mandiri merupakan target puncak dari kerja-kerja pembangunan Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016, 2016). Oleh karena itu, pengetahuan Desa dan pihak-pihak yang terkait dengan kerja-kerja pembangunan Desa menjadi komitmen dasar untuk menyusun langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi kinerja menaikan status kemajuan Desa.

Sejak dilakukan pengukuran terhadap status kemajuan Desa berbasis IDM di tahun 2016 hingga tahun 2024, status kemajuan Desa sangat bervasiasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2 (Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian D, 2020), (Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan No 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, 2021), (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022, 2022), (Keputusan Menteri Desa, PDT,

Dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa 2023, 2023), (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2024, 2024).

Tabel 1.2
Kinerja IDM Tingkat Nasional T.A 2020-2024



Sumber : Kementerian Desa diolah

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa kateori Desa maju mengalami lompatan kenaikan yang sangat signifikan. Dari semula 1.741 Desa di tahun 2020 menjadi 17.203 di tahun 2024. Mengalami pertumbuhan hingga 888%. Begitu juga dengan kategori Desa Maju, jika dihitung berdasar tahun 2020 ke tahun 2024, maka mengalami mengalami kenaikan sebesar 94%. Sebaliknya, kategori Desa berkembang mengalami

penurunan dari tahun 2020 ke 2024 sebesar 39%. Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 62%. Desa sangat tertinggal mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 18%.

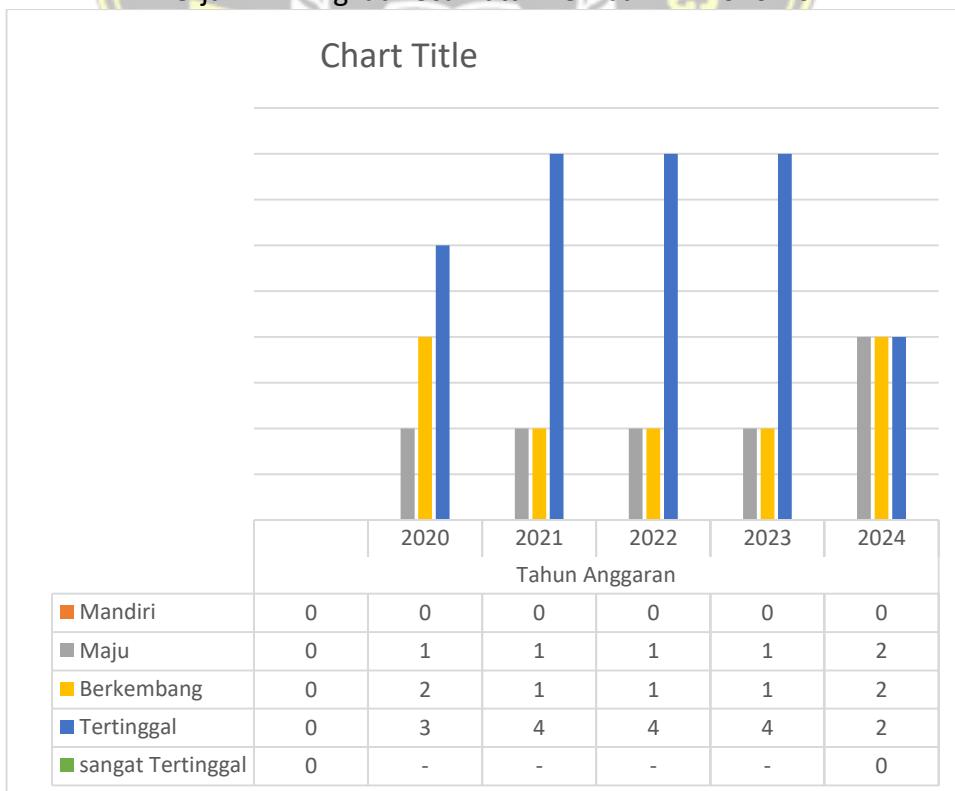
Potret status kemajuan dan kemandirian Desa diatas tentunya menjadi gambaran akan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa di Desa masing-masing. Upaya-upaya pengentasan Desa-desa tertinggal dan meningkatkan Desa-desa mandiri menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah secara berjenjang, khususnya Pemerintah Desa sebagai garda terdepan eksekutor program ditingkat lapangan. Sehingga target-target rencana pembangunan nasional dapat terwujud. Strategi-strategi kebijakan yang tepat dalam rangka percepatan status kemajuan Desa sangat dibutukan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Desa yang akan diangkat sebagai objek kajian pada penelitian ini. Yaitu di Desa Waimi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Status kemajuan Desa-desa yang ada di kecamatan Lembur juga bervariasi. Ada Desa yang sudah berhasil menaikkan status kemajuan Desanya ada yang belum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3 dan 1.4 dibawah ini (Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian D, 2020), (Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan No 398.4.1 Tahun

2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, 2021), (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022, 2022), (Keputusan Menteri Desa, PDT, Dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa 2023, 2023), (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2024, 2024).

Tabel 1.3.

Kinerja IDM Tingkat Kecamatan Lembur T.A 2020-2024



Tabel 1.4.
Kinerja IDM Tingkat Kecamatan Lembur Berdasar Nama Desa
T.A 2020-2024

Tahun Anggaran	Status Desa				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2020	-	1. Lembur Timur	1. Tulleng 2. Luba	1. Waimi 2. Tasi 3. Talwai	-
2021	-	1. Lembur Timur	1. Tulleng	1. Waimi 2. Tasi 3. Talwai 4. Luba	-
2022	-	1. Lembur Timur	1. Tulleng	1. Waimi 2. Tasi 3. Talwai 4. Luba	-
2023	-	1. Lembur Timur	1. Tulleng	1. Waimi 2. Tasi 3. Talwai 4. Luba	-
2024	-	1. Lembur Timur 2. Tulleng	1. Luba 2. Talwai	1. Waimi 2. Tasi	-

Sumber : Kementerian Desa diolah

Pada tabel 1.3 dan 1.4 terlihat bahwa perjalanan status kemajuan dan kemandirian Desa berbasis kinerja IDM tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup bervariasi. Ada beberapa desa yang mampu menaikkan status kemajuan Desa, dan ada juga beberapa Desa yang belum berhasil. Paling tidak sampai dengan posisi tahun 2024.

Di tahun 2020 Desa Lembur Timur (ibu kota Kecamatan Lembur) merupakan Desa dengan status kemajuan Desa paling tinggi dengan

kategori Desa Maju. Dari segi jumlah dapat dikatakan bahwa ada 3 (tiga) desa berstatus tertinggal, 2 Desa berkembang, dan 1 Desa berstatus maju.

Ditahun 2021 status kemajuan Desa tidak jauh berubah dari tahun sebelumnya, hanya Desa Luba yang semula di posisi Desa berkembang bersama Desa Tulleng berubah status menjadi Desa Tertinggal. sehingga untuk status kemajuan Desa di Tahun 2021 Sampai dengan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. 1 (satu) Desa maju (Lembur Timur), 1 (satu) Desa Berkembang (Desa Tulleng), dan sisanya 4 (empat) Desa Teringgal.

Semenjak 3 (tiga) tahun tidak mengalami perubahan, di tahun 2024 status kemajuan Desa di Kecamatan Lembur sedikit mengalami perubahan. Status Desa Maju bertambah menjadi 2 (dua) Desa. Desa Tulleng yang semula berada di status Desa berkembang naik status menjadi Desa Maju. Begitu juga Desa Tertinggal yang semula 4 (empat) Desa berkurang menjadi 2 (dua) Desa saja. Desa Luba dan Desa Talwai naik status menjadi Desa Berkembang.

Dari dinamika status kemajuan Desa di Kecamatan Lembur dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terlihat bahwa ada tiga (3) Desa dengan status kemajuan Desanya tidak mengalami perubahan (Desa Lembur Timur, Desa Tasi, dan Desa Waimi). Juga terlihat bahwa butuh waktu tiga (3) tahun bagi tiga (3) Desa lainnya untuk menaikan status Desa satu (1) level ke atas (Desa Tulleng, Desa Luba, Desa Talwai).

Fenomena stagnasi status kemajuan Desa untuk 3 (tiga) Desa tersebut diatas menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Apa yang menjadi penyebab sehingga Desa-desa tersebut tidak mengalami perubahan status kemajuan Desa. Apakah program pembangunan dengan dukungan Dana Desa yang bersumber dari APBN selama 5 tahun terakhir kurang berdampak terhadap status kemajuan Desa. Ataukah ada faktor-faktor lain, baik internal dan eksternal yang menyebabkan sehingga Desa-desa tersebut tidak atau kurang cepat mengalami kenaikan status kemajuan Desa.

Merujuk pada arah kebijakan pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama ini, seharusnya Dana Desa sangat potensial sebagai instrumen dalam rangka percepatan peningkatan status kemajuan Desa. Tambunan ketika melakukan penelitian dampak Dana Desa terhadap IDM di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (Tambunan et al., 2020).

Juga ada penelitian yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur oleh Affandi dan Artika menyatakan bahwa penyerapan Dana Desa dan kecepatan penyaluran Dana Desa mulai berpengaruh signifikan pada IDM setelah dua dan tiga tahun Dana Desa di salurkan. Hal ini dapat dipahami bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa baru dirasakan pengaruhnya bagi pembangunan Desa setelah dua tahun kemudian (Artika, 2023).

Ada juga penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa (Iftitah & Wibowo, 2022) tentang pengaruh dana desa terhadap IDM. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk belanja penyetoran modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa sangat potensial sebagai instrument peningkatan kinerja IDM demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai gambaran dapat dilihat besaran Dana Desa di Kecamatan Lembur sejak Tahun 2020 hingga tahun 2025 pada tabel dibawah ini (Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2021), (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2022), (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, 2023).

Tabel 1.5
Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBN

No	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa Kecamatan Lembur Timur					
		Luba	Lembur Timur	Tulleng	Tasi	Waimi	Talwai
1	2022	957.519.000	990.280.000	796.771.000	825.034.000	933.178.000	972.021.000
2	2023	833.284.000	923.136.000	713.850.000	638.534.000	665.013.000	874.790.000
3	2024	828.883.000	872.843.000	720.359.000	739.013.000	670.794.000	869.645.000

Sumber : Kementerian Keuangan di olah

Tentunya dibutuhkan sejumlah variabel yang menjadi syarat dan harus dimiliki oleh Desa-desa yang berfungsi sebagai pendukung sehingga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja IDM. Pemanfaatan Dana Desa khususnya sebagai salah satu instrument penting. Fenomena status kemajuan Desa di Kecamatan Lembur, khususnya terkait capaian kinerja IDM di Desa Waimi menunjukkan bahwa ada hal-hal yang masih menjadi kendala, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang berdampak terhadap kinerja IDM.

Disisi lain, kondisi dan keberadaan Desa-desa yang beragam dan bervariasi, baik dari aspek jumlah penduduk, kualitas SDM, Topografi, dan keterbukaan akses, juga pasti berpengaruh terhadap akselerasi Desa dalam capaian kinerja IDM. Oleh karena itu, sejauh mana kondisi-kondisi itu berpengaruh terhadap kinerja IDM merupakan sebuah persoalan tersendiri.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan situasi prolematik diatas perlu di teliti dan dianalisa lebih menyeluruh dan dalam. Kondisi inilah yang membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan. Mencari penyebab dari situasi problematika kinerja IDM yang masih rendah dan sekaligus menyusun strategi yang terstruktur, sistimatis dan menyeluruh terhadap capaian kinerja IDM di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan semua itu, maka dirasa perlu melakukan penelitian mendalam bagaimana startegi yang tepat meningkatkan kinerja IDM Desa Waimi Kabupaten Alor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja IDM Desa Waimi ?
2. Bagaimana kondisi SWOT saat ini yang dihadapi Desa Waimi Kabupaten Alor ?
3. Bagaimana strategi peningkatan kinerja IDM Desa Waimi Kabupaten Alor ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk menyederhanakan penelitian agar sesuai dengan tujuan serta menghindari penyimpangan dari ruang penelitian. Batasan masalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal : sistem tata kelola pembangunan Desa dalam mendukung capaian kinerja IDM seperti, kinerja pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa.
2. Faktor Eksternal : dukungan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten, serta Pendamping Desa dalam meningkatkan kinerja IDM.

3. Penyelesaian Masalah sesuai data yang diteliti dari Desa Waimi.
4. Alat analisis menggunakan metode SWOT.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah bagi Desa Waimi :

1. Untuk mengetahui kinerja IDM Desa Waimi.
2. Mengetahui dan merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kinerja IDM Desa Waimi.
3. Menyusun strategi peningkatan kinerja IDM berbasis analisis SWOT yang tepat dan efektif bagi Desa Waimi.

Dunia Akademis

1. Menambah wawasan kinerja IDM di Kabupaten Alor
2. Memberi konsep baru kinerja IDM di Kabupaten Alor

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Sebagai masukan bagi Desa Waimi agar mampu melakukan evaluasi dan mengenali lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja IDM sekarang maupun yang akan datang.
2. Sebagai masukan bagi Desa Waimi terkait penyusunan strategi peningkatan kinerja IDM demi peningkatan status kemajuan Desa.

3. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.3. Manajemen Stratejik

2.1.1. Pengertian Manajemen Strategik

Manajemen Stratejik merupakan sebuah konsep dalam ilmu manajemen yang memiliki definisi yang cukup luas dan mendalam. Secara sederhana, manajemen stratejik dapat dipahami dari dua suku kata yang membentuk konsep ini yaitu “manajemen” dan “strategik”.

Menurut Samsudin dalam (Fachrurazi dkk, 2022), secara etimologis istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti ”tangan”, dalam bahasa italia maneggiare berarti “mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.

Secara terminologis, ada banyak pandangan para ahli terkait konsep manajemen. Menurut Robbin dan Coulter dalam (Krisnandi dkk, 2019), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain. Menurut Terry dalam (Fachrurazi dkk, 2022) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata. Hal tersebut

meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha yang telah dilakukan.

Menurut Mary Parker Follett di dalam buku Hani Handoko (Krisnandi dkk, 2019) disebutkan bahwa management *is the art of getting thing done through people*. Artinya, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan. Lebih lanjut Terry dalam (Krisnandi dkk, 2019) mengartikan manajemen sebagai serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.

Senada dengan Terry, menurut Stoner (Krisnandi dkk, 2019) menyebutkan bahwa manajemen ialah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan.

Berdasarkan pandangan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebagai sebuah kerangka kerja dengan sistem koordinasi yang terstruktur dan sistimatis, meliputi tahapan perencanaan,

pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian, sehingga memampukan sebuah organisasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi.

Secara etimologis kata strategik atau strategi berasal dari bahasa Yunani yakni “*strategos*”(stratos = militer dan ag=memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi ini disampaikan oleh Clauswitz (Anwar, 2020). Jadi intilah strategi pertama kali dipakai dalam dunia militer dan digunakan dalam rangka memenangkan peperangan.

Secara terminologi kata strategik banyak didefinisikan oleh para ahli. Menurut George Steiner (Anwar, 2020) strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Mintzberg strategi dapat digunakan dalam berbagai cara atau situasi “(1) Strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there, (2) Strategy is a pattern in actions over time, (3) Strategy is position: that is, reflects decisions to offer particular products or services in: particular markets, (4) Strategy is perspective, that is, vision and direction” (Anwar, 2020)

Sementara itu, Aaker (2001) memberikan pengertian tentang manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi,

dan

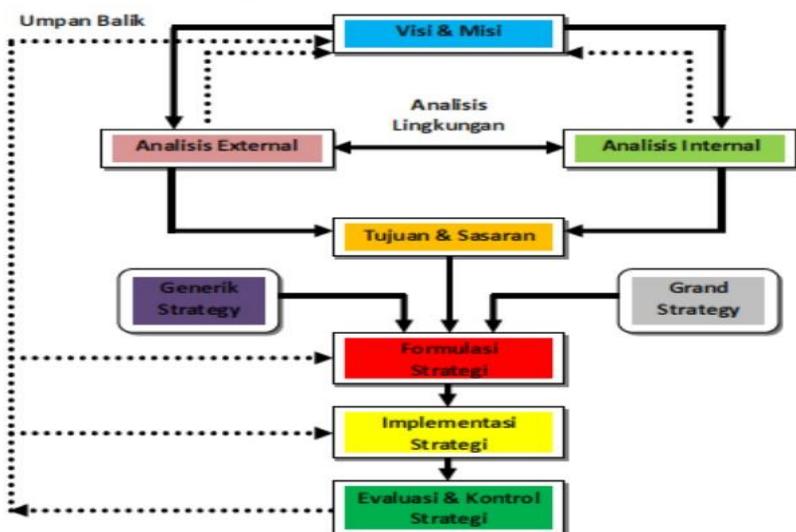
mengelakuan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi (Suardhika, 2018).

Lebih lanjut suardika mengatakan bahwa manajemen strategic dapat dipahami sebagai suatu rangkaian pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan terintegrasi dalam aktivitas organisasi yang disertai dengan tindakan manajerial untuk pelaksanaan dan pengendaliannya. Menurut suardika manajemen strategic pada umumnya disusun dan dirancang oleh jajaran manajemen puncak, dan nantinya diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Husein umar mengatakan bahwa tujuan dari manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk besok (Husein, 2020)

2.1.2. Prinsip dan Aspek-aspek Manajemen Stratejik

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen strategic adalah sebuah pengelolaan urusan yang dirancang secara khusus dan terukur untuk mencapai sebuah tujuan. Ada sejumlah komponen atau aspek yang saling terkait dalam sebuah sistem kerja sama. Dengan jelas Pearce dan Robinson (1997) menggambarkan aspek-aspek dalam model manajemen strategic (Suardhika, 2018)

Gambar 2.1
Model Manajemen Stategik



Sumber : Pearce dan Robinson dalam Suardika (2018)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ada rangkaian komponen atau aspek-aspek terstruktur dalam sebuah sistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara bersama-sama kearah tujuan yang sama. Aspek-aspek itu, antara lain : visi, misi, analisa lingkungan organisasi, tujuan, strategi utama organisasi, formulasi strategi, implementasi, kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Beberapa aspek penting manajemen stratejik yang harus diperhatikan sebagai berikut (Suardhika, 2018) :

1. Visi dan Misi. Visi adalah cita-cita dimasa depan yang hendak diwujudkan oleh sebuah organisasi. misi adalah hal-hal yang akan dikerjakan agar supaya visi dapat diwujudkan (Riyanto et al., 2021).

2. Analisis lingungan Bisnis. Lingkungan bisnis adalah suatu arus, kondisi, keadaan, peristiwa, yang terkait. Lingkungan internal (analisis kekuatan dan kelemahan) dimana organisasi memiliki kendali atasnya dan lingkungan eksternal (analisis peluang dan ancaman) dimana organisasi tidak memiliki kendali atasnya.
3. Forumulasi Strategi. Strategi korporat adalah pilihan-pilihan dalam membentuk portofolio yang paling menguntungkan bagi organisasi. Pertimbangan analisis SWOT dipakai menjadi acuan penyusunan strategi.

Lebih lanjut beberapa aspek penting manajemen stratejik yang harus diperhatikan sebagai berikut (Nababan, 2009).

1. Perumusan strategi (*strategy formulation*) yang mencerminkan adanya tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam bentuk misi organisasi
2. Implementasi strategi (*strategy implementation*) yang menggambarkan bagaimana cara untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi
3. Evaluasi strategi (*strategy evaluation*) yang menunjukkan adanya pengukuran, evaluasi dan umpan balik kinerja
4. Implementasi fungsi-fungsi manajemen

2.3. Analisis SWOT

2.2.1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument atau aspek penting dalam manajemen strategik. Dengan analisis SWOT memungkinkan

adanya proses analisis dan evaluasi terhadap lingkungan organisasi atau lembaga bersangkutan. Adapun pemahaman yang utuh terkait kondisi organisasi dan menjadi acuan bagi organisasi dalam mengambil langkah-langkah kebijakan strategis kedepan yang lebih baik.

Muhadjir Anwar mengatakan bahwa analisa SWOT merupakan kajian sistematis terhadap faktor-faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal perusahaan dengan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan yang dihadapi perusahaan sehingga menjadi sarana bantu bagi perencana strategi guna memformulasikan dan mengimplementasi strategi-strategi untuk mencapai tujuan (Anwar, 2020).

Rangkuty (2006) menjelaskan bahwa analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) (Wiswasta et al., 2018). Lebih lanjut Wiswasta mengatakan bahwa analisis SWOT akan lebih baik jika dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek (Wiswasta et al., 2018).

Menurut Budiman (2018) secara umum analisis SWOT dipakai untuk (Wiswasta et al., 2018) :

1. Menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi

2. Menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga
3. Menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan
4. Mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita
5. Mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga lembaga lain
6. Mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya.

Menilai lingkungan organisasi secara menyeluruh, baik lingungan internal maupun lingkungan eksternal akan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Anwar, beberapa contoh tujuan analisis lingkungan bagi perusahaan adalah (Anwar, 2020) :

1. Untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan
2. Untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi.

Menurut Certo (2010) secara umum ada tiga peran utama dari analisis lingkungan bagi perusahaan (Anwar, 2020) :

1. Policy-Oriented Role. Yaitu peran analisis yang berorientasi pada kepada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi

manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan.

2. Integrated Strategic Planning Role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan.
3. Function Oriented Role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan infomasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu.

Jadi analisis SWOT adalah merupakan teknik analisis untuk mengenali secara baik, tepat dan menyeluruh lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Berdasarkan analisis terhadap lingkungan ini memampukan lembaga untuk menyusun langkah-langkah strategis guna menentukan visi dan misi organisasi, penetapan tujuan dan sasaran, serta penetapan formulasi strategi dan implementasinya.

2.2.2. Faktor-Faktor Dalam Analisis SWOT

Dari berbagai pendapat yang disebutkan diatas bahwa untuk melakukan analisis lingkungan organisasi maka perlu mengenali secara baik 4 (empat) faktor penting sebagai pilar dalam analisis SWOT. Faktor-faktor itu antara lain :

1. Strengths (Kekuatan). Merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi

yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini maupun yang akan datang (Wiswasta et al., 2018). Beberapa contoh kekuatan dalam lingkungan internal organisasi adalah (Riyanto et al., 2021) :

- a. Sumber daya Keuangan
- b. Sumber daya Produksi
- c. Sumber daya manusia, baik sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin, tenaga usahawan.
- d. Sumber daya lainnya. Sumber daya lain yang ada dalam organisasi dapat berupa peraturan, nilai, norma, budaya organisasi.

Pada konteks penelitian ini, yang menjadi potensi-potensi kekuatan adalah berkaitan dengan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh Desa dalam kaitannya dengan kinerja pembangunan Desa untuk menaikkan status kemajuan dan kemandirian berbasis IDM.

2. Weaknesses (Kelemahan) Merupakan situasi atau kondisi kelemahan yang terdapat dalam suatu institusi, individu, masyarakat atau sebuah organisasi. Faktor ini masih berasal dari internal mereka sendiri. Kelemahan bisa terkait dengan kondisi kekurangan yang dimiliki oleh organisasi menyangkut sumber daya-sumberdaya internal yang meliputi berbagai hambatan, kendala, masalah, pengalaman buruk, kegagalan, konflik, kekurangan, dan hal lainnya yang bersifat dari dalam diri organisasi.
3. Opportunities (Peluang) Merupakan situasi dan kondisi eksternal organisasi menyangkut lingkungan umum (general environment),

terdiri dari social-ekonomi; teknologi; Pemerintah (Anwar, 2020). Jadi peluang merupakan sumber daya eksternal yang terkait dan dapat dimanfaatkan, diandalkan oleh organisasi untuk mendukung perkembang dan kemajuan organisasi di masa mendatang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang yang ada di luar suatu institusi, individu, masyarakat atau sebuah perusahaan yang bersangkutan. Peluang tersebut bila diambil atau dimanfaatkan dapat membantu, memperkuat, mendorong, meningkatkan, mengembangkan dan memberikan dampak positif pada suatu institusi, individu, masyarakat atau perusahaan yang bersangkutan.

4. Threats (Ancaman). Merupakan situasi atau kondisi lingkungan eksternal organisasi yang dapat mengancam kinerja organisasi dari luar. Hal ini terkait dengan hal-hal luar yang dapat memberikan dampak negative yang merugikan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk menemukan kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (weakness) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal adalah untuk menemukan peluang (*opportunity*) yang berguna bagi organisasi dan ancaman (*treath*) yang mungkin akan dialami oleh sebuah organisasi.

2.3. Langkah-Langkah Analisis SWOT

Untuk mengetahui secara baik dan komprehensif kondisi dari sebuah organisasi berbasis analisis SWOT maka perlu diuraikan tahapan demi tahapan analisis yang harus dilewati.

2.3.1. Identifikasi dan Pengelompokan Faktor Internal dan eksternal

Analisis elemen/indikator dari masing-masing faktor lingkungan organisasi merupakan tahapan awal untuk menuju analisis lebih lanjut. Untuk menemukan kenali indikator-indikator yang tepat, Slamet dkk (Riyanto et al., 2021) mengatakan bahwa terlebih dahulu harus dipahami visi, misi dan tujuan organisasi yang akan dianalisis secara SWOT. Hal ini penting agar analisis SWOT yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah melakukan analisis secara mandiri terhadap objek yang dianalisis. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek dan melakukan identifikasi indikator-indikator sebagai faktor lingkungan organisasi. Untuk mengurangi kemungkinan kelemahan analisis peneliti, maka akan dilakukan juga konfirmasi kepada pihak-pihak terkait berkaitan dengan temuan yang diperoleh.

Adapun temuan indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi kemudian dikelompokkan kedalam faktor internal dan eksternal organisasi. Setelah itu, faktor internal diidentifikasi dan dikelompokkan lagi kedalam faktor kekuatan dan kelemahan. Begitu juga

terhadap faktor eksternal, diidentifikasi indikator-indikator yang dikategorikan dalam faktor peluang dan ancaman.

Hasil identifikasi dan pengelompokan faktor dan indikator ini kemudian disajikan dalam bentuk uraian daftar atau list indikator internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, dan list indikator eksternal terkait dengan peluang dan ancaman yang ada.

Tabel 2.1
Penyajian Data Identifikasi dan Pengelompokan
Faktor Internal dan Eksternal

1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1)...
2)..
3)dst
b. kelemahan
1)...
2)..
3)dst
2. Faktor Eksternal
a. Peluang
1)...
2)..
3)dst
b. Ancaman
1)...
2)..
3)dst

2.3.2. Analisis IFAS dan EFAS

Setelah identifikasi dan pengelompokan indikator-indikator dari faktor-faktor yang ada, maka dibutuhkan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS). IFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi organisasi dan seberapa baik

kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. IFAS membantu organisasi mengorganisir faktor-faktor strategis internal kedalam kategori. Sedangkan EFAS membantu organisasi mengorganisir faktor-faktor eksternal (Riyanto et al., 2021).

Oleh karena itu, untuk mengukur indikator analisis SWOT dibutuhkan tabel IFAS dan EFAS. Adapun tabel IFAS dan EFAS memiliki empat kolom, kolom pertama berisi item-item baik faktor internal dan eksternal. Kolom kedua berisi bobot. Kolom ketiga berisi rating dan keempat berisi informasi tentang nilai. Nilai diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan rating (Riyanto et al., 2021).

Kolom bobot menunjukkan seberapa penting faktor lingkungan internal bagi organisasi. Angka bobot berkisar dari 0,0 (sangat tidak penting) sampai dengan kurang dari 1 (sangat penting). Semua bobot harus berjumlah 1,0 tanpa mempedulikan jumlah item faktor. Kolom rating menunjukkan seberapa baik (untuk faktor kekuatan) atau seberapa lemah (untuk faktor kelemahan) sumber daya yang selama ini dimiliki mampu dikelola (Riyanto et al., 2021).

Penentuan nilai bobot dan rating yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdasarkan estimasi peneliti berdasarkan indikator-indikator IDM yang ada dan tentunya dengan juga meminta konformasi pada pihak-pihak terkait di Desa yang menjadi objek penelitian.

Tabel 2.2
Penyajian Data IFAS dan EFAS

No	Strength	Bobot	Rating	Scor
1				
2				
	Total Kekuatan			
No	Weakness	Bobot	Rating	Scor
1				
2				
	Total Kelemahan			
Selisih total kekuatan-total kelemahan=S-W=X				

No	Opportunity	Bobot	Rating	Scor
1				
2				
	Total Peluang			
No	Treath	Bobot	Rating	Scor
1				
2				
	Total Ancaman			
Selisih total peluang-total ancaman=O-T=Y				

2.3.3. Analisis Diagram SWOT

Setelah nilai IFAS dan EFAS diketahui maka langkah selanjutnya adalah menggambar diagram SWOT. Dalam diagram SWOT terdapat empat kuadran yang menunjukkan posisi serta kondisi organisasi berdasarkan perhitungan nilai IFAS dan EFAS. Berikut arti dari setiap kuadran dalam analisis SWOT (Riyanto et al., 2021).

1. Kuadran I. Pada kuadran I memiliki arti bahwa:
 - a. Memiliki titik koordinat X,Y dengan nilai (positif, positif)
 - b. Menunjukkan bahwa organisasi memiliki posisi yang kuat dan memiliki banyak peluang.
 - c. Organisasi direkomendasikan menerapkan strategi progresif atau growth yang artinya organisasi dalam posisi yang prima dan mantap, sehingga dimungkinkan untuk terus menjalankan, berkembang, melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan untuk meraih kemajuan secara maksimal.
2. Kuadran II. Pada kuadran II memiliki arti bahwa:
 - a. Memiliki titik koordinat X,Y dengan nilai (positif,negatif)
 - b. Organisasi memiliki posisi yang kuat akan tetapi menghadapi tantangan yang besar.
 - c. Organisasi direkomendasikan untuk melakukan strategi diversifikasi, hal ini dikarenakan bahwa organisasi memiliki posisi atau situasi yang mantap namun juga menghadapi sejumlah tantangan berat.

d. Organisasi diharapkan mampu menerapkan berbagai strategi atau taktik untuk menghadapi tantangan yang berat, sehingga banyaknya variasi strategi dapat mengantisipasi ancaman atau tantangan yang dihadapi organisasi.

3. Kuadran III. Pada kuadran III memiliki arti bahwa:

- a. Memiliki titik koordinat X,Y dengan nilai (negatif, positif)
- b. Organisasi memiliki posisi yang lemah akan tetapi memiliki peluang yang besar.
- c. Organisasi direkomendasi menjalankan strategi *stability/turn around*/ubah taktik. Hal ini dikarenakan organisasi berada memiliki peluang untuk dapat bangkit serta menutupi kelemahan yang dimiliki.
- d. Organisasi diharapkan melakukan strategi *turn around* atau ubah taktik, dengan cara mengubah strategi sebelumnya dan menjalankan strategi baru untuk dapat menangkap kesempatan yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

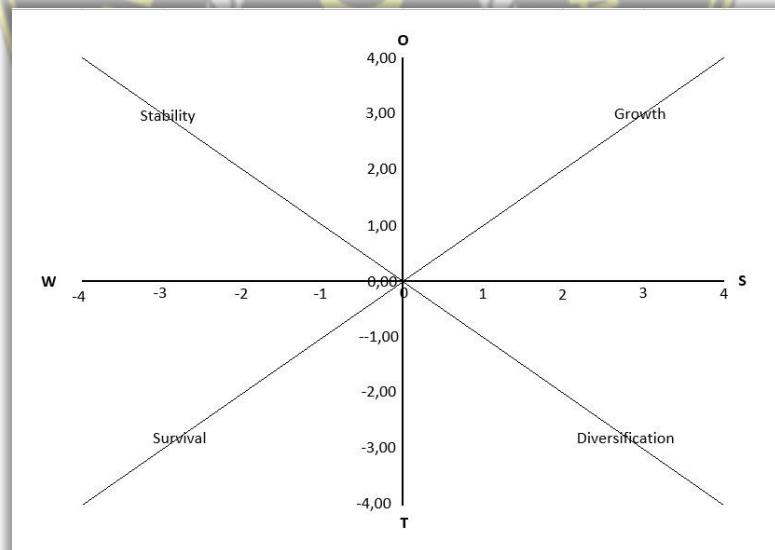
4. Kuadran IV. Pada kuadran IV memiliki arti bahwa:

- a. Memiliki titik koordinat X,Y dengan nilai (negatif, negatif)
- b. Organisasi memiliki posisi yang lemah dan memiliki ancaman atau tantangan yang besar.
- c. Organisasi direkomendasi menjalankan strategi survival/defensif/bertahan. Hal ini dikarenakan posisi organisasi terlalu dilematis dan memiliki banyak persoalan internal.

d. Organisasi diharapkan melakukan strategi bertahan untuk mengontrol kinerja internal agar tidak semakin memburuk. Strategi ini dipertahankan secara berkesinambungan serta organisasi melakukan perbaikan secara internal untuk mengurangi dampak negatif yang mengakibatkan kinerja organisasi memburuk.

Untuk menggambar diagram SWOT maka perlu diperhatikan posisi titik dan garis kartesius. Untuk sumbu X merupakan hasil perhitungan faktor internal (kekuatan-kelemahan). Untuk sumbu Y merupakan faktor eksternal (peluang-ancaman).

Gambar 2.2
Diagram Analisis SWOT



4.1.1. Analisis Matriks SWOT

Analisis matriks SWOT merupakan kelanjutan dari analisis situasi internal dan eksternal (IFAS dan EFAS) serta analisis diagram SWOT seperti sudah dijelaskan diatas. Menurut Rangkuty (1997) Matrik SWOT

adalah *tools* (alat) yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah bagaimana peluang dengan kekuatan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dengan menyesuaikan kekuatan dan kelemahannya. Maktriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Matriks ini dapat membantu dalam mengembangkan 4 jenis strategi yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT (Wiswasta et al., 2018).

Kombinasi faktor internal dan faktor eksternal dalam matriks SWOT dapat disimak dalam penjelasan berikut (Riyanto et al., 2021):

1. Strategi S-O. Strenght-Opportunities. Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini dipakai oleh organisasi yang dalam kondisi prima dan sangat baik.
2. Strategi W-O. Weakness-Opptunities. Strategi ini dgunakan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang dimiliki oleh organisasi.
3. Strategi S-T. Strenght-Threat. Strategi ini menggunakan kekuatan internal organisasi untuk mengurangi ancaman eksternal.
4. Strategi W-T. Weakness-Threat. Ini merupakan strategi defensif. Strategi ini diarahkan pada tindakan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman dari eksternal.

Tabel 2.3
Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strengths (S) Tentukan faktor kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan kelemahan faktor internal
Opportunities (O) Tentukan faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi Yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Tentukan faktor ancaman Eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : diadaptasi dari Rangkuti (2006) dalam (Wiswasta et al., 2018)

Dari tabel 2.1 diatas menampilkan delapan kotak. Dua kotak paling atas adalah faktor eksternal (peluang dan ancaman) sedangkan dua kotak di sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan tantangan). Empat kotak lainnya merupakan kotak pembahasan strategi yang muncul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Maktriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, manfaatkan peluang- peluang yang ada serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut diatas akan memperoleh

empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT.

2.4. Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya didalam pasal 18 UU Desa disebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan sebagaimana dalam point 3 tersebut diatas meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka menjalankan kewenangan yang ditugaskan itu, setiap tahunnya Pemerintah mengalokasi Dana Desa yang lumayan besar bagi setiap Desa-desa di Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Dana Desa yang dialokasikan bagi Desa-desa di Indonesia terus mengalami kenaikan.

Dalam pengelolaan pembangunan desa tentunya membutuhkan sistem tata kelola sebagai dasar sekaligus pedoman dan penuntun sehingga setiap fungsi-fungsi yang ada dalam desa dapat berperan menjalankan tugasnya masing-masing dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang saling kait-mengait demi terwujudnya tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

2.4.1. Elemen-Elemen dalam Tata Kelola Pembangunan Desa

Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dia atur dan diurus oleh pemerintahan desa dengan dukungan berbagai elemen-elemen lainnya di tingkat desa. Elemen-elemen penting dalam tata kelola pembangunan desa dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

1. Musyawarah Desa. Menurut UU Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa (pasal 54) bahwa hal-hal yang bersifat strategis yang wajib di bahas dalam forum Musdes adalah 1. penataan Desa; 2. perencanaan Desa; 3) kerja sama Desa; 4) rencana investasi yang masuk ke Desa; 5) pembentukan BUM Desa; 6) penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 7) kejadian luar biasa.

Forum Mudes merupakan forum representatif (karena dihadiri oleh seluruh perwakilan unsur kelembagaan dan masyarakat). Membahas, mendiskusikan, dan memutuskan hal-hal strategis terkait masa depan Desa. Begitu pentingnya keberadaan forum ini, maka tidak salah bahwa dalam konteks pengelolaan pembangunan khususnya, disebut sebagai lembaga atau elemen “tertinggi” di tingkat Desa

2. Pemerintah Desa. Seperti disebutkan dalam UU Desa (pasal 25) bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Desa dibantu

oleh perangkat Desa Desa terdiri atas : 1) Sekretariat Desa 2) Pelaksana Kewilayah; dan 3) Pelaksana Teknis.

Seperti disebutkan dalam pasal 1 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, 2015) bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayah.

Dalam pasal 62 (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) atau disingkat PP 43, sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2015) atau disingkat Permendagri 84.

Dalam pasal 63 PP 43 pelaksana kewilayah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayah. Jumlah

unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Dalam pasal 4 Permendagri 84 pelaksana kewilayah disebut sebagai kepala dusun atau sebutan lain.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 bahwa tugas pelakana kewilayahan merupakan perwujudan dari tugas Kepala Desa (terbatas pada wilayah dusun) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2015).

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2015)

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, 2015) bahwa unsur staf yang dimaksudkan disini adalah bertugas untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 UU Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) Menyatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 55 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), antara lain :

- Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam rangka menjalankan tiga (3) fungsi BPD diatas ada sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh BPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016), antara

lain : 1) menggali aspirasi masyarakat; 2) menampung aspirasi masyarakat; 3) mengelola aspirasi masyarakat; 4) menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) menyelenggarakan musyawarah BPD; 6) menyelenggarakan musyawarah Desa; 7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 94 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya.

Lebih lanjut masih di pasal yang sama (94), LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan

masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Sesuai Pasal 6 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 2018), disebutkan bahwa jenis-jenis LKD di Desa adalah sebagai berikut :

- Rukun Tetangga;
- Rukun Warga;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Karang Taruna;
- Pos Pelayanan Terpadu;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat Desa lebih lanjut dapat membentuk LKD selain sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

2.4.2. Tahapan Pembangunan Desa

Pasal 78 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan pasal 79 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan kewenangan Desa. Adapun perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi jangka menengah dan perencanaan tahunan.
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun. RPJMDes. Dalam pasal 116 (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menyebutkan bahwa RPJMDes memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Arah kebijakan perencanaan Pembangunan Desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, pasal 25 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Trasnigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020).

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam pasal 79 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) disebutkan bahwa RKPDes merupakan dokumen penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 118 (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menyebutkan bahwa RKPDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Baik RPJMDes maupun RKPDes disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, pasal 114 (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).
- Dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes) disusun oleh Pemerintah Desa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, pasal 21 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasnigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020). Selanjutnya dokumen ini menjadi dasar implementasi program kegiatan serta anggaran yang disusun dalam

dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam pasal 81 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) disebutkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDes dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. Dalam pasal 121 (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) disebutkan bahwa Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan Desa dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkatan Tim Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Kegiatan, dan pada akhirnya wajib dilaporkan oleh Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Dalam pasal 82 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) disebutkan bahwa masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa serta berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Hasil pemantau itu dapat dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawarat Desa. Sama halnya dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa yang wajib disampaikan dan disepakati dalam forum Musdes. Masyarakat Desa juga dapat berpartisipasi dan menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa dalam forum Musdes.

2.5. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pada Tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Adapun tujuan umum IDM disusun adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016, 2016).

Secara khusus, IDM yang dihasilkan dapat digunakan :

1. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;

2. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
4. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

2.5.1. Indeks, Dimensi, Indikator, dan Metode Perhitungan IDM

Komponen IDM adalah IDM adalah 1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); 2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Ekologi (IKL) (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016, 2016). Jadi IDM adalah Indeks Komposit yang dihasilkan dari rata-rata IKS, IKE, dan IKL setiap desa. Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata IKS, IKE, dan IKL yang dihitung dengan rumus :

Gambar 2.3
Rumus IDM

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Keterangan :

IDM	=	Indeks Desa Membangun
IKL	=	Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
IKE	=	Indeks Ketahanan Ekonomi
IKS	=	Indeks Ketahanan Sosial

Sumber: Pasal 4, Permendes No 2 Tahun 2016

Setiap Indeks dibangun dari sejumlah dimensi dan sub dimensi, dan setiap dimensi disusun oleh sejumlah indicator penilaian. Setiap indikator memiliki skor 0 sampai dengan 5. Semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total skor indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 – 1.

Gambar 2.4
Rumus Skoring Indikator IDM

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
X = Indikator (X)

Sumber: Permendes No 2 Tahun 2016

Adapun masing-masing Indeks Ketahanan yang ada, IKS terdiri dari 4 (empat) dimensi, 14 (empat belas) sub-dimensi, dan 38 Indikator. IKE terdiri dari 1 (satu) dimensi, 6 (enam) sub-dimensi, dan 12 (dua belas) indikator. IKL terdiri dari 1 (satu) dimensi, 2 (dua) sub-dimensi, dan 4 (empat) indikator. Jadi kesimpulannya, dari 3 (tiga) aspek ketahanan yang merupakan komposit dari Instrumen IDM dibangun atau terdiri dari 6 (enam) dimensi, 22 (dua puluh dua) sub-dimensi, dan 54 (lima puluh empat) indikator. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.4
Indeks, Dimensi dan Indikator IDM

NO	INDEKS DESA MEMBANGUN	DIMENSI	INDIKATOR
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1 Pelayanan Kesehatan 2 Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan 3 Jaminan Kesehatan
		4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	5 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu 6 Tingkat aktivitas posyandu 7 Tingkat kepesertaan BPJS
		5 Akses Pendidikan Non Formal	8 Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM 9 Akses ke SMP/MTS < 6 km 10 Akses ke SMU/SMK < 6 km
	PENDIDIKAN	6 Akses ke Pengetahuan	11 Kegiatan pemberantasan buta aksara 12 kegiatan PAUD 13 Kegiatan PKBM/Paket ABC 14 Akses ke pusat keterampilan/kursus 15 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		7 Memiliki Solidaritas Sosial	16 Kebiasaan gotong royong didesa 17 Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar 18 Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga 19 Terdapat kelompok kegiatan olahraga 20 Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
	MODAL SOSIAL	8 Memiliki Toleransi	21 Warga desa sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda berkomunikasi 22 Terdapat keragaman agama di Desa
		9 Rasa Aman Penduduk	23 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan 24 Partisipasi warga mengadakan siskamling 25 Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa 26 Tingkat konflik yang terjadi di Desa 27 Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
10	Kesejahteraan Sosial		28 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa

			29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
			30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
PERMUKIMAN	11	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
	12	Akses ke Sanitasi	32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
	13	Akses ke Listrik	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
	14	Akses Informasi dan Komunikasi	34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
2 KETAHANAN EKONOMI	16	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
	17	Akses Distribusi/Logistik	37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
	18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	38	Terdapat akses internet
	19	Lembaga Ekonomi	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
	20	Keterbukaan Wilayah	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
			41	Terdapat sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
			42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
			43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
			45	Tersedianya BPR
			46	Akses penduduk ke kredit
			47	Tersedianya ekonomi rakyat (koperasi) lembaga
			48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
			49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
			50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
3 KETAHANAN EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
	22	Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	52	Terdapat sungai yg terkena limbah
			53	Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)

54	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
----	---

Sumber: Permendes No 2 Tahun 2016

2.5.2. Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016, 2016) :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut :

1. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya bahwa sudah ada beberapa peneliti yang melakukan kajian terkait dengan IDM, baik dengan pendekatan kajian empirik maupun case study. Beberapa hasil penelitian itu dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini .

Tabel 2.5
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Kesimpulan
1.	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara	Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, Een N. Walewangko	2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara 2. Secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara 3. Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
2.	Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal menjadi Desa Berkembang	Rizki Yunan Muhamram, Meidy Haviz	2022	<ul style="list-style-type: none"> 1. Strategi untuk meningkatkan indeks sosial dipicu dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial dan pemukiman keempat aspek tersebut berperan penting dalam peningkatan indeks social 2. aspek kesehatan dan pendidikan masih kurang berkontribusi untuk dapat meningkatkan indek sosial, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia

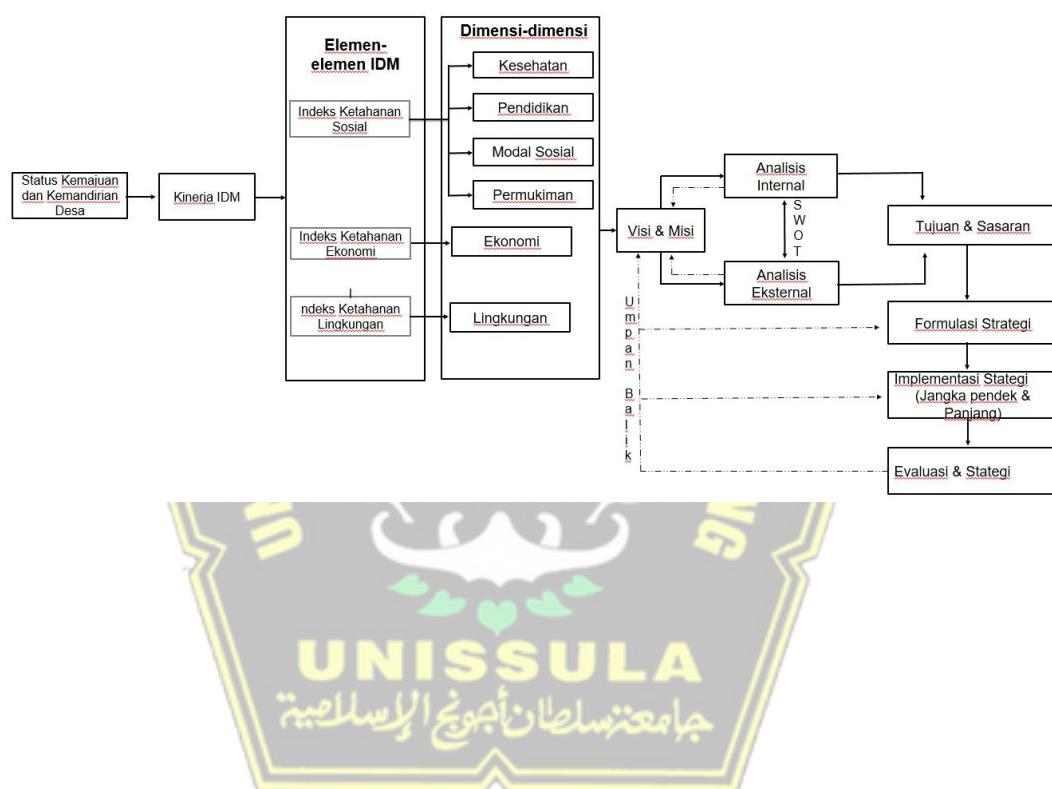


-
3. Peningkatan indeks ekonomi sangatlah penting dengan tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta keluar dari kategori sebagai Desa teringgal, pada umumnya kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Najaten pekerja tani/buruh sehingga untuk pendapatan di bawah rata-rata.
 4. Lembaga BUMDes yang seharusnya mampu mendorong perekonomian masih belum banyak berkontribusi dikarenakan baru berjalan satu tahun dan hanya tersedia satu dibidang produksi pengrajin kayu
 5. Perlu pengembangan potensi sumber daya lokal dan UKM.
 6. Pemanfaatan bantuan dari Desa untuk pengembangan potensi yang ada di wilayah Dusun.
 7. Perlu meningkatkan SDM melalui pelatihan di bidang pertanian, IPTEK serta memotivasi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat atas.
 8. Perlu mengurangi angka kemiskinan
 9. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jaringan untuk menunjang potensi wisata.
 10. Menyediakan Perbankan umum sebagai sarana masyarakat mendapat modal agar kegiatannya dapat berkembang.
 11. Memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk memelihara pembangunan agar dapat berkelanjutan
 12. mengembangkan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja untuk menekan generasi muda merantau
 13. mengarahkan bantuan yang diberikan desa untuk pendidikan agar menciptakan kualitas SDM yang berkualitas
 14. Meningkatkan kebiasaan gotong royong masyarakat dengan memberikan motivasi dan sosialisasi
 15. Memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan berkontribusi dalam pembangunan
-

2.7. Kerangka Pikir

Berdasar uraian teoritis di atas maka dapat dirumuskan variabel-variabel yang akan di teliti dan dikaji dalam penelitian ini.

Gambar 2.6
Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus. Menurut Mulyana (2008), penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Fiantika, 2022). Menurut Moleong (2013), bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode ilmiah (Fiantika, 2022).

Penelitian studi kasus dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2001) merupakan penelitian inquiri empiris yang mendalam sebuat fenomena pada kehidupan nyata (Fiantika, 2022). Jenis studi kausu yang dilalkukan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Jenis studi kasus ini digunakan untuk memahami lebih mendalam suatu kasus tertentu karena alasan peneliti yang ingin memahami dan mengetahui lebih dalam secara intrinsik suatu fenomena tertentu. Keteraturan dan kekhususan kasus juga menjadi alasan

seorang peneliti memilih penelitian studi kasus, dan bukan karena alasan eksternal lainnya (Fiantika, 2022).

Dengan metode kualitatif penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menemukan strategi yang paling tepat dalam upaya peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa berbasis IDM dengan metode analisis SWOT di Desa Waimi Kabupaten Alor.

3.2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi objek atau sampel adalah tempat ditemukannya permasalahan yang dilakukan peneliti yaitu di Desa Waimi, Kecamatan Lembur Kabupaten Alor. Pengambilan Desa Waimi sebagai sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa Desa Waimi adalah 1 dari 2 Desa di Kecamatan Lembur yang masih dalam status Desa Tertinggal sejak pengukuran IDM Tahun 2020 sampai dengan 2024.

3.3. Informan Peneliti

Informan atau responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa Waimi, Badan Permuswaratan Desa Waimi, Lembaga Kemasyarakatan Desa Waimi, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa Waimi, serta Dinas PMD Kabupaten Alor sebagai OPD yang mengurus tentang Desa.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sample berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak atau orang yang dipandang lebih memahami dan mengetahui tentang isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan cara peneliti memilih pejabat struktural di tubuh pemerintah Desa dan BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai representasi masyarakat Desa. juga pihak-pihak eksternal Desa, yaitu, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa Waimi, serta pejabat terkait di Dinas PMD Kabupaten Alor.

3.5. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan seperti tersebut diatas.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data-data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari beberapa sumber seperti seperti dokumen-dokumen Desa, laporan-laporan

Kementerian Desa yang ditampilkan dalam sistem informasi Kementerian Desa, jurnal, buku, dan sumber lainnya. Data-data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yang terkait dengan bahasan penelitian.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus dilakukan dengan metode yang tepat dan terukur. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Andi Prastowo observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja indera dengan dibantu panca indra lain. Dalam penelitian ini peneliti mengamati implementasi program kerja Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan capaian kinerja IDM di Desa Waimi Kabupaten Alor.
2. Wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui teknik tanya jawab tentang topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam yang tidak cukup diketahui hanya lewat observasi saja, tentang situasi atau fenomena yang sebenarnya terjadi.

Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami lebih dalam tentang potensi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta peluang dan ancaman dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program kerja berbasis peningkatan capaian IDM di Desa Waimi.

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan, transkip, dokumen-dokumen, agenda, literature, yang mencatat semua aktivitas dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahkan keterangan dan penerangan mengenai bahasan dalam penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian.
4. Catatan Lapangan. Catatan lapangan merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Sebelum menyusun catatan lapangan yang lengkap, peneliti menggunakan abstraksi berupa coretan yang berisi inti dari pengamatan dan hasil wawancara. penyusunan catatan lapangan dilakukan secara langsung setelah peneliti selesai penganmatan atau wawancara agar tidak lupa dan tercampur dengan informasi yang lain.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data kualitatif, Miles, Hubernan, dan Saldana (2014) menyebutkan tiga aktivitas yaitu kondensasi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan (Fiantika, 2022). Kondensasi terkait dengan pemilihan/klasifikasi/pengelompokan, pemusatan,

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi terhadap keseluruhan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan yang ada.

Tampilan data adalah bentuk penyajian data yang terstruktur dan sistematis. Data yang ada akan diorganisir kedalam kategori dan pola tertentu. Data-data akan ditampilkan dalam bentuk daftar, tabel baris dan kolom, gambar dan matriks, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.7.1. Analisis Sebelum Dilapangan

Analisis data sebelum masuk ke lapangan telah dilakukan terlebih dahulu dalam penelitian kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan status kemajuan Desa berdasarkan capaian kinerja IDM Desa Waimi Kabupaten Alor dan juga menggunakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui strategi peningkatan capaian kinerja IDM di Desa Waimi baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan menggunakan matriks SWOT, sehingga nantinya akan dapat mengetahui langkah-langkah apa yang digunakan untuk menerapkan pengembangan strategi capaian kinerja IDM dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang tetapi secara beriringan dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada.

3.7.2. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah melakukan suatu upaya bekerja dengan data, data yang diorganisasikan, data yang disatukan melalui suatu pemilihan sehingga dapat dikelola, disintesiskan, dicari dan ditemukan polanya, apa yang penting ditemukan dan dipelajari serta mampu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif yang dimulai dari fakta empiris bukan dari deduksi teori. Dari fenomena yang ada di lapangan, peneliti langsung dapat mempelajari, menafsirkan, menganalisis dan menarik kesimpulan di lapangan. Data yang sudah dihadapkan kepada peneliti, harus dianalisis sampai menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

Untuk mengelola data, agar mendapatkan hasil yang komparatif, penulis menganalisa dokumen-dokumen Desa Waimi, mengamati hasil lapangan dari observasi, dan melakukan analisis SWOT dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang mengacu pada aktivitas dan perencanaan program kegiatan dan pelaksanaannya selama ini oleh Pemerintah Desa Waimi Kabupaten Alor. Melakukan evaluasi faktor internal dan eksternal dari hasil, dokumen, wawancara, observasi, dan catatan lapangan yang bertujuan untuk memetakan *positioning* Desa Waimi dalam upaya menaikan status kemajuan dan kemandirian Desa.

3.7.3. Analisis Data Dilapangan

Terdapat beberapa model analisis data kualitatif yang umum digunakan.

Model yang digunakan peneliti adalah model Miles dan Huberman:

1. *Collection Data* (Pengumpulan Data). Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data). Mencatat dengan teliti dan rinci diperlukan dalam penelitian karena cukup banyak jumlahnya data yang didapat dari lapangan, dapat diketahui bahwa data yang akan didapat akan semakin banyak, menyeluruh dan sedikit rumit. Maka analisis data menggunakan reduksi data dapat dilakukan oleh peneliti. Reduksi data dapat dilakukan peneliti jika dalam melakukan penelitian telah ditemukan data yang masih asing, tidak dikenali dan polanya belum diketahui. Data yang dirangkum berupa pengembangan strategi capaian kinerja IDM Desa Waimi Kabupaten Alor dengan analisis SWOT.
3. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data merupakan langkah berikutnya setelah melakukan reduksi data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam penelitian kualitatif. Setelah melakukan penyajian data maka apa yang sedang terjadi akan mudah dipahami, setelah memahami maka dapat membuat rencana kerja selanjutnya. Pada tahap penyajian data peneliti

menggunakan analisis IFAS dan EFAS, diagram SWOT, dan teakhir dengan matriks SWOT. Dengan adanya matriks SWOT ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai kombinasi strategi yang dapat dipakai oleh Desa Waimi dalam menyusun program kerja dan kegiatan jangka menengah dan jangka pendek.

Tabel 3.1
Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strengths (S) Tentukan faktor kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan kelemahan faktor internal
Opportunities (O) Tentukan faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi Yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Tentukan faktor ancaman Eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

4. *Data Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi). Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Apabila menemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data berikutnya maka akan merubah suatu kesimpulan awal yang memang bersifat sementara. Akan tetapi jika telah menemukan dukungan bukti bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan awal bisa disebut dengan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari wawancara dan observasi terhadap pengembangan strategi pemasaran dalam upaya meraih keunggulan kompetitif yang telah di dukung dengan bukti dan dokumentasi lain.



BAB IV

Profil Desa Waimi

4.1. Gambaran Umum Desa

Desa Waimi adalah salah satu desa dari 6 Desa di Kecamatan Lembur, yang berjarak 12 km dari pusat Ibu Kota Kecamatan Lembur (berada di bagian Selatan Wilayah Kecamatan Lembur), sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten Alor berjarak 51 km. Secara Administrasi Desa Waimi terdiri dari 2 (dua) Dusun, 4 RW dan 8 RT.

4.1.1. Letak Geografis

Secara topografi, Desa Waimi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor merupakan daerah dataran tinggi dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulleng Kec Lembur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waisika Kec Alor Timur Laut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talwai Kec Lembur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tasi Kec Lembur

Luas wilayah Desa Waimi 590 ha atau sekitar 7,79 % dari luas Kecamatan Lembur. Secara administratif Desa Waimi terbagi atas 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RW dan 8 (delapan) RT.

4.1.2. Demografi

Berdasarkan pemutahiran data IDM Desa Waimi tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Desa Waimi pada tahun 2024 yaitu

860 jiwa. Adapun gambaran penduduk Desa Waimi secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1
Penduduk Waimi Tahun 2024

NO	TINGKATAN PENDUDUK	JUMLAH (Orang)	(%)
1	Jumlah Laki – laki	437	50,81
2	Jumlah Perempuan	423	49,19
	Jumlah	860	
	Jumlah KK	230	
3	Usia < 3 tahun	27	3,14
4	Usia 3-6 tahun	60	6,98
5	Usia 7-12 tahun	88	10,23
6	Usia 13-15 tahun	66	7,67
7	Usia 16-18 tahun	89	10,35
8	Usia 19-59 tahun	455	52,91
9	Diatas 59 tahun keatas	75	8,72
	Jumlah	860	

Sumber : IDM Desa Waimi Tahun 2024

Tabel 4.2
Penduduk Waimi Menurut Pekerjaan Tahun 2024

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	(%)
1	Petani	192	150	342	39,77
2	PNS	1	3	4	0,47
3	Pedagang keliling	-	-	-	-
4	Peternak	90	50	140	16,28
5	Montir	-	-	-	-
6	Bidan desa	-	1	1	0,12

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	(%)
7	Perawat	1	1	2	
8	Pembantu RT	-	-	-	-
9	POLRI	-	-	-	-
10	TNI	-	-	-	-
11	Pensiunan	-	-	-	-
12	Pengusaha kecil dan	-	-	-	-
13	Seniman/artis	-	-	-	-
14	Karyawan perusahaan	-	-	-	-
15	Pedagang Hasil Bumi	150		150	17,44
16	Perangkat desa/staf	7	0	7	0,81
17	Tukang jahit	-	-	-	-
18	Satpam	-	-	-	-
19	Buruh harian lepas	-	-	-	-
20	Warung makan	-	-	-	-

Sumber : Data Primer

Tabel 4.3
Lembaga Perekonomian di Desa

No	Lembaga ekonomi	Jumlah
1	Kelompok tani	8 kelompok
2	Kelompok Ternak	8 kelompok
3	Kios	0 unit
4	BUM-Desa	1 unit
5	Koperasi Desa Merah Putih	1 unit
6	Pasar Desa	Tidak Aktif
8	Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	8 kelompok

Sumber : Data Primer 2024

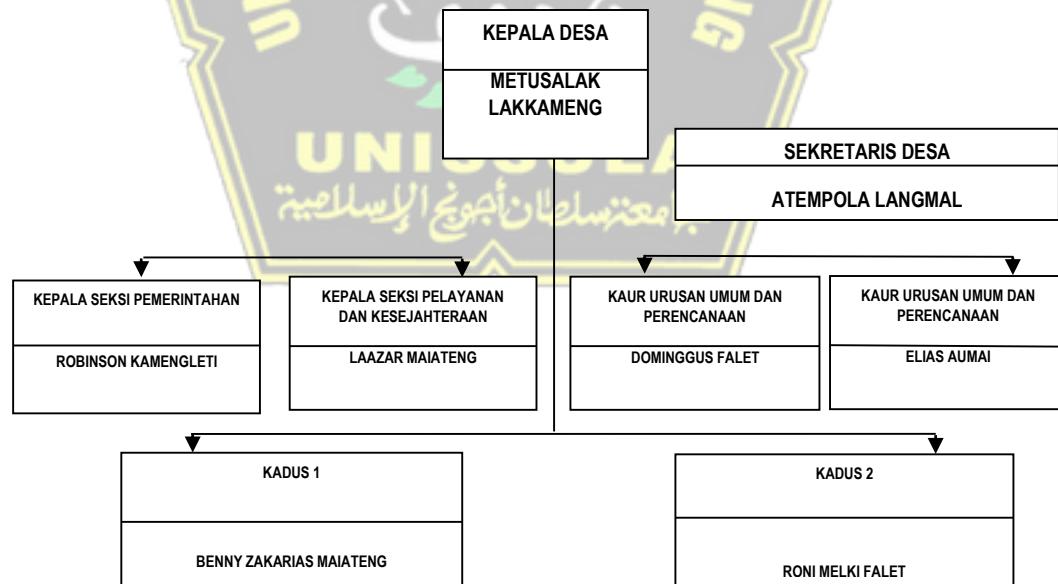
4.2. Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa

4.2.1. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa sebagai yang membantu Kepala Desa bisa terdiri dari tiga urusan dan tiga seksi atau dua urusan dan dua seksi. Sangat tergantung dari tingkat perkembangan Desa tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2015).

Susunan struktur organisasi Pemerintah Desa Waimi Periode 2019-2027 adalah seperti pada gambar dibawah ini.

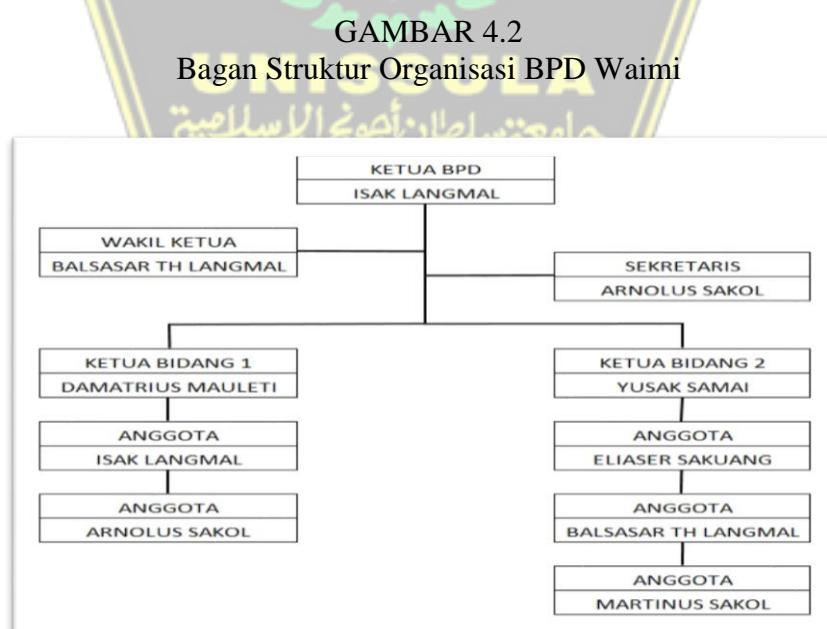
**Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Waimi**



4.2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD Desa Waimi merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang juga merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Anggota BPD Dewa Waimi merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dari dua dusun yang ada di Desa Waimi. BPD Desa Waimi saat ini adalah hasil dari pilihan masyarakat pada tahun 2019 silam dan akan berakhir masa jabatan sebagai anggota BPD pada tahun 2027 yang akan datang. Masa jabatan anggota BPD saat ini adalah selama 8 Tahun. Menyesuaikan dengan perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2024).

Adapun gambaran tentang struktur dan kepengurusan BPD Desa Waimi periode 2020-2027 seperti pada gambar dibawah ini.



Sumber : Data Primer

Dari bagan struktur dan fungsi pada gambar 4.2 diatas terlihat bahwa ada tujuh orang anggota BPD yang selain sebagai anggota BPD tetapi juga merangkap sebagai pimpinan BPD. Sebagaimana dalam pasal 27 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016), bahwa kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang. Sebagaimana terlihat dalam bagan diatas, bahwa secara kelembagaan BPD Desa Waimi lengkap terdiri dari pimpinan, bidang, dan anggota.

4.2.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Seperti sudah disebutkan sebelumnya (bab 2), bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi dan kerja-kerja Pemerintah Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. Adapun jenis-jenis dan kondisi LKD yang ada di Desa Waimi dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW)

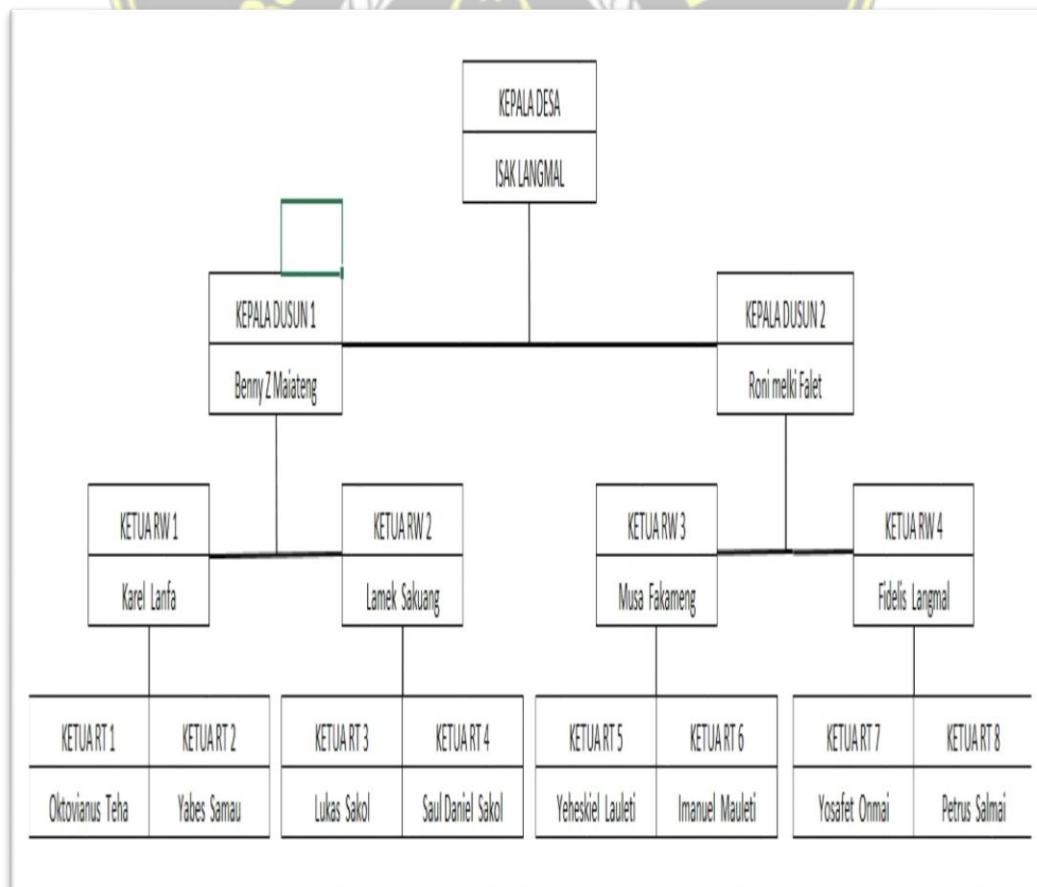
Seperti tersebut dalam pasal 7 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 2018), bahwa RT/RW bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; menyediakan data kependudukan dan perizinan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Termasuk

dalam hal ini adalah terbat langsung dalam tahapan pembangunan di Desa.

Dalam pasal 8 disebutkan bahwa pengurus LKD terdiri atas ketua; sekretaris; bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan. Penjabaran lebih lanjut tentang pengurus RT/RW ini diatur dalam peraturan desa dan keputusan kepala desa. Sesuai dengan keputusan kepala Desa Waimi nomor 3 tahun 2020, bahwa untuk periode 2020 sampai saat ini pengurus RT/RW di Desa Waimi adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3

Bagan Struktur LKD-RT/RW Desa Waimi



Secara umum bahwa sistem dan struktur, posisi kelembagaan RT/RW dalam organisasi pemerintah Desa, dapat terlihat dalam gambar 4.4 diatas. Dapat kita pahami bahwa hubungan kelembagaan antara Pemerintah Desa (lewat Kepala Dusun) dan RT/RW merupakan hubungan kemitraan yang saling membutuhkan. Dengan kata lain, tidak mungkin Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan kelembagaan dari tiap-tiap RT/RW yang ada diwilayah. RT dan RW memainkan peran yang sangat penting dalam tata kelola Pemerintahan pada umumnya, dan Pembangunan khususnya ditingkat lokal Desa.

Pada tataran yang normatif (pasal 8, Permendagri 18/2018) disebutkan bahwa idealnya RT/RW sebagai LKD di Desa memiliki kepengurusan yang lengkap. Hanya saja oleh karena beberapa pertimbangan dan kondisi lokal Desa, sehingga sampai dengan saat ini ditubuh organisasi RT/RW baru dijabat oleh ketua saja.

2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2024 Tentang POS Pelayanan Terpadu, 2024).

Sebagaimana tersebut dalam pasal 2 bahwa Tugas Posyandu adalah berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat; dan social. Tentunya pelaksanaan tugas dan pelayanan ini wajib disesuaikan dengan kewenangan lokal berskala Desa.

Untuk Desa Waimi, fungsi-fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada uraian diatas sudah dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait. Hanya belum diorganisir dalam satu wadah organisasi Posyandu yang dimaksudkan dalam Permendagri 13 Tahun 2024. Lembaga-lembaga yang ada di Desa waimi masih terpisah secara organisasi antara satu dengan lainnya.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan meliputi beberapa hal, antara lain : pendidikan anak usia dini; identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; penguatan pemanfaatan literasi digital ; dan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

Desa Waimi memiliki 1 unit gedung PAUD. Adapun struktur kepengurusan PAUD sebagaimana dalam tabel berikut.

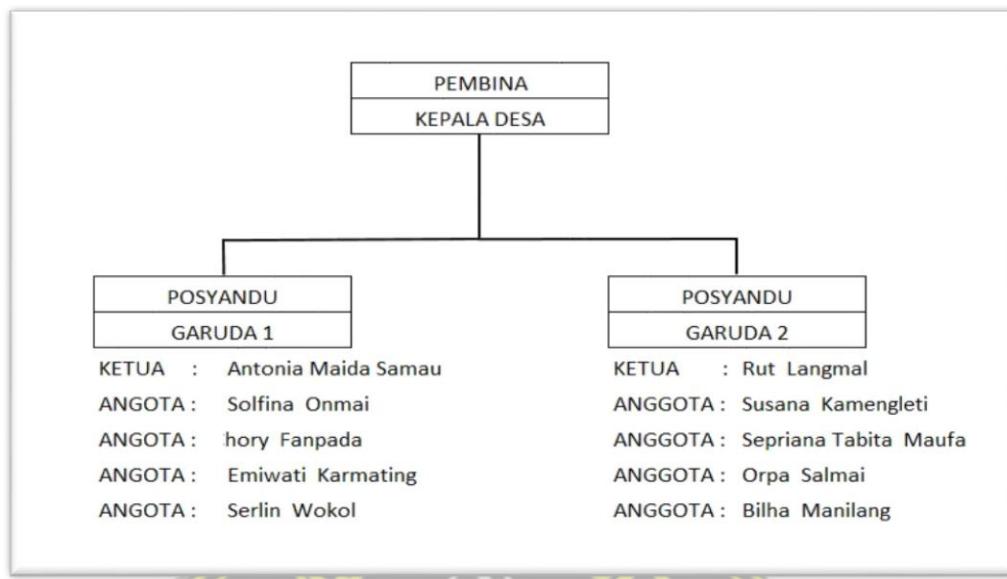
4. Posyandu

Dalam pasal 3 ayat 2 Permendagri 13 Tahun 2024 disebutkan bahwa tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi beberapa hal, antara lain :

- Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- Penyuluhan kesehatan dan giziibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- Rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
- Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- Penjangkauan akses yang terdiri atas: Imunisasi; Vitamin A; dan Tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Desa Waimi memiliki 2 unit gedung PAUD yang terletak di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Waimi. Adapun struktur kepengurusan PAUD sebagaimana dalam tabel berikut.

Gambar 4.4
Bagan Struktur Organisasi Pos Pelayanan Terpadu



4.3. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Waimi

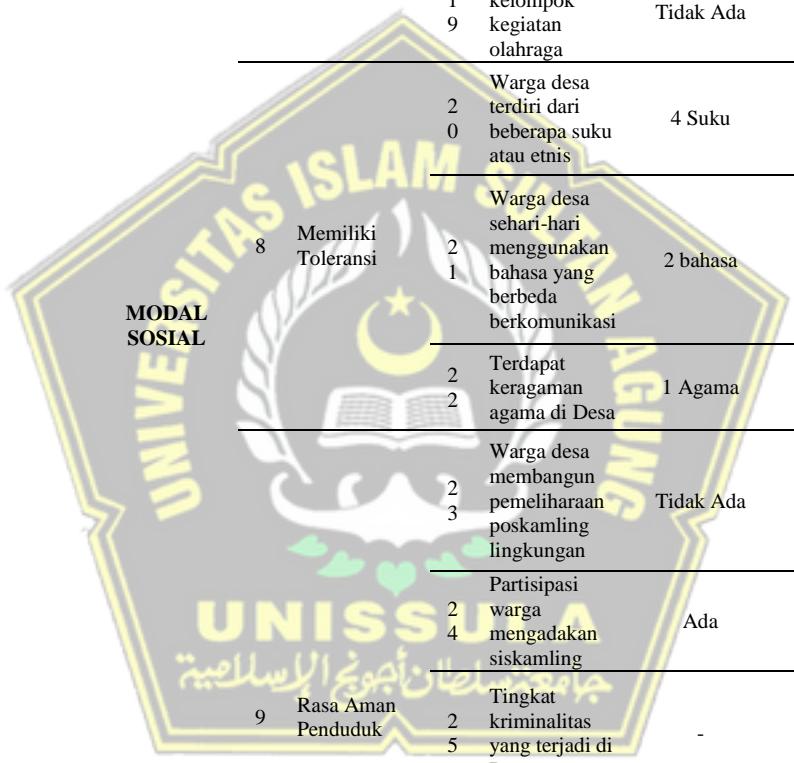
4.3.1. Pemutahiran IDM Tahun 2024

Desa-desa melakukan pemutahiran IDM setiap tahunnya. Sesuai dengan standar operasional prosedur pemutahiran IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, bahwa sejak 2017 pelaksanaan pemutahiran IDM di Desa-desa dimulai kurang lebih pada bulan maret dan berakhir di bulan April. Ini merupakan tahapan pemutahiran yang berlangsung di level Desa.

Adapun data hasil pemutahiran IDM Desa waimi, termasuk dimensi dan sub dimensi, indicator penilaian, dan bobot nilai atau skor, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.7
Data Pemutahiran IDM Desa Waimi Tahun 2024

N O	INDEKS DESA MEMBAN GUN	DIMENSI	INDIKATOR	INPUTAN	SKO R	KET
1	KESEHAT AN	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit	5 menit	5
			2	Tersedia tenaga keshatan bidan	1 Org	5
			3	Tersedia tenaga keshatan dokter	tidak	0
			4	Tersedia tenaga keshatan lain	1 perawat	2
	KETAHAN AN SOSIAL	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu	7.000 meter	1
			6	Tingkat aktivitas posyandu	2 posyandu aktif	5
		Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS	167/860 org	2
			8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM	30 m	5
	PENDIDIK AN	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	9	Akses ke SMP/MTS < 6 km	7.000 meter	4
			10	Akses ke SMU/SMK < 6 km	20.000 meter	1
		Akses Pendidikan Non Formal	1	Kegiatan pemberantasan buta aksara	-	Indikator tidak masuk dalam kuesior
			2	kegiatan PAUD	Ada	5
			3	Kegiatan PKBM/Paket ABC	Ada	5
			4	Akses ke pusat keterampilan/kursus	Tidak Ada	1
6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa			
			Tidak Ada			



		1 6	Kebiasaan gotong royong didesa	Ada	5	
		1 7	Frekuensi kegiatan gotong royong	10 kegiatan	5	Termasuk dalam skor
	7	Memiliki Solidaritas Sosial	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar	Ada	5	
		1 8	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga	Tidak Ada	0	
		1 9	Terdapat kelompok kegiatan olahraga	Tidak Ada	0	
		2 0	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis	4 Suku	5	
	8	Memiliki Toleransi	Warga desa sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda berkomunikasi	2 bahasa	5	
		2 2	Terdapat keragaman agama di Desa	1 Agama	1	
		2 3	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan	Tidak Ada	1	
		2 4	Partisipasi warga mengadakan siskamling	Ada	5	
	9	Rasa Aman Penduduk	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	-	-	Indikator tidak masuk dalam kuesior
		2 6	Tingkat konflik yang terjadi di Desa	Tidak Ada	5	
		2 7	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa			Indikator tidak masuk dalam kuesior
	1 0	Kesejahteraan Sosial	2 8	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	Di Luar Desa	3

		Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)	8 meter	5	
1	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	Terdapat sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)	1 unit	2	Warung kelontong g di desa
1	6	Jumlah pasar dengan bangunan permanen	tidak ada		Ada dalam kuesione r
1	6	Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	tidak ada	1	
1	6	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	tidak ada	0	
1	7	Akses Distribusi/Logistik	Terdapat kantor pos dan jasa logistik	0	
1	8	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)	0	
1	9	Akses ke Lembaga Ekonomi	Tersedianya BPR		
1	9	Akses penduduk ke kredit	tidak ada	1	
2	0	Keterbukaan Wilayah	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)	3	Ada tambahan Bumdes dalam kuesione r
2	0	Keterbukaan Wilayah	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)	3	

		Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepantjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)	4	9	Bisa sepanjang tahun	5
		Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)	5	0	Aspal/Beton	5
		Jumlah Skor Ketahanan Ekonomi				26
		Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	5	1	tidak ada	5
		Terdapat sungai yg terkena limbah	5	2		
		Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)	5	3	tidak ada	5
		Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	5	4	belum ada	0
3	KETAHANAN EKOLOGI					
		Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	2	2		

Sumbe : Data Desa Waimi diolah

Dari hasil pencermatan masing-masing Indeks Ketahanan yang ada pada tabel 4.7, terhadap 54 indikator penilaian yang tersebar di tiga aspek ketahanan yang ada dan disinkronkan dengan kuesioner yang dipakai oleh Desa dalam melakukan penginputan dan penilaian. Ada beberapa hal yang ditemukan ;

1. Dari 54 indikator pertanyaan terlampir tidak otomatis berbanding lurus dengan bobot nilai. Ada beberapa indikator yang tergabung dan menghasilkan satu bobot nilai. Contoh, indikator 44 dan 45 saling terkait dan dijumlahkan baru menghasilkan satu bobot poin. Jadi, total indikator yang paralel dengan bobot menjadi 53 indikator saja.
2. Ada empat indikator yang ada dalam instrument IDM tetapi tidak masuk dalam bobot penilaian kuesioner IDM yang dipakai oleh Desa dalam pemutahiran IDM tahun 2024 (indikator 11, 25, 27, 30).
3. Ada indikator tambahan yang ada dalam kuesioner IDM tahun 2024 yang sebetulnya tidak ada dalam indikator instrumen baku (16.a)
4. Pada indikator no 28 tentang akses ke sekolah luar biasa, ada ketidak konsistensi antara pertanyaan dengan jawaban yang dijadikan dasar penentuan bobot nilai.
5. Ada perbedaan substansi petanyaan yang termuat dalam indikator baku dan indikator pertanyaan pada kuesioner yang diisi oleh Desa (indikator no 36, 37, 38)
6. Ada indikator yang salah dipahami oleh tim pemutahiran data yang juga berpengaruh terhadap skor IDM. Cek lebih jauh. Contoh indikator nomor 5 pada dimensi kesehatan. Sesuai redaksi pada Kepmendes 2 tahun 2026 berbunyi “Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu”, tetapi pada redaksi kuesioner yang diisi oleh Desa kalimatnya berbunyi “ jarak ke poskesdes/polindes terdekat” jadi keberadaan posyandu tidak

masuk dalam indikator yang dinilai. Hal ini berpengaruh terhadap bobot penilaian.

4.3.2. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi Tahun 2024

Terlepas dari beberapa hal tersebut diatas yang menjadi sedikit catatan khusus, pada dasarnya secara umum Desa waimi sudah melakukan pemutahiran data IDM tahun 2024 dengan baik dan dengan hasil tersebut diatas. Berdasarkan perhitungan dengan formula yang ada pada kuesioner IDM Desa Waimi maka dengan Data diatas maka hasilnya seperti terlihat pada tabel. 4.8.

Tabel 4.8

Perhitungan Skor IDM Desa Waimi Tahun 2024

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

$$\text{IKS} = \frac{\text{Total Skor IKS}}{\text{Nilai Maksimum IKS}}$$

$$\text{IKS} = \frac{119}{175}$$

$$\text{IKS} = 0,6800$$

$$\text{IKE} = \frac{\text{Total Skor IKE}}{\text{Nilai Maksimum IKE}}$$

$$\text{IKE} = \frac{26}{60}$$

$$\text{IKE} = 0,4333$$

$$\text{IKL} = \frac{\text{Total Skor IKL}}{\text{Nilai Maksimum IKL}}$$

$$\text{IKL} = \frac{10}{15}$$

$$\text{IKL} = 0,6667$$

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :	$\begin{aligned} \text{IDM} &= \frac{1}{3} (\text{IKL} + \text{IKE} + \text{IKS}) \\ \text{IDM} &= \frac{1}{3} (0,6667 + 0,4333 + 0,6800) \\ \text{IDM} &= \frac{1}{3} 1,7800 \\ \text{IDM} &= \underline{\underline{0,593}} \end{aligned}$
Keterangan :	
IDM = Indeks Desa Membangun	
IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)	
IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi	
IKS = Indeks Ketahanan Sosial	

Sumber : Data IDM Desa Waimi diolah

Berdasarkan rumus scoring IDM Dengan data yang tersaji diatas, dapat dilihat bahwa hasil akhir skor IDM Desa Waimi adalah “0,5933”.

Dengan skor itu maka Desa Waimi masuk dalam kategori Desa Tertinggal (Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907)

Berarti bersdasarkan klasifikasi status desa (Mandiri-Maju-Berkembang-Tertinggal-Sangat Tertinggal) status kemajuan dan kemandirian Desa Waimi masih berada diposisi Desa Tertinggal. Satu tingkat diatas Desa sangat tertinggal, dan masih tiga tingkat dibawah Desa mandiri.

BAB V

STRATEGI PENINGKATAN IDM DESA WAIMI

5.1. Identifikasi Capaian Kinerja IDM Yang Masih Rendah

Dalam konteks tata kelola pembangunan Desa maka hasil skoring IDM Desa Waimi Tahun 2024 perlu dikaji dan dimaknai secara baik untuk kepentingan keberlanjutan yaitu rencana kerja pembangunan selanjutnya. Karena IDM ini merupakan instrument dalam mengukur status kemajuan dan kemandirian Desa perlu adanya evaluasi secara terus menerus. Aspek-aspek penilaian atau indikator yang baik dan mendapatkan bobot nilai tinggi perlu dipertahankan, sebaliknya indikator yang masih kurang dan mendapat bobot nilai rendah perlu untuk ditingkatkan.

Indikator-indikator kinerja IDM yang masih rendah tentunya menjadi perhatian yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun dimensi, sub dimensi, dan indikator masing-masing variabel dalam IDM yang perlu ditingkatkan kinerjanya perlu dihimpun, dikategorisasi, dan dikaji secara baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 5.1
Daftar Capaian Kinerja IDM yang Masih Rendah

N O	INDEKS DESA MEMBANGUN	DIMENSI	INDIKATOR	INPUTAN	SKOR	KET
1	KETAHANAN SOSIAL	Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan	1 Tersedia tenaga kesehatan dokter	tidak	0
				2 Tersedia tenaga kesehatan lain		

	2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	3	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu	7.000 meter	1
	3	Jaminan Kesehatan	4	Tingkat kepesertaan BPJS	167/860 org	2
Pendidikan	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	5	Akses ke SMP/MTS < 6 km	7.000 meter	4
			6	Akses ke SMU/SMK < 6 km	20.000 meter	1
	5	Akses Pendidikan Non Formal	7	Akses ke pusat keterampilan/kursus	Tidak Ada	1
	6	Akses ke Pengetahuan	8	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	Tidak Ada	1
Modal Sosial	7	Memiliki Solidaritas Sosial	9	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga	Tidak Ada	0
	8	Memiliki Toleransi	10	Terdapat kelompok kegiatan olahraga	Tidak Ada	0
	9	Rasa Aman Penduduk	11	Terdapat keragaman agama di Desa	1 Agama	1
	10	Kesejahteraan Sosial	13	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan	Tidak Ada	1
Permukiman	11	Akses ke Sanitasi	14	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	Di Luar Desa	3
	12	Akses ke Listrik	15	Terdapat tempat pembuangan sampah.	Dibakar dalam lubang	4
	13	Akses ke Informasi dan Komunikasi	16	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.	188/222	4
	14			Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing	2	3
	15				Sinyal telepon seluler / handphone di Desa	
	16				Terdapat fasilitas internet di kantor kepala Desa	

2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	1	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	1	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	tidak ada	1	Jumlah industri mikro dan kecil di Desa
			1	9	Terhadap sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)	1 unit	2	Warung kelontong di desa	
1	6	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	2	Jumlah pasar dengan bangunan permanen	tidak ada	1	Ada dalam kuesioner		
			2	1	Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	tidak ada	0		
1	7	Akses Distribusi/Logistik	2	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	tidak ada	0			
			2	3	Terdapat kantor pos dan jasa logistik	tidak ada	0		
1	8	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	2	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)	tidak ada	0			
			2	5	Tersedianya BPR	ada bumes	3	Ada tambahan Bumes dalam kuesioner	
1	9	Lembaga Ekonomi	2	Akses penduduk ke kredit	tidak ada	1			
			2	7	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)	ada bumes	3		
2	0	Keterbukaan Wilayah	2	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)	ada. Tanpa trayek tetap	3			
			2	8	Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)				

3	KETAHANAN EKOLOGI	Ekologi	2 1	Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	2 9	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	belum ada	0
---	--------------------------	---------	--------	---	--------	---	-----------	---

Sumber : Data IDM Desa Waimi tahun 2024 diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diatas terlihat bahwa terhadap masing-masing Indeks Ketahanan yang ada, masih banyak indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya.

1. Untuk aspek IKS masih tersebar di 4 dimensi, 14 (empat belas sub-dimensi, dan ada tujuh belas indikator yang memiliki bobot nilai rendah dan perlu ditingkatkan kinerjanya.
2. Untuk aspek IKE ada di satu dimensi, tersebar di enam sub-dimensi, dan terdapat di enam indikator.
3. Untuk aspek IKL ada di satu dimensi, satu sub-dimensi, dan terdapat di satu indikator.

Jadi kesimpulannya bahwa, dari 3 (tiga) aspek ketahanan yang merupakan komposit dari Instrumen IDM perlu memperhatikan dan perlu pengkajian lebih lanjut terhadap 6 (enam) dimensi, 21 (dua puluh satu) sub-dimensi, dan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang ada.

Dua puluh Sembilan (29) indikator ini merupakan indikator yang masih rendah bobot nilainya. Indikator tersebut merupakan aspek-aspek dalam pembangunan Desa yang penting dan perlu ditingkatkan

kinerjannya lewat pengawalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

5.2. Analisis Indikator IDM Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan

Pembangunan Desa.

Dari hasil identifikasi terhadap aspek-aspek dalam IDM Desa Waimi tahun 2024 yang perlu ditingkatkan kinerjanya maka dari 29 indikator yang ada itu, ada yang terkait langsung dengan urusan-urusan kewenangan lokal berskala Desa (internal Desa) dan ada pula yang terkait dengan urusan-urusan supra desa, atau kewenangan pemerintah Kabupaten dan Provinsi (eksternal). Aspek – aspek internal dan eksternal ini perlu dikategorisasi dengan baik karena akan terkait erat dengan rumusan strategi perencanaan dan pelaksanaannya di kemudian hari.

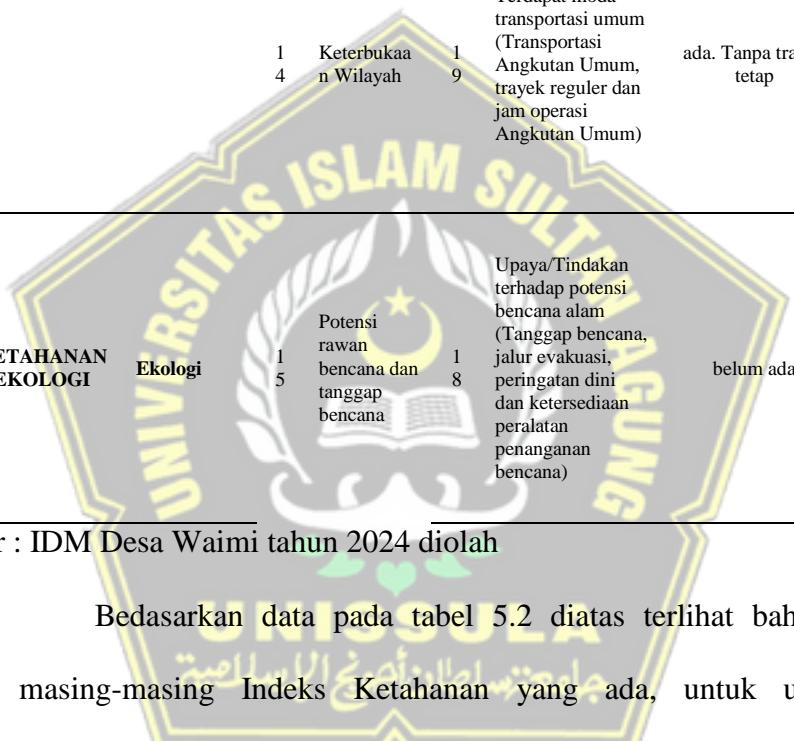
5.2.1. Analisis Indikator Urusan Lokal Desa.

Indikator-indikator yang menjadi urusan Desa sangat terkait langsung dengan kewenangan lokal berskala Desa. Urusan-urusan ini merupakan aspek-aspek pembangunan yang oleh aturan perundangan-undangan, khususnya Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya dapat diatur dan dapat diurus oleh Desa.

Dari 29 (dua puluh Sembilan) indikator pembangunan tersebut diatas, yang masuk dalam kategori urusan lokal Desa dapat di lihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.2
Indikator-indikator Urusan Lokal Desa

N O	INDEKS DESA MEMBANGU N	DIMENSI	INDIKATOR	INPUTAN	SKOR	
1	KETAHANAN SOSIAL	Kesehatan	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu	7.000 meter	1
		Pendidikan	Akses Pendidikan Non Formal	Akses ke pusat keterampilan/kurs us	Tidak Ada	1
		Modal Sosial	Akses ke Pengetahua n	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	Tidak Ada	1
		Permukiman	Memiliki Solidaritas Sosial	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga	Tidak Ada	0
			5	Terdapat kelompok kegiatan olahraga	Tidak Ada	0
			Memiliki Toleransi	Terdapat keragaman agama di Desa	1 Agama	1
		EKONOMI	Rasa Aman Penduduk	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan	Tidak Ada	1
			Akses ke Sanitasi	Terdapat tempat pembuangan sampah.	Dibakar dalam lubang	4
			Akses ke Listrik	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.	188/222	4
		KETAHANAN EKONOMI	Akses Informasi dan Komunikasi	Terdapat akses internet di Kantor Desa	Tidak Ada	1
			Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	tidak ada	1
			Tersedia Pusat Pelayanan Perdaganga n	Terdapat sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)	1 unit	2
				Jumlah pasar dengan bangunan permanen	tidak ada	1



			Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	tidak ada	
1	4		Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	tidak ada	0
1	3	Lembaga Ekonomi	1 6	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi, Bumdes)	ada bumdes
1	4	Keterbukaan Wilayah	1 9	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)	ada. Tanpa trayek tetap
3	5	KETAHANAN EKOLOGI	1 5	Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalu evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
				belum ada	0

Sumber : IDM Desa Waimi tahun 2024 diolah

Berdasarkan data pada tabel 5.2 diatas terlihat bahwa terhadap masing-masing Indeks Ketahanan yang ada, untuk urusan-urusan pembangunan yang menjadi ranah urusan Desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk aspek IKS masih tersebar di 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub-dimensi, dan ada di 10 (sepuluh) indikator
2. Untuk aspek IKE ada di 1 (satu) dimensi, tersebar di 4 (empat) sub-dimensi, dan terdapat di 7 (tujuh) indikator.
4. Untuk aspek IKL ada di 1 (satu) dimensi, 1 (satu) sub-dimensi, dan terdapat di 1 (satu) indikator.

Jadi kesimpulannya bahwa, dari 3 (tiga) aspek ketahanan yang merupakan komposit dari Instrumen IDM, untuk faktor-faktor internal perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap 6 (enam) dimensi, 15 (lima belas) sub-dimensi, dan 18 (delapan belas) indikator yang ada.

Delapan belas indikator ini merupakan indikator yang masih rendah bobot nilainya. Indikator tersebut merupakan aspek-aspek dalam pembangunan Desa yang penting dan perlu ditingkatkan kinerjanya lewat konsolidasi pembangunan lewat perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

5.2.2. Analisis Indikator Urusan Supra Desa.

Indikator-indikator yang menjadi urusan supra Desa merupakan aspek-aspek pengelolaan pembangunan yang bukan menjadi kewenangan lokal berskala Desa. Urusan-urusan ini merupakan sector-sektor pembangunan yang oleh aturan perundang-undangan, bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan tidak dapat diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa.

Walaupun bukan merupakan urusan Desa, sasaran dari program dimaksud untuk kepentingan masyarakat Desa, atau dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. Dari 29 (dua puluh Sembilan) indikator pembangunan tersebut diatas, yang menjadi urusan supra Desa dapat di lihat pada tabel 5.3. dibawah ini.

Tabel 5.3
Indikator-Indikator Urusan Supra Desa

N O	INDEKS DESA MEMBANGU N	DIMENSI	INDIKATO R	INPUTAN	SKOR
1 KETAHANAN SOSIAL	KETAHANAN SOSIAL	Pendidikan	1 Pelayanan Kesehatan	1 Tersedia tenaga kesehatan dokter	tidak 0
			2	Tersedia tenaga kesehatan lain	1 perawat 2
			2 Jaminan Kesehatan	3 Tingkat kepesertaan BPJS	167/860 org 2
			3 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	4 Akses ke SMP/MTS < 6 km	7.000 meter 4
			5	Akses ke SMU/SMK < 6 km	20.000 meter 1
			4 Kesejahteraan Sosial	6 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	Di Luar Desa 3
			5 Akses Informasi dan Komunikasi	7 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing	2 3
			6 Akses Distribusi/Logistik	8 Terdapat kantor pos dan jasa logistik	tidak ada 0
			7 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	9 Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)	tidak ada 0
2 KETAHANAN EKONOMI	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	10	Tersedianya BPR	
			11	Akses penduduk ke kredit	tidak ada 1

Sumber : IDM Desa Waimi tahun 2024 diolah

Berdasarkan data pada tabel 5.3 diatas terlihat bahwa terhadap masing-masing Indeks Ketahanan yang ada, untuk urusan-urusan pembangunan yang menjadi ranah eksternal Desa ada indikator- indikator

yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Untuk aspek IKS masih tersebar di 4 dimensi, 5 sub-dimensi, dan ada di 7 indikator.
2. Untuk aspek IKE ada di 1 (satu) dimensi, tersebar di 2 (dua) sub-dimensi, dan terdapat di 4 indikator.
3. Untuk aspek IKL tidak ada.

Jadi kesimpulannya bahwa, dari 3 (tiga) aspek ketahanan yang merupakan komposit dari Instrumen IDM, untuk urusan supra Desa perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap 5 dimensi, 7 sub-dimensi, dan 11 indikator yang ada.

Dua belas belas indikator ini merupakan capaian kinerja IDM yang masih rendah. Sudah tentu menjadi tugas Pemerintah Desa mengupayakan masing-masing indikator ditingkatkan kinerjannya.

5.3. Analisis SWOT

Dalam rangka menyusun kerangka kebijakan terstruktur dan strategis berbasis analisis SWOT, maka dibutuhkan sejumlah item-item yang akan menjadi dasar analisis lebih lanjut. Menurut Slamet (Riyanto et al., 2021) item dalam analisis SWOT akan tergantung pada konteks atau sifat masalah yang ingin dianalisis.

Dalam konteks penelitian ini, bahwa item-item yang akan ditemukan sudah dipermudah dengan melihat hasil analisis capaian IDM terebut diatas. Item-item seperti tersebut dalam tabel 5.1 secara langsung

berpengaruh terhadap capaian kinerja IDM Desa Waimi. Item-item ini menjadi penyebab masih rendahnya capaian kinerja IDM yang ada selama ini.

Tentunya, agar strategi peningkatan capaian IDM dapat terwujud dengan baik, disisi lain, isu-isu terkait perlu diidentifikasi dan ditemukan yang dianggap secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja 29 indikator tersebut diatas. Identifikasi item lainnya ini baik yang berhubungan dengan faktor lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal Desa Waimi.

5.3.1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal Desa adalah semua elemen sumber daya yang ada dan terkait dengan kerja pembangunan Desa, khususnya capaian kinerja IDM Desa Waimi. Elemen ini terdiri dari lembaga-lembaga yang ada, struktur dan fungsi dari setiap lembaga, system dan pelaksanaan tahapan pembangunan Desa, termasuk kualitas aktifitas-aktifitas organisasi dan hubungan kelembagaan dan kemitraan yang dibangun oleh Desa.

Lingkungan internal Desa ini akan dilakukan analisis untuk menilai sumber daya, kompetensi, dan keunggulannya, sehingga dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan Desa Waimi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor internal Desa, maka diidentifikasi sejumlah item kekuatan serta kelemahan Desa Waimi baik yang secara langsung terkait

dengan dengan indikator IDM, maupun aspek-aspek yang bersifat pendukung kinerja IDM dimaksud.

1. Ketersediaan sumberdaya Pemerintah Desa dalam mengelola pembangunan berskala Desa.
2. BPD dan LKD Aktif.
3. Desa belum memiliki taman bacaan/ perpustakaan Desa
4. Desa belum memiliki pusat ketampilan/kursus.
5. Desa tidak memiliki fasilitas/lapangan olahraga.
6. Desa tidak memiliki kelompok kegiatan olahraga.
7. Kantor Desa Belum memiliki internat
8. Desa tidak memiliki Poskamling.
9. Pemahaman Pemerintah Desa yang masih rendah tentang ruang lingkup pembangunan Desa dan IDM.
10. Desa rutin menyusun rencana jangka menengah (RPJMDes)
11. Desa menyusun rencana kerja tahunan (RKPDes) setiap tahun anggaran.
12. Desa menyusun Dokumen APBDes setiap tahun anggaran.
13. Masih rendahnya kemampuan Desa dalam merumuskan rencana program kegiatan dan anggaran berbasis capaian kinerja IDM.
14. Adanya kerjasama dan kemitraan yang baik dengan Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.
15. Gaya Pemerintah Desa yang inklusif dan cenderung mau menerima setiap masukan dari Pendamping dan Pemerintah secara berjenjang.

16. Lemahnya pemahaman pemerintah Desa tentang pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa.
17. Dukungan Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan Bumdes masih Minim.
18. Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu relatif jauh.
19. Desa belum memiliki tindakan terhadap potensi bencana (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
20. Sudah dibentuk lembaga ekonomi Bumdes dan Koperasi
21. Prosentase warga memiliki BPJS kesehatan masih rendah.

Dari analisis faktor lingkungan internal, ditemukan ada 21 item/indikator yang diidentifikasi tergolong ranah internal Desa. Dalam konteks tata kelola pembangunan Desa, Indikator-indikator ini dikategorikan sebagai urusan pembangunan menjadi kewenangan lokal berskala Desa.

5.3.2. Analisis Lingkungan Ekternal

Lingkungan eksternal Desa adalah semua sumber daya yang ada, baik dalam ruang lingkup Desa, atau diluar Desa, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dan perpengaruh terhadap kinerja pembangunan Desa, khususnya terhadap capaian kinerja IDM Desa Waimi. Lingkungan ini terdiri dari, aspek social kemasyarakatan, budaya dan kebiasaan masyarakat, teknologi dan informasi yang masuk ke Desa, pihak ketiga yang bekerjasama dengan Desa, partisipasi masyarakat

dalam tahapan pembangunan Desa, keberadaan dan keaktifan lembaga supra Desa (kelembagaan yang mendampingi, membina dan mengevaluasi kinerja pembangunan Desa), termasuk regulasi dan kebijakan-kebijakan yang terkait.

Lingkungan eksternal Pemerintah Desa ini akan dilakukan analisis untuk menilai sumber daya, kompetensi, dan keunggulannya, sehingga dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap Desa. Berikut akan disajikan analisis faktor-faktor eksternal yang ada:

1. Tenaga Kesehatan Dokter tidak tersedia di Desa
2. Terdapat Pustu dan aktifitas pelayanan Pustu.
3. Keberadaan pegawai pustu masih kurang (perawat 1 orang dan tenaga bidan 1 orang).
4. Jarak Akses ke SMP/Sederajat masih jauh.
5. Jarak akses ke SMA/Sederajat masih jauh.
6. Akses ke SLB masih jauh.
7. Pengelolaan sampah belum di angkat, tetapi di bakar dalam lubang sampah.
8. Belum semua rumah tangga teraliri listrik
9. Ada Tower BTS di Desa
10. Sinyal telepon seluler/handphone di Desa lemah
11. Belum ada industry mikro dan kecil di Desa
12. Keberadaan warung kelontong di Desa sangat minim (baru 1 unit)
13. Belum terdapat pasar di Desa

14. Belum terdapat kedai makan, restoran, hotel, dan penginapan di Desa
15. Tidak terdapat kantor pos/jasa logistic di Desa
16. Tidak tersedia lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta) di Desa
17. Tidak ada akses penduduk ke layanan kredit
18. Transportasi umum ada tapi tanpa trayek tetap
19. Lingkungan masyarakat Desa yang ramah.
20. Budaya gotong royong yang masih tinggi.
21. Ketersediaan SDM dan SDA dalam mendukung program pembangunan Desa
22. Adanya kebijakan Kementerian Desa tentang perencanaan Desa berbasis IDM
23. Adanya pendampingan oleh Pendamping Desa dalam setiap tahapan pembangunan di Desa.
24. Adanya proses evaluasi perencanaan program dan anggaran Desa yang rutin, di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
25. Ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Desa yang relatif cukup (APBN dan APBD).

Dari analisis faktor lingkungan eksternal, ditemukan ada 25 item/indikator yang diidentifikasi tergolong ranah eksternal Desa. Dalam konteks tata kelola pembangunan Desa, Indikator-indikator ini dikategorikan sebagai urusan pembangunan menjadi kewenangan supra Desa.

Dapat disimpulkan bahwa indikator dalam faktor strategis internal dan eksternal tersebut diatas merupakan temuan dari kajian mandiri yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data resmi IDM Desa Waimi yang secara riil yang secara langsung, maupun tidak langsung berkontribusi dan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja IDM Desa Waimi selama 5 tahun ini.

5.4. Analisis IFAS dan EFAS

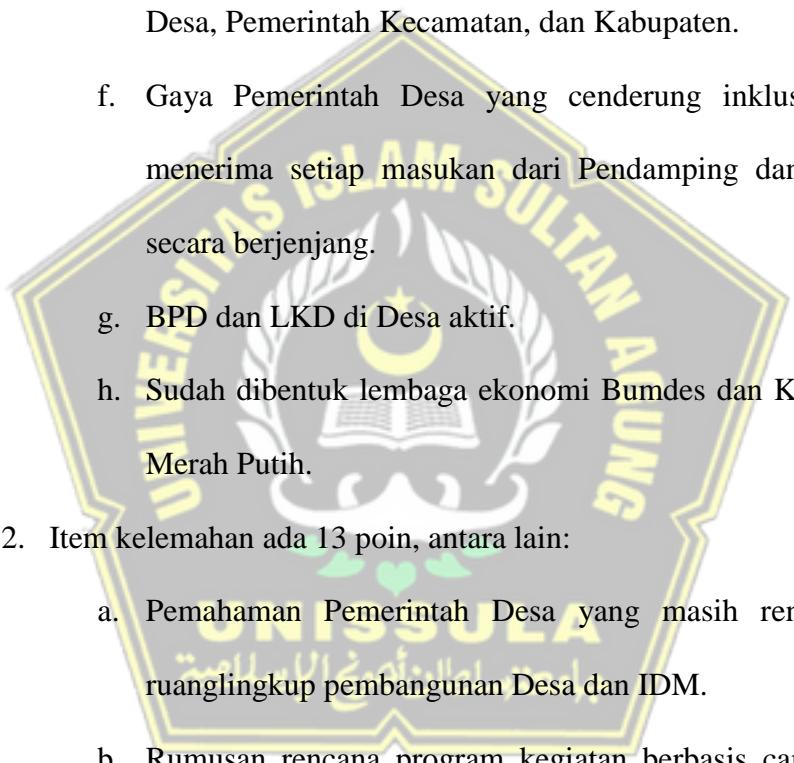
Seperti disebutkan oleh Riyanto (Riyanto et al., 2021) bahwa analisis SWOT dilakukan untuk membangun dan memanfaatkan kekuatan organisasi, memperbaiki dan menghentikan kelemahan organisasi, memprioritaskan dan mengoptimalkan peluang, serta melawan dan meminimalisasi ancaman yang dihadapi organisasi.

Oleh karena itu, dari hasil identifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal Desa yang sudah dilakukan diatas, maka lebih lanjut akan dilakukan kategorisasi daftar kekuatan dan kelemahan yang ada sekarang, serta peluang dan ancaman dimasa depan.

5.4.1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal tersebut diatas, maka lebih lanjut akan diidentifikasi bagian yang menjadi daftar kekuatan dan kelemahan dari organisasi Pemerintah Desa Waimi.

1. Item kekuatan yang teridentifikasi ada 8 poin, antara lain :
 - a. Ketersediaan sumberdaya Pemerintah Desa dalam mengelola pembangunan berskala Desa.

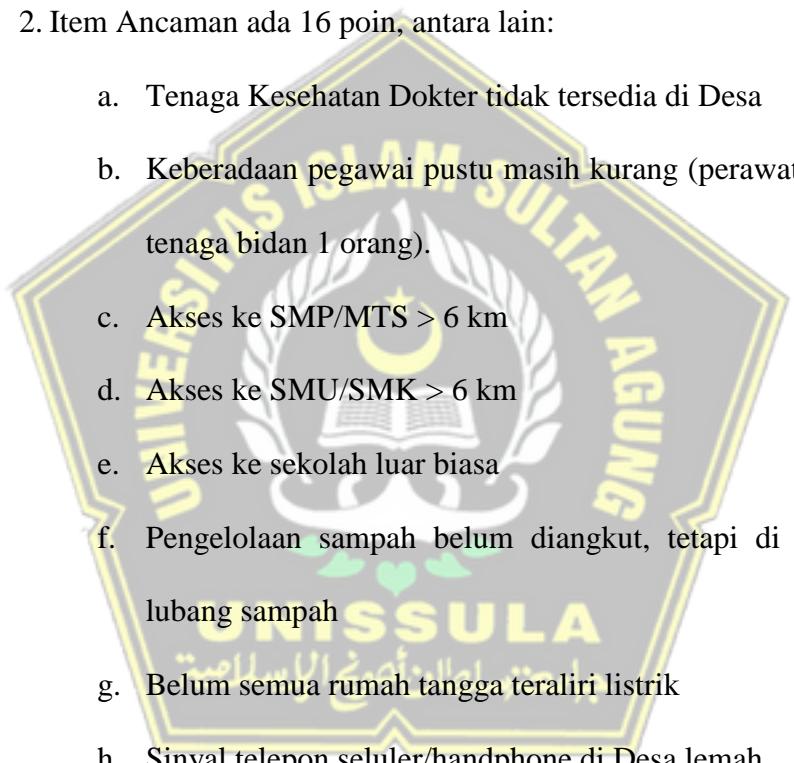
- 
- b. Desa rutin menyusun perencanaan jangka menengah Desa (RPJMDes).
 - c. Desa rutin menyusun perencanaan tahunan Desa (RKPDes).
 - d. Desa rutin menyusun perencanaan anggaran kegiatan Desa(APBDes).
 - e. Adanya kerjasama dan kemitraan yang baik dengan Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Kabupaten.
 - f. Gaya Pemerintah Desa yang cenderung inklusif dan mau menerima setiap masukan dari Pendamping dan Pemerintah secara berjenjang.
 - g. BPD dan LKD di Desa aktif.
 - h. Sudah dibentuk lembaga ekonomi Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Item kelemahan ada 13 poin, antara lain:
- a. Pemahaman Pemerintah Desa yang masih rendah tentang ruang lingkup pembangunan Desa dan IDM.
 - b. Rumusan rencana program kegiatan berbasis capaian kinerja IDM yang masih rendah.
 - c. Pemahaman Desa akan pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa yang masih rendah.
 - d. Dukungan Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan Bumdes belum ada.
 - e. Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu masih jauh.

- f. Persentase warga memiliki BPJS kesehatan masih rendah.
- g. Desa belum memiliki taman bacaan/perpustakaan Desa.
- h. Desa belum memiliki pusat ketrampilan/kursus.
- i. Desa tidak memiliki fasilitas atau lapangan olahraga.
- j. Desa tidak memiliki kelompok kegiatan olahraga.
- k. Kantor Desa tidak memiliki fasilitas jaringan internet.
- l. Desa tidak memiliki poskamling.
- m. Desa belum memiliki tindakan terhadap potensi bencana (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)

5.4.2. Analisis Peluang dan Ancaman

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor ekternal tersebut diatas, maka lebih lanjut akan diidentifikasi bagian yang menjadi daftar peluang dan ancaman dari Desa Waimi.

- 1. Item Peluang ada 9 poin, antara lain:
 - a. Terdapat Pustu dan aktifitas pelayanan Pustu.
 - b. Ada Tower BTS di Desa
 - c. Lingkungan masyarakat Desa yang ramah.
 - d. Budaya gotong royong yang masih tinggi.
 - e. Ketersediaan SDM dan SDA dalam mendukung program pembangunan Desa
 - f. Adanya kebijakan kementerian desa tentang perencanaan Desa berbasis IDM.

- 
- g. Adanya pendampingan oleh Pendamping Desa dalam setiap tahapan pembangunan di Desa.
 - h. Adanya proses evaluasi perencanaan program dan anggaran Desa yang rutin, baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten.
 - i. Ketersediaan dukungan pendanaan pembangunan Desa yang cukup (APBN dan APBD).
2. Item Ancaman ada 16 poin, antara lain:
- a. Tenaga Kesehatan Dokter tidak tersedia di Desa
 - b. Keberadaan pegawai pustu masih kurang (perawat 1 orang dan tenaga bidan 1 orang).
 - c. Akses ke SMP/MTS > 6 km
 - d. Akses ke SMU/SMK > 6 km
 - e. Akses ke sekolah luar biasa
 - f. Pengelolaan sampah belum diangkut, tetapi di bakar dalam lubang sampah
 - g. Belum semua rumah tangga teraliri listrik
 - h. Sinyal telepon seluler/handphone di Desa lemah
 - i. Belum ada industri mikro dan kecil di Desa
 - j. Keberadaan warung kelontong di Desa sangat minim (baru 1 unit)
 - k. Belum terdapat pasar di Desa
 - l. Belum terdapat kedai makan, restoran, hotel, dan penginapan di Desa

- m. Tidak terdapat kantor pos/jasa logistic di Desa
- n. Tidak tersedia lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta) di Desa
- o. Tidak ada akses penduduk ke layanan kredit
- p. Transportasi umum ada tapi tanpa trayek tetap

Berdasarkan identifikasi dan pengelompokan indikator-indikator dari faktor-faktor tersebut diatas, lebih lanjut akan dimasukkan dalam tabel IFAS dan EFAS untuk mengukur bobot dan rating dari tiap-tiap item yang ada. Seperti sudah dijelaskan diatas, pengukuran atau memberian nilai pada bobot dan rating pada penelitian ini sangat tergantung dari keterkaitan item-item pengukuran terhadap pengaruh kinerja IDM. Ada yang bersifat laungsung, ada item-item yang bersifat mendukung.

Item-item yang berpengaruh secara langsung terhadap skor nilai IDM akan diberikan bobot maksimal, dengan rating disesuaikan dengan rentang skala nilai yang diperoleh sesuai skor IDM yang ada. Penilaian ini berlaku baik bagi faktor-faktor internal, maupun faktor-faktro eksternal. Berikut disajikan tabel IFAS dan EFAs sesuai hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 5.4
Analisis IFAS Terhadap Kinerja IDM Desa Waimi

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL					
No	Kekuatan/Strength (S)	Bobot	Rating	Skor	
1	Ketersediaan sumberdaya Pemerintah Desa dalam mengelola pembangunan berskala Desa.	0,06	3,50	0,21	
2	Desa rutin menyusun perecanaan jangka menengah (RPJMDes)	0,05	3,50	0,19	
3	Desa rutin menyusun perencanaan tahunan Desa(RKPDes).	0,05	3,00	0,16	
4	Desa rutin menyusun APBDes.	0,05	3,50	0,19	
5	Adanya kerjasama dan kemitraan yang baik dengan Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.	0,05	3,50	0,16	
6	Gaya dan sikap Pemerintah Desa yang inklusif dan mau menerima setiap masukan dari Pendamping dan Pemerintah secara berjenjang	0,04	3,00	0,12	
7	BPD dan LKD aktif	0,04	3,50	0,14	
8	sudah dibentuk lembaga ekonomi (Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih)	0,05	2,00	0,11	
Sub Total		0,40		1,27	
No	Kelemahan/Weakness	Bobot	Rating	Skor	
1	Pemahaman Pemerintah Desa yang masih rendah tentang ruang lingkup pembangunan Desa dan IDM.	0,05	3	0,13	
2	Rumuskan rencana program kegiatan berbasis capaian kinerja IDM yang masih rendah	0,05	3,5	0,16	
3	Pemahaman Desa akan pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa yang masih rendah	0,04	2,5	0,09	
4	Dukungan Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan belum ada.	0,05	2,5	0,11	
5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu masih jauh	0,05	4	0,20	
6	prosentase warga Desa memiliki layanan BPJS kesehatan masih rendah.	0,05	3,5	0,16	

7	Desa belum memiliki taman bacaan/perpustakaan Desa	0,05	2	0,10
8	Desa belum memiliki pusat ketrampilan/kursus	0,05	2	0,10
9	Desa tidak memiliki fasilitas atau lapangan olahraga	0,05	4	0,20
10	Desa tidak memiliki kelompok kegiatan olahraga	0,05	4	0,20
11	Kantor Desa tidak memiliki fasilitas jaringan internet	0,05	3	0,15
11	Desa tidak memiliki poskamling	0,05	3	0,15
12	Desa belum memiliki tindakan terhadap potensi bencana (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	0,05	4	0,20
Sub Total		0,60		1,97
Total Skor		1,000		-0,76

Tabel 5.5
Analisis EFAS Kinerja IDM Desa Waimi

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL					
No	PELUANG/OPPORTUNITIES (O)	Bobot	Rating	Skor	
1	Terdapat Pustu dan aktifitas pelayanan Pustu.	0,04	3,50	0,14	
2	Ada Tower BTS di Desa	0,04	2,50	0,10	
3	Lingkungan masyarakat Desa yang ramah.	0,03	3,00	0,09	
4	Budaya gotong royong yang masih tinggi.	0,03	3,00	0,09	
5	Ketersediaan SDM dan SDA dalam mendukung program pembangunan Desa	0,04	3,50	0,14	
6	Adanya kebijakan Kementerian Desa tentang perencanaan Desa berbasis IDM	0,04	3,50	0,14	
7	Adanya pendampingan oleh Pendamping Desa dalam setiap tahapan pembangunan di Desa.	0,04	3,50	0,14	

8	Adanya proses evaluasi perencanaan program dan anggaran Desa yang rutin, ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten	0,04	3,50	0,14
9	Ketersediaan dukungan pendanaan pembangunan Desa yang cukup (APBN dan APBD)	0,04	3,50	0,14
SUB TOTAL		0,34		1,14
No	ANCAMAN/THREATS (T)	Bobot	Ratintg	Skor
1	Tenaga Kesehatan Dokter tidak tersedia di Desa	0,04	3,00	0,12
2	Keberadaan pegawai pustu masih kurang (perawat 1 orang dan tenaga bidan 1 orang)	0,04	2,50	0,10
3	Akses ke SMP/MTS > 6 km	0,04	1,00	0,04
4	Akses ke SMU/SMK > 6 km	0,04	4,00	0,16
5	akses ke Sekolah Luar Biasa jauh	0,04	2,00	0,08
6	Pengelolaan sampah belum diangkut, tetapi di bakar dalam lubang sampah	0,04	1,00	0,04
7	Belum semua rumah tangga teraliri listrik	0,04	1,00	0,04
8	Sinyal telepon seluler/handphone di Desa lemah	0,04	2,50	0,10
9	Belum ada industri mikro dan kecil di Desa	0,04	3,00	0,12
10	Keberadaan warung kelontong di Desa sangat minim (baru 1 unit)	0,04	3,00	0,12
11	Belum terdapat pasar di Desa	0,04	3,00	0,12
12	Belum terdapat kedai makan, restoran, hotel, dan penginapan di Desa	0,04	4,00	0,16
13	Tidak terdapat kantor pos/jasa logistic di Desa	0,04	4,00	0,16
14	Tidak tersedia lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta) di Desa	0,04	4,00	0,16
15	Tidak ada akses penduduk ke layanan kredit	0,04	3,50	0,14
16	Transportasi umum ada tapi tanpa trayek tetap	0,04	2,00	0,08
SUB TOTAL		0,66		1,78
TOTAL SCOR		1,00		-0,65

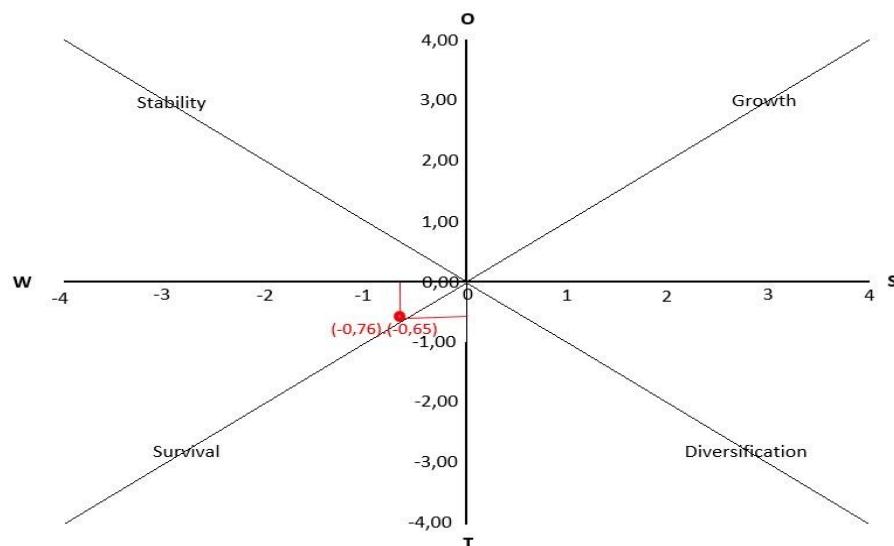
5.4.3. Analisis Diagram SWOT

Berdasarkan nilai IFAS dan EFAS tersebut maka selanjutnya akan digambarkan diagram SWOT. Diagram SWOT ini akan menunjukkan posisi serta kondisi Desa Waimi terhadap kinerja IDM yang ada berdasar perhitungan nilai IFAS dan EFAS.

Untuk menggambar diagram SWOT maka perlu memperhatikan posisi garis koordinat kartesius yang merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan hasil perhitungan faktor internal dan sumbu Y merupakan faktor eksternal.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa skor IFAS adalah (-0,76), dan skor EFAS adalah (-0,65). Dari kedua skor ini maka selanjutnya akan dimasukkan dalam diagram SWOT.

Gambar 5.1
Diagram Analisis SWOT Terhadap Kinerja 29 Indikator
IDM Desa Waimi



Setelah dimasukkan dalam diagram SWOT terbaca pada titik koordinat X,Y dengan nilai negatif-negatif. Negative untuk sumbu X dan negative untuk sumbu Y. Dari titik koordinat ini maka posisi Desa Waimi berada pada kuadran IV. Hal ini mengandung arti bahwa:

1. Menghadapi isu capaian kinerja IDM yang selama ini masih rendah, Des Waimi memiliki posisi tawar yang lemah dan memiliki ancaman atau tantangan yang besar.
2. Desa Waimi direkomendasikan untuk menjalankan strategi survival/defensif/bertahan. Hal ini dikarenakan posisi Desa dalam menghadapi kinerja IDM yang rendah berada dalam posisi dilematis dan memiliki banyak persoalan atau kelemahan internal.
3. Desa Waimi diharapkan melakukan strategi bertahan untuk mengontrol kinerja internal agar capaian kinerja IDM tidak semakin memburuk. Strategi ini dipertahankan secara berkesinambungan serta Desa Waimi melakukan perbaikan secara internal untuk mengurangi dampak negative yang mengakibatkan kinerja IDM masih rendah.

Titik koordinat sebagai arti posisi Desa Waimi terhadap capaian kinerja IDM yang rendah selama kurang lebih lima (5) tahun ini menjadi sesuatu yang wajar. Sangat relevan dengan kondisi data yang ada. Bahwa ada begitu banyak kelemahan dan ancaman yang ada yang menyebabkan Desa Waimi belum mampu menaikkan kinerja IDM selama ini, dan yang berdampak pada tidak berubahnya status kemajuan Desa Waimi selama lima tahun terakhir.

5.4.4. Analisis Matriks SWOT

Evaluasi terhadap capaian kinerja IDM Desa Waimi sudah dilakukan. Baik berkaitan dengan analisis IFAS dan EFAS, maupun analisis diagram SWOT. Kedua analisis ini sudah memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai kondisi dan posisi Dewa Waimi yang cukup dilematis. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang ada perlu ditindaklanjuti dengan rumusan-rumusan strategi sebagai upaya strategis menyelesaikan persoalan kinerja pembangunan Desa yang ada.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, rangkuty (1997) menjelaskan matriks SWOT sebagai *tools* yang mengkombinasikan faktor internal (kekuatan-kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang-ancaman) sebagai upaya penyesuaian dalam mempermudah organisasi dalam merumuskan berbagai potensi alternatif strategi yang dapat diambil. Paling tidak matriks ini membantu mengembangkan 4 jenis strategi yaitu:

1. S-O (kekuatan-peluang/*strength-opportunities*)
2. W-O (kelemahan-peluang/*weaknesses-opportunities*)
3. S-T (kekuatan-ancaman/*strength-threats*)
4. W-T.(kelemahan-ancaman/*weaknesses-threats*)

Tabel 5.6
Matriks SWOT

SW	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	<p>1 Ketersediaan sumberdaya Pemerintah Desa dalam mengelola pembangunan berskala Desa.</p> <p>2 Desa rutin menyusun perencanaan jangka menengah (RPJMDes)</p> <p>3 Desa rutin menyusun perencanaan tahunan Desa(RKPDes).</p> <p>4 Desa rutin menyusun APBDes.</p> <p>5 Adanya kerjasama dan kemitraan yang baik dengan Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.</p> <p>6 Gaya dan sikap Pemerintah Desa yang inklusif dan mau menerima setiap masukan dari Pendamping dan Pemerintah secara berjenjang</p> <p>7 BPD dan LKD aktif</p> <p>.</p> <p>8 sudah dibentuk lembaga ekonomi (Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih)</p>	<p>1 Pemahaman Pemerintah Desa yang masih rendah tentang ruang lingkup pembangunan Desa dan IDM.</p> <p>2 Rumuskan rencana program kegiatan berbasis capaian kinerja IDM yang masih rendah</p> <p>3 Pemahaman Desa akan pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa yang masih rendah</p> <p>4 Dukungan Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan Bumdes belum ada.</p> <p>5 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu masih jauh</p> <p>6 prosentase warga Desa memiliki layanan BPJS kesehatan masih rendah.</p> <p>7 Desa belum memiliki taman bacaan/perpustakaan Desa</p> <p>8 Desa belum memiliki pusat ketramilan/kursus</p> <p>9 Desa tidak memiliki fasilitas atau lapangan olahraga</p> <p>1 Desa tidak memiliki kelompok kegiatan olahraga</p> <p>0</p> <p>1 Kantor dengan belum memiliki fasilitas internet</p> <p>1 Desa tidak memiliki poskamling</p> <p>2</p> <p>.</p> <p>1 Desa belum memiliki tindakan terhadap potensi bencana (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)</p>
OT		
OPPORTUNITY (O)	<p>STRATEGI SO</p> <p>1 Penguatan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes) berbasis kinerja IDM sesuai kebijakan Kementerian Desa (S-1,2,3;O-6,7,8)</p> <p>2 Fokus penggunaan Dana Desa diarahkan bagi pemenuhan prioritas program dan kegiatan berbasis IDM (S-3,4;O-9)</p> <p>3 Melakukan koordinasi Ke Dinas Kesehatan dalam rangka penempatan tambahan tenaga medis (Bidan dan Perawat) di Pustu yang ada. (S-1,7;O-1)</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>1 mendorong terlaksananya forum-forum penguatan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, dan LKD berbasis literasi IDM kedalam perencanaan Desa (W-1,2,4;O-5,6,7,9)</p> <p>2 mendorong terlaksananya forum-forum penguatan kapasitas dan pendampingan Bumdes dan kelompok ekonomi masyarakat, terkait pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa (W-4;O-3,4,6,7,9)</p> <p>3 Koordinasi dan koordinasi terkait pelayanan terpadu antara Pustu, Poskesdesa, dan Polindes (W-5;O-1,5,7,9)</p>

<p>4. Budaya gotong royong yang masih tinggi.</p> <p>5. Ketersediaan SDM dan SDA dalam mendukung program pembangunan Desa</p> <p>6. Adanya kebijakan Kementerian Desa tentang perencanaan Desa berbasis IDM</p> <p>7. Adanya pendampingan oleh Pendamping Desa dalam setiap tahapan pembangunan di Desa.</p> <p>8. Adanya proses evaluasi perencanaan program dan anggaran Desa yang rutin, ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten</p> <p>9. Ketersediaan dukungan pendanaan pembangunan Desa yang cukup (APBN dan APBD)</p>	<p>4 Berkoordinasi dengan Pemda agar mengaktifkan fungsi tower BTS yang ada di Desa (S-1,7;O-2)</p> <p>5 Mendayagunakan Pendamping Desa secara berjenjang untuk melakukan asistensi dan pengarahan pembangunan Desa berbasis IDM, baik dalam proses faasilitasi dan evaluasi perencanaan Desa (S-2,3,4,5,6;O-7,8)</p> <p>6 mendorong peran kelembagaan yang ada di Desa, baik BPD maupun LKD berperan aktif merencanakan dan mengevaluasi pembangunan Desa berbasis IDM (S-1,2,3,4,7;O-6.)</p> <p>7 memberdayakan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka mengisi kekosongan aktifitas pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal Desa (S-8;O-5,6,9)</p>	<p>4 Melakukan Kordinasi tentang penambahan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Desa (W-6;O6,7,8,9)</p> <p>5 Melakukan perencanaan pembangunan taman baca/perpustakaan Desa dengan menggunakan Dana Desa dan pengembangan aneka kursus di Desa (W-1,7,8;O-4,5,6,7,9)</p> <p>6 Melakukan perencanaan pembangunan fasilitasi olah raga Desa dengan menggunakan Dana Desa, sekaligus pembinaan kelompok olah raga yang ada di Desa(W-1,9;O-3,4,5,6,7,9)</p> <p>7 Melakukan perencanaan pemasangan fasiitas internet di kantor Desa, kebijakan ini selaras dengan kebijakan Kementerian Desa tentang fokus penggunaan dana desa untuk percepatan Desa digital (W-1,11;O-5,6,7,9)</p> <p>8 Melakukan perencanaan pembangunan Poskamling Desa dengan menggunakan ADD dan swadaya masyarakat (W-1,12;O-4,5,6,7,9)</p> <p>9 Melakukan konsolidasi dan perencanaan desa tanggap bencana, terhadap potensi bencana yang ada di Desa (W-1,13;O-4,5,6,7,9)</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>1. Tenaga Kesehatan Dokter tidak tersedia di Desa</p> <p>2. Keberadaan pegawai pustu masih kurang (perawat 1 orang dan tenaga bidan 1 orang)</p> <p>3. Akses ke SMP/MTS > 6 km</p> <p>4. Akses ke SMU/SMK > 6 km</p> <p>5. akses ke Sekolah Luar Biasa jauh</p> <p>6. Pengelolaan sampah belum diangkut, tetapi dibakar dalam lubang sampah</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>1 berkoordinasi dengan Pemda terkait penempatan Dokter di Desa, begitu juga dengan penambahan tenaga medis bidan dan perawat untuk ditempatkan di Pustu (S-2,3,5;T-1)</p> <p>2 berkoordinasi dengan Pemda terkait masih jauhnya akses masyarakat ke SMP/SMA/Sederajat, dan SLB dari wilayah Desa (S-2,3,5;T-3,4,5)</p> <p>3 Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemda terkait pengangkutan sampah dari Desa, sekaligus konsolidasi komitmen semua unsur lewat Musdes dalam mengorganisir aktifitas pengelolaan sampah di Desa (S-1,2,3,4,5;7 ; T-6)</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>adanya motivasi bagi Pemdes, BPD, LKD, dan semua unsur masyarakat untuk lebih memahami ruanglingskup pembangunan Desa berbasi IDM, baik diaspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (W-1 s/d 13 ; T-1 s/d 16)</p> <p>Adanya motivasi bagi Pemdes, BPD, LKD, dan semua unsur masyarakat untuk berpikir kompetitif dalam pengelolaan</p>

<p>7. Belum semua rumah tangga teraliri listrik</p> <p>8. Sinyal telepon seluler/handphone di Desa lemah</p> <p>9. Belum ada industri mikro dan kecil di Desa</p> <p>1. Keberadaan warung kelontong di Desa sangat minim (baru 1 unit)</p> <p>1. Belum terdapat pasar di Desa</p> <p>1. Belum terdapat kedai makan, restoran, hotel, dan penginapan di Desa</p> <p>1. Tidak terdapat kantor pos/jasa logistic di Desa</p> <p>1. Tidak tersedia lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta) di Desa</p> <p>1. Tidak ada akses penduduk ke layanan kredit</p> <p>1. Transportasi umum ada tapi tanpa trayek tetap</p>	<p>4 Pemdes mengusulkan pemasangan meteran bagi rumah tangga yang membutuhkan baik melewati mekanisme perencanaan Kabupaten (DU), koordinasi dengan OPD terkait, dan perencanaan Desa (S-1,2,3,4,5,7 ; T-7)</p> <p>5 Pemdes berkoordinasi dengan Pemda terkait penguatan aktifan jaringan internet Desa (S-1,2,3,4,5 ; T-8)</p> <p>6 Pemdes, BPD, LKD bersepakat dalam forum musdes untuk menyusun paket kebijakan ekonomi Desa yang dapat menstimulus pertumbuhan industri mikro dan kecil di Desa (S-1,2,3,4,5,7,8 ; T-9,10,11,12)</p> <p>7 Membuka unit usaha di Bumdes atau Koperasi berkaitan dengan jasa logistik di Desa (S-2,3,4,8 ; T-13)</p> <p>8 Pemdes memfasilitasi kemitraan Bumdes atau Koperasi dengan lembaga keuangan lainnya untuk membuka akses penduduk ke layanan kredit (S-1,2,3,4,8 ; T-14,15)</p> <p>9 Pemdes mengkoordinasikan kemitraan dengan pengusaha angkutan umum untuk memasang trayek tetap yang melewati Desa Waimi (S-1,2,3,4,5,7 ; T-16)</p>	<p>pembangunan Desa (W-1 s/d 13 ; T-1 s/d 16)</p> <p>3 Terbuka dan mau bermitra dengan lembaga-lembaga terkait dalam konteks pembangunan Desa berbasis IDM (W-1 s/d 13 ; T-1 s/d 16)</p>	

5.5. FORMULASI STRATEGI

Formulasi strategi merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat dimbil dan menguntungkan bagi Desa dalam konteks peningkatan capaian IDM kedepan. Alternatif pilihan kebijakan ini merupakan pengembangan dari analis-analisis terdahulu, khususnya tindak lanjut dari empat strategi hasil Matriks Swot seperti tersebut dalam tabel 5.6

Berangkat dari kajian empat alternatif strategi seperti tersebut dari tabel 5.6, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Dari sekian alternatif strategi yang bisa diambil oleh organisasi Desa atau Pemerintah Desa, perlu memperhatikan aspek kewenangan yang ada. Ada yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa. Atas dasar kewenangan ini, Desa bisa secara langsung mengimplementasikan strategi tersebut. Ada juga yang merupakan kewenangan supra Desa. Terhadap kondisi ini, Desa dapat berkordinasi dengan OPD atau instansi terkait dalam pelaksanaannya.
2. Strategi-strategi tersebut diatas ketika dilaksanakan, ada yang langsung berpengaruh terhadap bobot nilai IDM, ada yang tidak langsung berdampak pada bobot nilai tetapi bersifat strategi pendukung saja.
3. Dari aspek waktu dan kemudahan pelaksanaan, ada strategi yang dalam jangka pendek dan langsung berdampak pada bobot nilai IDM dan mudah dilakukan, tetapi ada juga strategi yang membutuhkan waktu lama, tidak mudah dilakukan, serta relatif lama baru menciptakan sebuah kondisi yang mana berdampak pada bobot nilai IDM.

Mengingat bahwa formulasi strategi menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjawab masalah rendahnya kinerja IDM di Desa Waimi, maka tiga hal tersebut diatas akan menjadi pertimbangan detail rumusan perencanaan strategi jangka pendek dan menengah, serta

dampaknya terhadap kinerja IDM dan perkembangan kemajuan dan kemandirian status Desa Waimi

5.5.1. Strategi Menuju Status Desa Berkembang

Untuk memenaikan status kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi dari “ tertinggal” ke “berkembang”, maka ada beberapa kemungkinan strategi kebijakan yang bisa dilakukan. Salah satu strategi yang relative mudah untuk dilakukan oleh Desa Waimi adalah strategi kebijakan yang langsung berpengaruh terhadap menaikan bobot nilai IDM. Strategi ini merupakan strategi praktis jangka pendek.

1. Strategi WO-3 (Koordinasi dan konsolidasi terkait pelayanan terpadu antara Pustu, Poskesdesa, dan Polindes (W-5;O-1,5,7,9)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka pendek bisa direncanakan untuk dilaksanakan, dan merupakan kebijakan yang relatif mudah untuk dilakukan oleh Desa Waimi untuk menjawab persoalan masih jauhnya akses masyarakat Desa ke poskesdes, polindes dan posyandu. Mengingat posisi Pustu yang berada di Desa. Pelaksanaan kebijakan ini secara langsung dapat mengubah bobot point indikator no 3 (tabel 5.1). yang semula bobot nilai “1” bisa langsung berubah ke “5”.
2. Strategi WO-9 (Melakukan konsolidasi dan perencanaan desa tanggap bencana, terhadap potensi bencana yang ada di Desa (W-1,13;O-4,5,6,7,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan lokal Desa. Dalam jangka pendek bisa direncanakan untuk dilaksanakan, dan merupakan

kebijakan yang relatif mudah untuk dilakukan oleh Desa Waimi untuk menjawab persoalan diatas. Pelaksanaan kebijakan ini secara langsung dapat mengubah bobot point indikator no 29 (tabel 5.1). yang semula bobot nilai “0” bisa langsung berubah ke “3” jika Pemdes memprogramkan pencanangan jalur evakuasi, bisa ke “5” jika ditambahkan program pengadaan perlengkapan keselamatan dan peringatan dini kebencanaan.

Dengan memilih salah satu dari dua program diatas, maka dalam jangka pendek, Desa Waimi sudah berhasil menaikan Status Desa dari tertinggal ke Desa Berkembang. Dengan asumsi bahwa Desa Waimi memilih kebijakan nomor 2, yaitu pada aspek ketahan lingkungan. Maka dapat disimulasikan sebagai berikut :

Gambar 5.2
Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Berkembang

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

$$\begin{aligned} \text{IKS} &= \frac{\text{Total Skor IKS}}{\text{Nilai Maksimum IKS}} \\ \text{IKS} &= \frac{119}{175} \\ \text{IKS} &= 0,680 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKE} &= \frac{\text{Total Skor IKE}}{\text{Nilai Maksimum IKE}} \\ \text{IKE} &= \frac{26}{60} \\ \text{IKE} &= 0,4333 \end{aligned}$$

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

$$\begin{aligned} IKL &= \frac{\text{Total Skor IKL}}{\text{Nilai Maksimum IKL}} \\ IKL &= \frac{15}{15} \\ IKL &= 1,000 \end{aligned}$$

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 X = Indikator (X)

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Keterangan :

- IDM = Indeks Desa Membangun
- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
- IKS = Indeks Ketahanan Sosial

$$\begin{aligned} IDM &= \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS) \\ IDM &= \frac{1}{3} (0,680 + 0,433 + 1,00) \\ IDM &= \frac{1}{3} 2,113 \\ IDM &= \frac{2,113}{3} \\ IDM &= 0,704 \end{aligned}$$

Dari simulasi yang dilakukan terhadap kemungkinan satu kebijakan sederhana yang dilakukan, terihat pada tabel diatas bahwa ada perubahan pada skor ketahanan lingkungan. Ketika kebijakan ini dilaksanakan, ada penambahan 1 poin di aspek ketahanan lingkungan. Dari semula total skor

IKL sebesar “14”, naik menjadi “15”. (bandingkan dengan skor IKL pada tabel 4.8).

Dengan skor IDM sebesar “0.704” berarti berada pada skala diatas “0,5989” dan dibawah “0,7072”, bahkan hampir menyentuh batas atas kategori Desa Berkembang. Dengan demikian, dengan hanya menaikan sedikit bobot nilai di aspek ketahanan lingkungan (IKL), Desa waimi sudah berhasil keluar dari status Desa Tertinggal, yang selama lima tahun terakhir di sandang oleh Desa Waimi.

Dalam rangka mengkosolidasikan strategi ini, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan pendukung. Antara lain:

1. Strategi SO-1 (Penguatan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes) berbasis kinerj IDM sesuai kebijakan Kementerian Desa (S-1,2,3;O-6,7,8)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa. Kebijakan yang sifatnya jangka menengah dan pendek. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah untuk mendorong Pemdes, dan khususnya tim perumus RPJMDes dan RKPDes untuk melakukan pencermatan terhadap dokumen IDM sebagai salah satu basis perencanaan Desa. Hal ini dimaksudkan agar strategi kebijakan program berbasis IDM terumus dalam dokumen legal perencanaan Desa.
2. Strategi SO-2 (Fokus penggunaan Dana Desa diarahkan bagi pemenuhan prioritas program dan kegiatan berbasis IDM (S-3,4;O-9)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah

untuk mendorong Pemdes dalam menganggarkan focus penggunaan dana desa bagi pemenuhan program berbasis IDM dalam postur APBDes.

3. Strategi SO-6 (Mendorong peran kelembagaan yang ada di Desa, baik BPD maupun LKD berperan aktif merencanakan dan mengevaluasi pembangunan Desa berbasis IDM (S-1,2,3,4,7;O-6,)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah untuk mendorong setiap kelembagaan yang ada di Desa bersama-sama memahami ruang lingkup IDM, serta berpartisipasi mengawal pelaksanaannya dalam setiap tahapan pembangunan Desa. Khususnya dalam forum musdes sebagai forum representatif warga Desa dan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan strategis di tingkat Desa.

5.5.2. Strategi Menuju Status Desa Maju

Berangkat dari simulasi menuju Desa berkembang di atas, pada dasarnya skor IDM Desa Waimi sudah berada pada titik atas ambang batas nilai untuk Desa berkembang. Artinya bahwa dengan menjalankan satu atau dua program yang berpengaruh langsung terhadap skor IDM, dapat dipastikan bahwa Desa Waimi dapat bergerak menuju Desa Maju. Masih berangkat dari pikiran mencari strategi yang relative mudah untuk dilakukan oleh Desa Waimi, dan yang langsung berpengaruh terhadap menaikkan bobot nilai IDM. Strategi ini merupakan strategi praktis jangka pendek.

Strategi WO-3 (Koordinasi dan konsolidasi terkait pelayanan terpadu antara Pustu, Poskesdesa, dan Polindes (W5;O1,5,7,9)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka pendek bisa direncanakan untuk dilaksanakan, dan merupakan kebijakan yang relatif mudah untuk dilakukan oleh Desa Waimi untuk menjawab persoalan masih jauhnya akses masyarakat Desa ke poskesdes, polindes dan posyandu. Mengingat posisi Pustu yang berada di Desa. Pelaksanaan kebijakan ini secara langsung dapat mengubah bobot point indikator no 3 (tabel 5.1). yang semula bobot nilai “1” bisa langsung berubah ke “5”.

Dengan memilih strategi ini, maka dalam jangka pendek, Desa Waimi sudah berhasil menaikan Status Desa dari “simulasi berkembang” ke Desa Maju. Dalam perhitungan IDM dapat disimulasikan sebagai berikut:

Gambar 5.3
Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Maju

$$\text{IKS} = \frac{\text{Total Skor IKS}}{\text{Nilai Maksimum IKS}}$$
$$\text{IKS} = \frac{123}{175}$$
$$\text{IKS} = 0,703$$

$$\text{IKE} = \frac{\text{Total Skor IKE}}{\text{Nilai Maksimum IKE}}$$
$$\text{IKE} = \frac{26}{60}$$
$$\text{IKE} = 0,4333$$

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

$$IKL = \frac{\text{Total Skor IKL}}{\text{Nilai Maksimum IKL}}$$

$$IKL = \frac{15}{15}$$

$$IKL = 1,000$$

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Keterangan :

IDM = Indeks Desa Membangun

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

$$IDM = \frac{1}{3} (0,703 + 0,433 + 1,00)$$

$$IDM = \frac{1}{3} 2,136$$

$$IDM = \frac{2,136}{3}$$

$$IDM = 0,712$$

Dari simulasi yang dilakukan terhadap kemungkinan satu kebijakan sederhana yang dilakukan, terihat pada tabel diatas bahwa ada perubahan pada skor ketahanan sosial. Yang semula total skor IKS “119”, berubah naik menjadi “123”. Ada kenaikan 4 point. Dengan adanya kenaikan skor IKS ini, maka skor IDM secara keseluruhan naik dari “0,704” menjadi “712”.

Dengan skor IDM sebesar “0.712” sudah melewati ambang batas atas skala kategori Desa berkembang, yaitu “0,7072”. Dengan demikian, strategi kebijakan ini, sudah berhasil menaikan status Desa Waimi dari tertinggal, atau dari berkembang (sesuai hasil simulasi) menuju Desa Maju.

Dalam rangka mengkosolidasikan strategi ini, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan pendukung. Antara lain:

1. Strategi SO-1 (Penguatan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes) berbasis kinerj IDM sesuai kebijakan Kementerian Desa (S-1,2,3;O-6,7,8)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa. Kebijakan yang sifatnya jangka menengah dan pendek. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah untuk mendorong Pemdes, dan khususnya tim perumus RPJMDes dan RKPDes untuk melakukan pencermatan terhadap dokumen IDM sebagai salah satu basis perencanaan Desa. Hal ini dimaksudkan agar strategi kebijakan program berbasis IDM terumus dalam dokumen legal perencanaan Desa.
2. Strategi SO-2 (Fokus penggunaan Dana Desa diarahkan bagi pemenuhan prioritas program dan kegiatan berbasis IDM (S-3,4;O-9)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah untuk mendorong Pemdes dalam menganggarkan focus penggunaan dana desa bagi pemenuhan program berbasis IDM dalam postur APBDes.

3. Strategi SO-6 (Mendorong peran kelembagaan yang ada di Desa, baik BPD maupun LKD berperan aktif merencanakan dan mengevaluasi pembangunan Desa berbasis IDM (S-1,2,3,4,7;O-6,)). Kebijakan ini terkait dengan kewenangan lokal Desa, kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Pelaksanaan strategi kebijakan ini adalah untuk mendorong setiap kelembagaan yang ada di Desa bersama-sama memahami ruang lingkup IDM, serta berpartisipasi mengawal pelaksanaannya dalam setiap tahapan pembangunan Desa. Khususnya dalam forum musdes sebagai forum representatif warga Desa dan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan strategis di tingkat Desa.

5.5.3. Strategi Menuju Status Desa Mandiri

Untuk menaikan status Desa Waimi menuju Desa Mandiri membutuhkan kombinasi strategi yang lebih banyak. Butuh pengawalan tahapan pembangunan yang serius dan konsisten. Bahkan semua elemen Desa Waimi harus dalam posisi satu barisan pemahaman berbasis pembangunan IDM. Bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan juga berarti tidak bisa dilakukan.

Berangkat dari posisi simulasi Desa berkembang diatas, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi menuju Desa mandiri. Untuk aspek IKL sudah berada dalam posisi skor maksimal yaitu poin “1”. Yang perlu lebih lanjut dipertingkat adalah skor IKS “0,703” (nilai skor indikator ”123” dari total

skor maksimal “175”), dan skor IKE “0,433” (nilai skor indikator “26” dari total skor maksimal “60”.

Skor aspek IKE masih sangat rendah. Dibawah 0,5. Dibutuhkan upaya agar skor IKE ini bisa naik sampai skor 0,6. Dengan didukung tambahan sedikit poin di aspek IKS, maka harapan menuju puncak status kemajuan dan kemandiria Desa dapat terwujud. Oleh karena itu, kombinasi strategi untuk menjawab persoalan pembangunan pada aspek IKS dan IKE yang diperlukan.

Pertimbangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah menyangkut aspek kewenangan pengelolaan pembangunan. Untuk memudahkan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, maka strategi-strategi yang bersentuhan langsung dengan kewenangan lokal Desa lebih diprioritaskan. Jika kurang memenuhi, maka kewenangan supra Desa menjadi pilihan kedua, yang tentunya didahului dengan kajian dan estimasi bahwa kebijakan dimaksud bisa direaliasi.

Berikut alternatif strategi menuju Desa Mandiri, dan merupakan strategi yang berdampak langsung pada peningkatan skor IDM, antara lain:

1. Strategi WO-4 (Melakukan Kordinasi tentang penambahan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Desa (W-6;O-6,7,8,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan supra Desa atau instansi lain, dalam hal ini BPJS Kesehatan, tetapi Pemerintah Desa dapat mengusulkan. Melihat peluang yang ada, bahwa usulan Pemerintah Desa untuk menambah kepesertaan BPJS kesehatan (subsidi warga miskin) relative mudah

dilakukan dan peluang untuk diakomodir relative tidak mengalami kendala. Hanya membutuhkan keaktifan perangkat Desa dalam memfasilitasi program dimaksud.

Data eksesting sesuai pemutahiran IDM tahun 2014, kepesertaan BPJS 167 dari 860 jiwa warga Desa. Butuh minimal 75% atau sebesar 646 jiwa yang masuk dalam kepesertaan untuk menaikan bobot skor indikator kepesertaan BPJS Kesehatan dari skor sbelumnya 2 menjadi 5. Tentunya diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun untuk mencapai target tersebut.

2. Strategi WO-5 (Melakukan perencanaan pembangunan taman baca/perpustakaan Desa dengan menggunakan Dana Desa dan pengembangan aneka kursus di Desa (W-1,7,8;O-4,5,6,7,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan lokal Desa dan reratif mudah untuk dilakukan. Ketika kebijakan ini dijalankan tidak hanya menjawab persoalan W-7, tentang taman bacaan, tetapi sekaligus bisa menjawa persoalan W-8 dengan strategi . Taman bacaan dan perpustakaan Desa bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan pusat aneka kursus tingkat Desa.
3. Strategi WO-6 (Melakukan perencanaan pembangunan fasilitasi olah raga Desa dengan menggunakan Dana Desa, sekaligus pembinaan kelompok olah raga yang ada di Desa (W-1,9,10;O-3,4,5,6,7,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan lokal Desa dan reratif mudah

untuk dilakukan. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan W-9 dan W10.

4. Strategi WO-7 (Melakukan perencanaan pemasangan fasilitas internet di kantor Desa, kebijakan ini selaras dengan kebijakan Kementerian Desa tentang fokus penggunaan dana desa untuk percepatan Desa digital (W-1,11;O-5,6,7,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan lokal Desa dan reratif mudah untuk dilakukan, apalagi selaras dengan kebijakan prioritas Kementerian Desa. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan W-11.
5. Strategi WO-8 (Melakukan perencanaan pembangunan Poskamling Desa dengan menggunakan ADD dan swadaya masyarakat (W-1,12;O-4,5,6,7,9)). Kebijakan ini merupakan kewenangan lokal Desa dan reratif tidak mudah untuk dilakukan karena sangat bergantung pada swadaya masyarakat dan penggunaan ADD. ADD merupakan pos anggaran yang bersumber dari alokasi kabupaten ke Desa, kurang lebih 60% sudah ditentukan penggunaannya, 40% berbagi antara operasional Pemdes dan Kelembagaan desa. Jumlah ADD per Desa tidak sebesar DD (sumber APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya butuh sedikit kebijaksanaan untuk mengkombinasikan sedikit pos ADD dan swadaya masyarakat. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan W-12.
6. Strategi ST-1 (berkoordinasi dengan Pemda terkait penempatan Dokter di Desa, begitu juga dengan penambahan tenaga medis bidan dan

perawat untuk ditempatkan di Pustu (S-2,3,5;T-1)). Ini merupakan kewenangan supra Desa. Pemerintah Desa sebatas mengusulkan kebutuhan tersebut ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Selanjutnya kajian dan penempatan tenaga medis sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati. Tentunya, dengan adanya koordinasi yang baik, hubungan komunikasi yang baik dengan OPD terkait, niscaya kebijakan ini bisa direalisasi. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan T-2. Sedangkan untuk menjawab persoalan T-1, mungkin masih membutuhkan waktu yang lama.

7. Strategi ST-4 (Pemdes mengusulkan pemasangan meteran bagi rumah tangga yang membutuhkan baik melewati mekanisme perencanaan Kabupaten (DU), koordinasi dengan OPD terkait, dan perencanaan Desa (S-1,2,3,4,5,7 ; T-7)). Strategi ini bisa menjadi kombinasi antara kewenangan Desa dan usulan ke supra Desa. Dua ruang ini terbuka untuk saling berkolaborasi dalam rangka percepatan penyelesaian masalah pada T-7. Dana Desa bisa dipakai untuk menjawab kegiatan ini dan atau mengusulkan tambahan untuk menyelesaikan target, mengingat sesuai data, masih ada 42 rumah tangga yang belum teraliri listrik. Untuk program yang akan dijalankan oleh Desa, butuh konsolidasi internal. Untuk usulan ke OPD terkait, tentunya butuh advokasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD terkait. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan T-7.

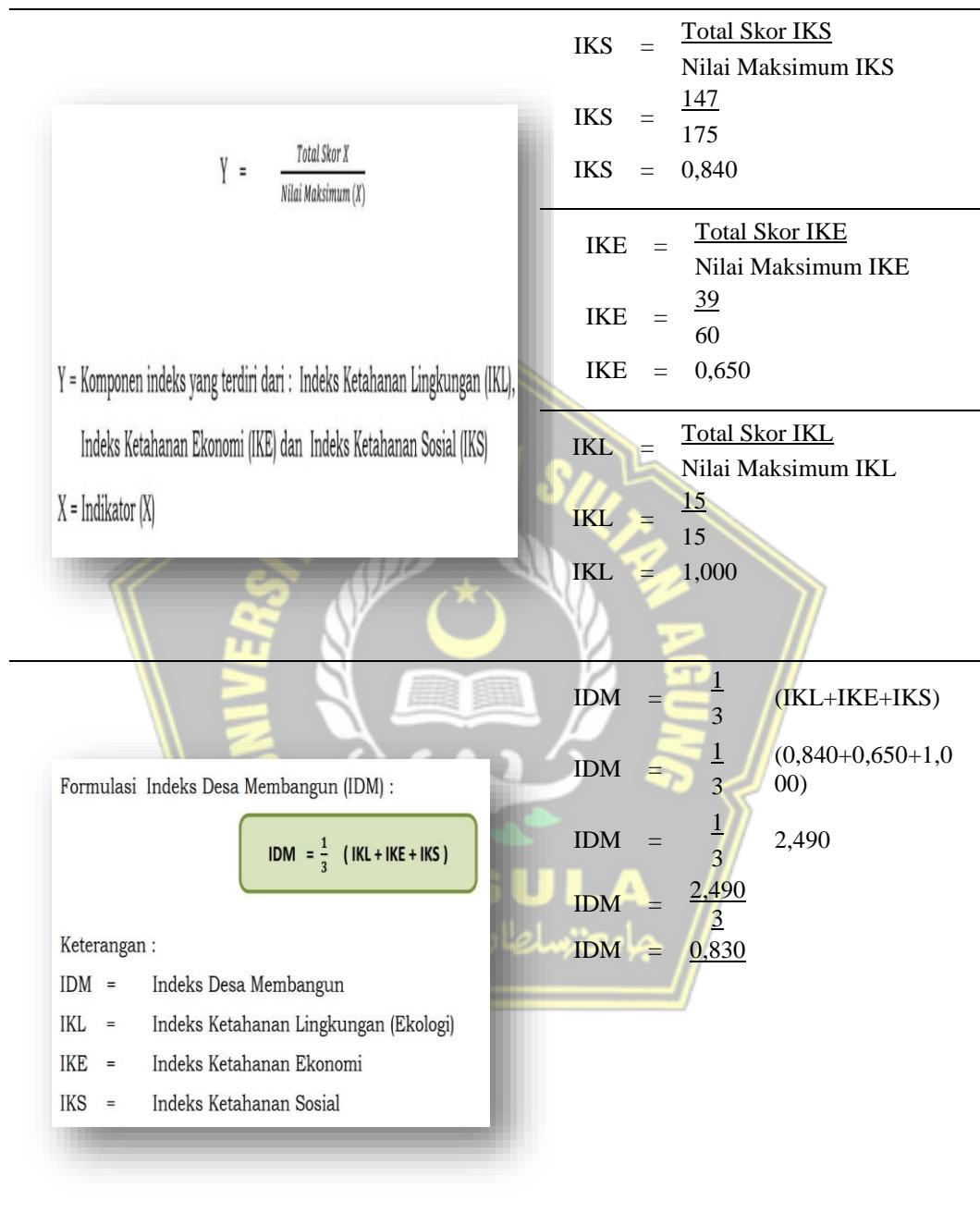
8. Strategi ST-6 (Pemdes, BPD, LKD bersepakat dalam forum musdes untuk menyusun paket kebijakan ekonomi Desa yang dapat menstimulus pertumbuhan industri mikro dan kecil di Desa (S-1,2,3,4,5,7,8 ; T-9,10,11,12)). Strategi ini bisa dilakukan berbasis kewenangan Desa. Dana Desa bisa dipakai untuk menjawab kegiatan ini. Bahkan pembangunan dan pengembangan ekonomi Desa menjadi prioritas atas focus penggunaan Dana Desa setiap tahun. Yang kemudian diperlukan adalah konsolidasi internal Desa Waimi. Sinergisitas antara lembaga-lembaga desa dengan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan T-9 dan T-10.
9. Strategi ST-7 (Membuka unit usaha di Bumdes atau Koperasi berkaitan dengan jasa logistik di Desa (S-2,3,4,8 ; T-13)). Strategi ini bisa dilakukan berbasis kewenangan Desa. Pemerintah Desa dapat memberdayakan Bumdes atau Koperasi Desa, membuka satu unit usaha di bidang layanan jasa ini. Sehingga, kebutuhan-kebutuhan ekspedisi masyarakat dapat terlayani. Dana Desa dapat dipakai untuk pemberdayaan Bumdes dan pada dasarnya selaras dengan prioritas atas focus penggunaan Dana Desa setiap tahun. Pemberdayaan Bumdes bukan kebijakan yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan paket strategi kebijakan pendukung yang lengkap. Dibutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga desa dengan kelompok-kelompok ekonomi

masyarakat. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan T-13.

10. Strategi ST-9 (Pemdes mengkoordinasikan kemitraan dengan pengusaha angkutan umum untuk memasang trayek tetap yang melewati Desa Waimi (S1,2,3,4,5,7 ; T16)). Strategi ini bisa dilakukan berbasis kewenangan Desa. Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pengusaha angkutan yang selama ini beroperasi di wilayah Desa Waimi untuk membangun kerjasama berkaitan dengan trayek tetap. Kebijakan ini, merupakan kebijakan bersifat praktis jangka pendek, sambil mempersiapkan potensi-potensi lokal Desa sebagai strategi kebijakan jangka panjang dan berkelanjutan. Ketika kebijakan ini dijalankan langsung bisa menjawab persoalan T-16.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi diatas, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan skor IDM, baik di aspek ketahanan social, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian Desa Waimi akan berhasil menaikkan Status Desa dari berkembang ke Desa Mandiri. Simulasi perhitungannya sebagai berikut :

Gambar 5.4.
Simulasi Perhitungan IDM Desa Waimi Menuju Desa Mandiri



Dari simulasi diatas, ada kenaikan pada aspek IKS yang semula 0,073 (lihat gambar 5.3) menjadi 0,840. Untuk aspek IKE dari semula

0,433 (lihat gambar 5.3) menjadi 0,650. Untuk aspek IKL tetap atau tidak berubah.

Selain strategi-strategi langsung di atas, dalam arti yang berpengaruh secara langsung menjawab bobot nilai IDM yang rendah, tentunya juga dibutuhkan strategi-strategi tidak langsung, tetapi memiliki dampak atau sebagai pendukung keberhasilan strategi-strategi tersebut diatas. Bisa dilihat pada Tabel 5.. tentang matriks SWOT.

Strategi-strategi yang sudah disebutkan dalam rangka menuju status Desa mandiri, merupakan kombinasi kewenangan Desa dan supra Desa yang menurut kajian peneliti, berdasar kajian regulasi dan diskusi lapangan, dipertimbangkan sebagai strategi kebijakan yang relatif bisa dan mungkin diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah. Walaupun dalam tabel 5.5 tentang matriks SWOT masih ada alternatif strategi lainnya yang bisa diambil oleh Desa Waimi, tetapi dipertimbangkan bahwa lebih mungkin untuk kebijakan strategis jangka panjang.

5.6. IMPLEMENTASI STRATEGI

Dalam pokok bahasan sebelumnya, rumusan strategi, sebetulnya implisit telah tersampaikan model-model implementasi dari masing-masing rumusan strategi, walaupun mungkin belum terulas secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, pada pokok bahasan berikut penulis mencoba menguraikan model implementasi strategi-strategi, sehingga boleh menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (Riyanto et al., 2021) implementasi strategi didefinisikan sebagai cara atau tindakan organisasi untuk mengembangkan, memanfaatkan, serta menggabungkan struktur organisasi, system control, dan budaya untuk mengikuti strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Alokasi tugas, peran, dan fungsi memainkan peranan yang sangat penting.

Model implementasi strategi yang akan diuraikan dalam pokok bahasan ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari normatif tahapan pembangunan Desa, struktur, serta fungsi dari setiap lembaga dan elemen-elemen masyarakat sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai Desa.

5.6.1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa merupakan tahapan awal dari periodesasi kepemimpinan Kepala Desa. Cita-cita masa depan Desa selama satu periode pemerintahan secara legal perlu di tuangkan dalam dokumen perencanaan Desa. Seperti sudah disampaikan di awal, bahwa dokumen perencanaan Desa bersifat jangka menengah dan pendek (tahunan).

Dokumen RPJMDes merupakan dokumen perencanaan menengah Desa, dimana dokumen ini disusun mengawali periode kepemimpinan Kepada Desa terpilih. Karena disesuaikan dengan UU No 3 Tahun 2024, maka periode kepemimpinan Kepala Desa adalah 8 tahun. Maka, dokumen RPJMDes sudah harus disesuaikan dengan jangka waktu periode tersebut.

Dokumen RPJMDes existing Desa Waimi masih merujuk UU No 6 Tahun 2024 (6 tahun), yaitu RPJMDes tahun 2020-2025. Secara legal

formal, masa berlaku dokumen itu berakhir di tahun ini (2025). Dan ditahun ini juga Desa Waimi wajib menyusun perubahan terhadap dokumen RPJMDes untuk disesuaikan dengan perpanjangan masa bakti Kepala Desa sesuai UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam konteks penelitian ini, tahun ini (2025), merupakan momentum yang tepat bagi Desa Waimi untuk melakukan perubahan dokumen RPJMDes, agar supaya strategi peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa berbasis IDM dapat dikonsolidasi pada RPJMDes perubahan. Jika hal ini berjalan baik, maka ada peluang pada periode kepemimpinan Desa Waimi tahun ini untuk mewarnai perencanaan tiga tahun kedepan (dua tahun Kepala Desa eksisting dan periode pertama Kepala Desa Baru, akhir 2027) berbasis capaian kinerja IDM.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan kinerja IDM Desa Waimi, jika konsolidasi perencanaan berjalan baik, bukan tidak mungkin periode terakhir nanti (tahun 2027) Desa Waimi sudah mampu menaikkan status dari Desa tertinggal ke Desa Maju. Status Desa Maju di tahun 2027 merupakan target yang sangat realistik. Untuk Menuju Status Desa Mandiri, mungkin bisa terwujud di periode pemerintahan selanjutnya (2028-2035).

Berdasarkan kajian Peneliti bersama Pemerintah, Lembaga, dan semua unsur terkait Desa Waimi, beberapa program yang dapat di masukan dalam perubahan Dokumen RPJMDes dan dapat ditindak lanjuti dalam penyusunan dokumen RKPDes tahun 2026 dan 2027. Program dan kegiatan

yang dirumuskan ini merujuk kepada kode program dan kegiatan serta anggaran sesuai regulasi tentang perencanaan desa ((Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasnigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020) dan regulasi pengelolaan keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Tabel 5.7
Stategi Program/Kegiatan Dalam Mendukung Percepatan Capaian Kinerja IDM Desa Waimi

No	Bidang-Sub Bidang	Nama Program/Kegiatan	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun ke 1-6					Pola Pelaksanaan dan Dukungan Anggaran
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pembangunan Desa-Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan); Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) - Insentif Perawat Desa	Belum ada pembentukan Poskesdes	SK Pembentukan Poskesdes	-	-	-	-	Swakelola mengunakan DD dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab Alor
2	Pembinaan Kemasyarakatan-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana/Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Tim Penanggulangan Bencana Belum Terbentuk	Pembentukan Tim dan Pelatihan	-	-	-	-	Swakelola mengunakan DD dan berkoordinasi dengan Badan

		Jalur Evakuasi Bencana belum tersedia	Pemancangan Jalur Evakuasi bencana	-	-	-	-	Penanggulangan Bencana Kab Alor
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa-Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)/Pembekalan Tim Perencanaan Desa	Belum Pernah dilakukan	Pembekalan Tim Perencanaan Desa	Swakelola menggunakan ADD dan berkoordinasi dengan Pendaeping Desa dan Dinas PMD Kabupaten			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa-Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Belum Pernah dilakukan	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Swakelola mengunakan DD dan berkoordinasi dengan Pendaeping Desa dan Dinas PMD Kabupaten
5	Pembangunan Desa-Kesehatan	167/860 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)/Peningkatan kepesertaan BPJS Masyarakat	penduduk. Dibutuhkan penambahan bahan 478	80 kepeser taan BPJS Kesha tan	80 80	80	80 79	Swakelola mengunakan DD dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab Alor/BP JS
6	Pembangunan Desa-Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa-Pembangunan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa	belum tersedia	Pembangunan Perpustakaan /Taman bacaan Desa	-	-	-	

	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa - Pembangunan Lapangan Futsal	Belum ada	Pembangunan Lapangan Futsal	Pembangunan Lapangan Futsal	Pembangunan Lapangan Futsal	Pembangunan Lapangan Futsal	Swakelola mengunakan ADD dan Swadaya Masyarakat
7	Pembinaan Kemasyarakatan dan Olah Raga	Sudah berjalan, perlu peningkatan aspek keberlanjutan	Pembinaan Kelompok Olahraga Desa	Pembinaan Kelompok Olahraga Desa	Pembinaan Kelompok Olahraga Desa	Pembinaan Kelompok Olahraga Desa	Swakelola mengunakan ADD dan Swadaya Masyarakat
8	Pembangunan Desa - Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa - Pemasangan Fasilitas dan Jaringan Internet Kantor Desa	Belum ada	Pemasangan Fasilitas dan Jaringan Internet Kantor Desa	-	-	Swakelola mengunakan DD dan bekerja sama dengan puhak ke-3 jasa layanan internet Desa
9	Pembinaan Kemasyarakatan - Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelemparaan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) - Pembangunan Poskamling	Belum ada	-	Pembangunan Poskamling	Pembangunan Poskamling	Swakelola mengunakan ADD dan Swadaya Masyarakat
10	Pembangunan Desa - Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) - Pemasangan jaringan listrik bagi Gakin	188 rt dan 230 rt sudah terpasa ng. 42 rumah belum, target penambahan bahan minima 122 rt	10 Rumah	10 rumah	10 rumah	2 Rumah



1	1	sudah ada pembe ntukan	Penguat an Kapasita s	Penguat an Kapasita s	Penguat an Kapasita s	Penguat an Kapasita s	Swakel ola mengg unakan ADD dan berko rridnas i dengan Penda mping Desa dan Dinas PMD, dan Dinas Kopera si Kabupa ten
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM - tetapi belum beraktif itas	Penguanan Kapasitas Koperasi Desa Merah Putih	Koperasi Desa Merah Putih	Koperasi Desa Merah Putih	Koperasi Desa Merah Putih	
1	2	Sudah ada pembentukan Bumde s, tetapi belum aktif	Penguat an Kapasita s Penguru s Bumdes	Penguat an Kapasita s Penguru s Bumdes	Penguat an Kapasita s Penguru s Bumdes	Penguat an Kapasita s Penguru s Bumdes	Swakel ola mengg unakan ADD dan berko rridnas i dengan Penda mping Desa dan Dinas PMD
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) - Penguanan Penanaman Modal	Penguanan Kapasitas Pengurus Bumdes	Penguru s Bumdes	Penguru s Bumdes	Penguru s Bumdes	
1	3	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika - Pengembangan Komunikasi, dan Informatika	Ada transpo rtasi, tetapi trayek belum tetap	Kerjasam a pelayana n Kerjasama transpor tasi dengan trayek tetap	Kerjasam a pelayana n Kerjasama transpor tasi dengan trayek tetap	Kerjasam a pelayana n Kerjasama transpor tasi dengan trayek tetap	Swakel ola mengg unakan ADD dan berko rridnas i dengan Penda mping Desa dan Dinas PMD, Serta Dinas Perhub ungkan
		Perkerjasama (MoU)					
		pelayanan transportasi darat					

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan berdasarkan tabel strategi program dan kegiatan diatas:

1. Jika simulasi Program kegiatan dijalankan sesuai pada tahun anggaran sesuai rencana di atas, maka hanya dibutuhkan waktu 1 tahun untuk merubah status Desa Waimi dari tertinggal menuju Desa maju, dan

butuh kurang lebih 4 sampai dengan 5 tahun untuk mencapai Desa mandiri. Jadi, periode pemerintahan saat ini yang akan berakhir di tahun 2027, bisa mengantar Desa Waimi sampai kepada status Desa Maju. Selanjutnya, tiga tahun pertama periode pemerintahan selanjutnya (2028-2035) bisa mengantar Desa Waimi menuju Desa Mandiri.

2. Pertanyaanya, apakah bisa lebih cepat? Pada dasarnya, pertimbangan pada point nomor 1 diatas dengan tidak mengenyampingkan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan lainnya yang memang menjadi rutinitas Desa Waimi selama. Tetapi jika konsolidasi diperkuat antara Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan semua elemen masyarakat, bukan tidak mungkin capaian kinerja IDM bisa dipercepat. Sangat dinamis dan ruang percepatan sangat memungkinkan. Bahkan bisa dimulai pada tahun ini (perubahan kegiatan dan anggaran Desa Waimi tahun 2025 ini, biasanya dilakukan bulan September dan oktober tahun berjalan)

5.6.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah tahapan lanjutan dalam siklus pembangunan Desa setelah perencanaan Desa dan penganggaran di finalkan dalam posturs APBDes (anggaran pendapatan dan belanja Desa) dilakukan. Pad adasarnya pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan secara swakelola oleh. Hal ini sesuai dengan UU Desa dan peraturan turunan tentang pedoman pelaksanaan pembangunan Desa.

Bilamana program dan kegiatan-kegiatan strategis berbasis capaian kinerja IDM telah terkonsolidasi dan dengan baik pada dokumen perencanaan Desa dan dokumen APBDes, maka konsolidasi lebih lanjut adalah pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan skema dan pola pelaksanaan yang ada. Ada banyak hal yang bisa diuraikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, baik dalam tataran normative tata kelola pembangunan Desa, maupun pada tataran praktis di lapangan. Hanya pada kesempatan ini coba diuraikan oleh peneliti tentang beberapa hal yang sering terabaikan dalam aspek pelaksanaan pembangunan Desa, padahal penting perannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan swakelo oleh Desa ada beberapa model pelaksanaan kegiatan:

1. Kegiatan dilaksanakan secara langsung oleh kaur(kepala urusan) dan Kasi (kepala seksi). Pelaksanaan ini bisa secara langsung atau bekerjasama dengan pihak ke-3.
2. Karena sifat dan jenis kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara sendiri oleh kaur dan kasi, maka dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam membantu kaur dan kasi, tim juga dapat lebih lanjut membentuk kelompok-kelompok kerja yang berasal dari unsur masyarakat. Tentunya semuanya itu sangat tergantung dari kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dua skema besar besar pelaksanaan kegiatan diatas tentunya masih dapat dijabarkan lagi sesuai regulasis dan kebutuhan lapangan. Contohnya

koordinasi bersama Pendamping Desa, dan Pemerintah secara berjenjang sesuai kebutuhan sifat dan jenis program dan kegiatan. Adanya kolaborasi yang sinergis Desa dengan pihak internal dan eksternal Desa sangat dibutuhkan, karena banyak bagian-bagian dalam konteks pembangunan Desa yang secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan fungsi tugas lembaga-lembaga lain, dan khususnya OPD teknis tingkat Kabupaten, provinsi, dan Pusat.

Beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah, pertama aspek Publikasi dan sosialisasi kegiatan. Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan melewati fase *input-proses-output-impact-benefit*. Fase *input* sampai *output*, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa bersama tim pelaksana kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang sasarannya adalah lembaga, kelompok masyarakat, atau masyarakat pada umumnya, aspek impact dan benefit dari program dapat diukur dari pelestarian program dan kegiatan oleh kelompok sasaran, ketika program/kegiatan selesai dan diserahterimakan oleh Pemerintah Desa ke pemanfaat program/kegiatan.

Oleh karena itu, aspek sosialisasi dan publikasi kegiatan, sebelum kegiatan dilakukan memiliki peranan yang penting. Semua unsur yang menjadi bagian dari program/kegiatan, khususnya sasaran dari program tersebut, perlu duduk bersama dalam satu forum musyawarah tingkat Desa berdiskusi, bertukar pikiran, untuk memiliki pemahaman yang sama tentang latar belakang, maksud dan tujuan program/kegiatan dilaksanakan.

Peran Kepala Desa dalam mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pembangunan Desa ini menjadi penting.

Dalam pasal 56 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasnigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020) ditegaskan bahwa Sosialisasi dan publikasi sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan Desa dapat dilakukan melalui :

1. Musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa
2. Sistem informasi Desa
3. Papan informasi Desa
4. Media lain sesuai kondisi Desa

Hal yang kedua adalah terkait pembekalan terhadap Pelaksana kegiatan (kaur atau kasi) dan tim pelaksana kegiatan. Pembekalan terhadap pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan program/kegiatan penting untuk dilaksanakan. Disebutkan dalam pasal 57 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasnigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020), bahwa unsur-unsur yang perlu dihadirkan pada saat pembekalan antara lain, perangkat Desa, tim pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa.

Dalam pembekalan dimaksud akan dikonsolidasikan pemahaman yang sama akan prosedur dan mekanisme pembangunan Desa, struktur dan

sistem pengelolaan program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya Desa yang ada, dan hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Dua aspek ini yang kadangkala absen untuk dikoordinasikan oleh Kepala Desa pada tahapan pelaksanaan kegiatan. Termasuk di Desa Waimi. Sehingga menyebabkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa memiliki terhadap program/kegiatan bisa ditingkatkan. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa. ketika hal ini dibiasakan dalam tata kelola pembangunan Desa, akhirnya akan terbentuk semacam budaya tata kelola pembangunan Desa yang baik. Dengan prinsip kebersamaan ini tentunya harapan akan keberhasilan dimasa yang akan datang menjadi sebuah keniscayaan.

5.6.3. Evaluasi Pembangunan Desa

Evaluasi pembangunan Desa juga menjadi bagian penting dari tahapan pembangunan Desa. secara normative evaluasi pembangunan Desa diatur dalam banyak regulasi pembangunan Desa. secara umum evaluasi dapat dilakukan terhadap terhadap perencanaan Desa, evaluasi terhadap penganggaran, dan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Dalam konteks tata kelola pembangunan Desa, evaluasi dilakukan secara berjenjang. ada evaluasi pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, serta pada tingkat Kementerian yang mengurus tentang Desa.

Pada level kementerian, minimal ada 2 Kementerian “utama” sebagai leading sektor, dana satu Kementerian “pendukung”. Berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan Desa oleh Kementerian Desa, berkaitan dengan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri, serta pendukung urusan pengelolaan dana desa oleh kementerian Keuangan.

Pada konteks penelitian ini, evaluasi yang dimaksudkan lebih pada peran internal Desa, lembaga-lembaga Desa, dan unsur masyarakat Desa dalam mengawal pembangunan Desa sehingga berjalan seperti yang diharapkan bersama. Minimal ada tiga skema evaluasi yang dapat dijalankan oleh Desa, pertama evaluasi internal Pemerintah Desa, kedua evaluasi oleh BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, dan yang ketiga evaluasi yang dilakukan oleh representasi masyarakat Desa dalam wadah forum musyawarah Desa.

Evaluasi internal Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa dalam forum rapat kerja dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil pemeriksanaan, pemantauan, dan supervise oleh Kepala Desa menjadi dasar rapat kerja evaluasi dilaksanakan. Mekanisme evaluasi internal ini sering terabaikan untuk dilaksanakan, tetapi sebetulnya menjadi tahapan yang wajib dan memiliki peran penting dalam konteks tat kelola pembangunan Desa yang baik.

Evaluasi yang kedua adalah yang dilakukan oleh BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD adalah

lembaga yang menjalankan tiga fungsi penting, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi aspiratif (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016). Tiga fungsi BPD tersebut merupakan tiga bagian yang pada dasarnya saling terkait satu dengan yang lain.

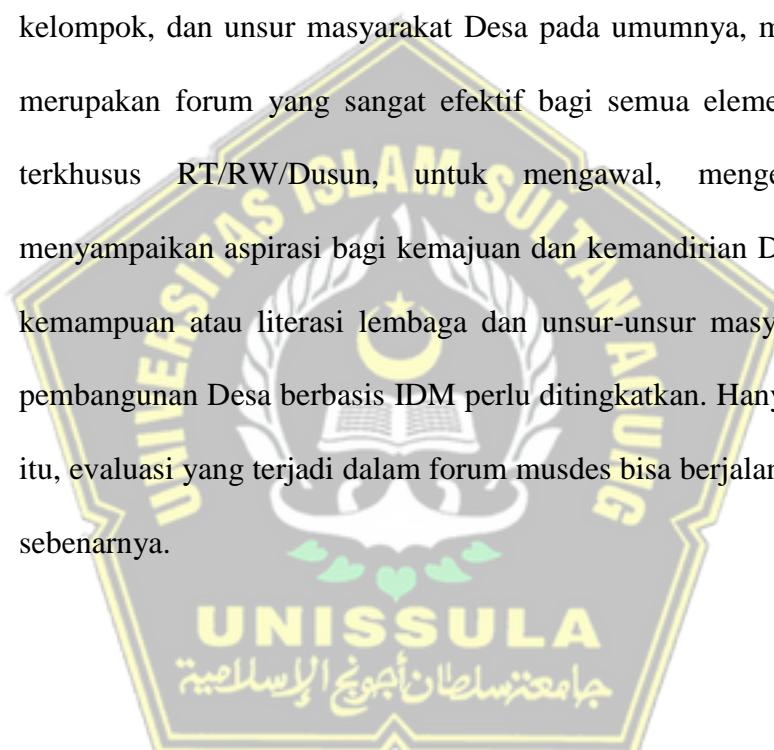
Pengawasan menjadi fungsi yang paling dekat kaitannya dengan kerja-kerja evaluasi pembangunan Desa. BPD memiliki hak menyatakan pendapat terkait dengan kerja-kerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. hanya saja dalam konteks Desa Waimi, rapat kerja dengar pendapat antara bidang dalam tubuh BPD bersama Pemerintah Desa sebagai wujud fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD belum pernah dilakukan.

Mengingat pentingnya evaluasi ekternal yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa dalam rangka mengawal program dan kegiatan yang ada, maka peningkatan kapasitas BPD dalam memahami fungsi dan perannya menjadi bagian penting dalam konteks pembentahan atau revitalisasi fungsi BPD ke depan.

Yang ketiga terkait dengan evaluasi oleh semua elemen masyarakat Desa dalam forum Musyawarah Desa (musdes). Forum musdes adalah forum pengambilan keputusan strategis dalam tata kelola pembangunan Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, 2019). Dalam system tata kelola pembangunan Desa, musdes adalah lembaga

tertinggi pengambilan keputusan, baik dalam aspek perencanaan Desa maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pasal 74, Peraturan menteri Desa tentang pedoman pembangunan Desa mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dalam forum Musdes.

Karena forum musdes merupakan representasi daari semua lembaga, kelompok, dan unsur masyarakat Desa pada umumnya, maka forum ini merupakan forum yang sangat efektif bagi semua elemen masyarakat, terkhusus RT/RW/Dusun, untuk mengawal, mengevaluasi, dan menyampaikan aspirasi bagi kemajuan dan kemandirian Desa. untuk itu, kemampuan atau literasi lembaga dan unsur-unsur masyarakat tentang pembangunan Desa berbasis IDM perlu ditingkatkan. Hanya dengan cara itu, evaluasi yang terjadi dalam forum musdes bisa berjalan pada rel yang sebenarnya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap fenomena status kemajuan dan kemandirian Desa Waimi berbasis IDM dengan pendekatan analisis SWOT, menghasilkan beberapa strategi kebijakan yang akan membawa Desa Waimi naik ke status Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri. Adapun strategi kebijakan yang bisa dilakukan adalah strategi langsung dan strategi pendukung. Strategi langsung adalah kebijakan terkait langsung dengan indikator IDM dan terhadap bobot nilai IDM, sedangkan strategi pendukung adalah kebijakan yang tidak terkait langsung dengan indikator maupun bobot nilai IDM, tetapi bersifat mendukung pencapaian kinerja indikator-indikator IDM. Kedua model strategi ini saling kait-mengait, atau terikat satu dengan yang lain.

6.1.1. Strategi Menuju Desa Berkembang.

Untuk memenaikan status kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi dari status Desa tertinggal ke status Desa berkembang, maka Desa Waimi cukup memilih untuk menaikan indeks ketahanan sosial atau indeks ketahanan lingkungan. Strategi kebijakan satu dari dua kebijakan yang ada, yaitu :

1. Mengaktifkan pelayanan Pos Kesehatan Desa (poskesdes) sehingga akses masyarakat ke Poskesdes menjadi dekat.

2. Melakukan konsolidasi dan perencanaan desa tanggap bencana, terhadap potensi bencana yang ada di Desa.

6.1.2. Stategi Menuju Desa Maju.

Untuk memenaikan status kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi dari status Desa tertinggal ke status Desa maju, maka Desa Waimi wajib, dan cukup dengan menyelesaikan kebijakan seperti tersebut pada poin 6.1.2. Dalam konteks penelitian ini peneliti menyarankan agar mengambil kebijakan atau mempertegas kebijakan di atas, yaitu, Mengaktifkan pelayanan Pos Kesehatan Desa (poskesdes) sehingga akses masyarakat ke Poskesdes menjadi dekat.

6.1.3. Stategi Menuju Desa Mandiri.

Untuk memenaikan status kemajuan dan Kemandirian Desa Waimi dari status Desa tertinggal ke status Desa mandiri, maka Desa Waimi wajib menyelesaikan kebijakan seperti tersebut pada poin 6.1.2. Kemudian ditambahkan dengan beberapa strategi kebijakan lanjutan, antara lain:

1. Melakukan penambahan layanan kepertaean BPJS Kesehatan minimal 75% dari jumlah penduduk Desa.
2. Melakukan pembangunan taman baca/perpustakaan Desa dengan menggunakan Dana Desa dan pengembangan aneka kursus di Desa menggunakan fasilitas perpustakaan Desa.
3. Melakukan pembangunan fasilitas olah raga Desa dengan menggunakan Dana Desa, sekaligus pembinaan aneka kelompok olah raga yang ada di Desa.

4. Melakukan pemasangan fasilitas internet di kantor Desa untuk percepatan menuju Desa digital.
5. Melakukan pembangunan Poskamling Desa dengan menggunakan ADD dan dukungan swadaya masyarakat.
6. Penambahan penempatan tenaga medis di Pustu Desa Waimi.
7. Penambahan Pemasangan meteran bagi rumah tangga yang belum teraliri listrik.
8. Pelaksanaan paket kebijakan ekonomi lokal Desa yang dapat menstimulus pertumbuhan industri mikro dan kecil di Desa.
9. Membuka dan mengaktifkan unit usaha di Bumdes atau Koperasi Desa Merah Putih berkaitan dengan jasa logistik di Desa
10. Adanya kerjasama Desa dengan pengusaha angkutan umum untuk memasang trayek tetap yang melewati Desa Waimi

6.1.4. Startegi Pendukung.

Selain strategi langsung tersebut diatas, beberapa strategi pendukung, antara lain:

1. Penguatan dokumen perencanaan Desa, baik RPJMDes maupun RKPDes berbasis kinerja IDM.
2. Fokus penggunaan Dana Desa diarahkan bagi pemenuhan prioritas program dan kegiatan berbasis IDM.
3. Penguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan Desa terkait literasi pembangunan Desa berbasis IDM.

4. Mendorong peran Pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa, serta unsur kelompok dan masyarakat Desa kelembagaan yang ada di Desa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa berbasis IDM.

6.2. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan seperti sudah disampaikan diatas, untuk maksud pengembangan strategi peningkatan kinerja IDM dengan pendekatan analisis SWOT, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Literasi tentang pembangunan Desa berbasis Indeks Desa Membangun perlu ditingkatkan ditubuh kelembagaan tingkat Desa dan seluruh unsur masyarakat Desa. hanya dengan cara ini Desa-desa secara organik dapat mengorganisir diri untuk keluar dari persoalan pembangunan yang ada, dan menuju kinerja pembangunan Desa yang lebih baik.
2. Desa adalah bagian pemerintahan terkecil dalam struktur dan sistem tata kelola pembangunan nasional. Kemajuan Desa adalah kemajuan Negara. Kemajuan dan kemandirian Desa-Desa di Indonesia berarti kemajuan dan kemandirian Indonesia. Oleh karena itu, Desa tidak boleh dibiarkan sendiri. Negara harus hadir untuk memajukan dan memandirikan Desa-desa di Indonesia. Peran semua pihak sangat diperlukan, pemerintah secara berjenjang, perguruan tinggi, termasuk swasta dan NGO. Terkhusus, kerja-kerja pendampingan Desa yang

dilakukan secara langsung oleh Pendamping Desa (Tenaga Pendamping Profesional -Kementerian Desa) sangat dibutuhkan.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dialami oleh peneliti, sepanjang penelitian dilakukan, adalah :

1. Waktu penelitian yang mungkin terlalu singkat, sehingga partisipasi aktif yang mendalam dan luas dari lembaga-lembaga di tingkat Desa, serta unsur masyarakat terasa terabaikan dalam penelitian ini. Sehingga data-data yang disusun untuk dijadikan bahan analisis lebih lanjut mungkin saja bukan merupakan representasi riil dari pikiran semua unsur yang ada di Desa Waimi.
2. Analisis data mungkin terlalu subyektif, peneliti mungkin terlalu dominan dalam merumuskan strategi yang tepat bagi kemajuan dan kemandirian Desa Waimi berbasis IDM.
3. Rumusan strategi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk Desa Waimi Kabupaten Alor, dan tidak dapat digeneralisasi untuk Desa lainnya.

5.4. Agenda Penelitian Yang Akan Datang

1. Penelitian selanjutnya terkait dengan kinerja pembangunan Desa berbasis IDM dapat menemukan rumusan masalah penelitian tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja IDM Desa.
2. Terkait metode pengumpulan data-data dasar sebagai bahan kajian atau analisis sebisa mungkin menggunakan metode survei atau wawancara mendalam.

3. Dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait instrument IDM sebagai alat ukur status kemajuan dan kemandirian Desa yang lebih relevan dengan isu-isu kewenangan lokal berskala Desa. Sedapat mungkin ada pengembangan atau elaborasi pada aspek ketahanan tata kelola pembangunan Desa, mulai dari manajemen pengelolaan tahapan pembangunan Desa, administrasi pembangunan Desa, peran dan fungsi lembaga-lembaga Desa, sesuai dengan prinsip tata kelola pembangunan Desa yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). *Manajemen Strategik Daya Saing dan Globalisasi*. <https://repository.upnjatim.ac.id/86/24/1a.pdf>. URL DOKUMEN Buku Manajemen Strategi.pdf
- Artika, A. &. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI NUSA TENGGARA TIMUR*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Fachrurazi dkk. (2022). *Pengantar Manajemen*. https://www.researchgate.net/publication/362722704_PENGANTAR_MANAJEMEN/link/62fc0c88ceb9764f72023d34/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Fiantika, et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Case Study* (Y. Novita (ed.)). https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Husein, U. (2020). Manajemen Strategik (Konsep dan Analisis). In *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/793/1/Buku MS draft.pdf>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Kebijakan Dana Desa TA 2024*. November 2023. www.kemenkeu.go.id
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian D, Pub. L. No. 303, 1 (2020). <https://kanaldesa.com/peraturan/sk-dirjen-ppmd-kemendesa-3032020>
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan No 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, Pub. L. No. 398.4.1, 1 (2021). <https://dinpmid.bojonegorokab.go.id/berita/baca/84>
- Keputusan Menteri Desa, PDT, Dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa 2023, Pub. L. No. 174, 1 (2023). [https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/media/download/lampiran/20231228100002_Salinan_Keputusan_Menteri_Desa,_PDT,_dan_Transmigrasi_Nomor_174_Tahun_2023_tentang_Status_Kemajuan_dan_Kemandirian_Desa_2023_REV_\(2\).pdf](https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/media/download/lampiran/20231228100002_Salinan_Keputusan_Menteri_Desa,_PDT,_dan_Transmigrasi_Nomor_174_Tahun_2023_tentang_Status_Kemajuan_dan_Kemandirian_Desa_2023_REV_(2).pdf)
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun

- 2024, Pub. L. No. 400, 1 (2024).
<https://id.scribd.com/document/766282156/Salinan-Keputusan-Menteri-Desa-PDT-Dan-Transmigrasi-Nomor-400-Tahun-2024-Tentang-Status-Kemajuan-Dan-Kemandirian-Desa-2024>
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022, Pub. L. No. 80, 1 (2022).
<https://dinpmd.bojonegorokab.go.id/berita/baca/109%0A>
- Krisnandi dkk. (2019). Pengantar Manajemen. In Melati (Ed.), *Pengantar Manajemen*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-18-8>
- Nababan, H. (2009). Manajemen Stratejik : Langkah Tepat Peningkatan Kinerja Pustakawan. *Media Pustakawan*, 1–10.
<https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/901>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (2016). <https://www.ciptadesa.com/permendagri-110-tahun-2016/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2024 Tentang POS Pelayanan Terpadu (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304630/permendagri-no-13-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Physical Review B (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (2015).
<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-83-tahun-2015/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (2015).
<https://www.ciptadesa.com/permendagri-84-tahun-2015/>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150585/permendes-pdtt-no-2-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi No 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2020). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, 1 (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pub. L. No. 190 (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/cea93b45-4290-4a91-950a-572b6575a0b9/190~PMK.07~2021Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Jdih.Kemenkeu.Go.Id 1 (2023).

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/ac689fbb-b760-4aa8-99ed-76954739da27/2023pmkeuangan146.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pub. L. No. 201, Jdih.Kemenkeu.Go.Id 1 (2022). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~PMK.07~2022Per.pdf>
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- Riyanto, S., Azis, M. N. L., & Putera, A. R. (2021). Analisis Swot Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi. In *Analisis SWOT sebagai penyusunan strategi organisasi*. https://pics.unipma.ac.id/content/download/B009_18_07_2022_03_26_0210_Turnitin Buku Analisis SWOT.pdf%0A
- Suardhika, I. N. (2018). Manajemen Strategik “Konsepsi Dasar dan Praktis.” In *CV.Noah Aletheia*. <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00039.pdf>
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 439–446. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 6 1 (2014). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/>
- Wiswasta, I. G. N. A., Agung, I. A. A., & Tamba, I. M. (2018). *Analisis SWOT (Kajianategi, dan Pengembangan Usaha)*. <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00057.pdf>